



UNIVERSITAS INDONESIA

**DINAMIKA PERSENJATAAN INDONESIA DAN MALAYSIA :
STUDI TENTANG PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER
INDONESIA BERKAITAN DENGAN KONFLIK AMBALAT
(2006-2010)**

TESIS

GITA NADYA HERDIANI

0906589785

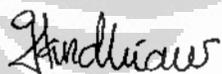
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : GITA NADYA HERDIANI

NPM : 0906589785

Tanda Tangan : 

Tanggal : 15 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Gita Nadya Herdiani
 NPM : 0906589785
 Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional
 Judul Tesis : Dinamika Persenjataan Malaysia dan Indonesia :
 Studi Tentang Peningkatan Kapabilitas Militer
 Indonesia Berkaitan dengan Konflik Ambalat
 (2006-2010)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Andi Widjajanto, MS, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Asra Virgianita, MA (.....)

Pembimbing : Dr. Fredy BL. Tobing (.....)

Penguji Ahli : Dr. Hariyadi Wiryawan (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Nadya Herdiani
NPM : 0906589785
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Dinamika Persenjataan Malaysia dan Indonesia : Studi Tentang Peningkatan Kapabilitas Militer Indonesia Berkaitan dengan Konflik Ambalat (2006-2010)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta 15 Juni 2011

Yang menyatakan,



(Gita Nadya Herdiani)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil ‘alamin

Dengan ini saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian berjudul *Dinamika Persenjataan Malaysia dan Indonesia: Studi tentang Peningkatan Kapabilitas Militer Indonesia Berkaitan Dengan Konflik Ambalat (2006-2010)* ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sebuah karya yang berupaya menganalisis peningkatan kapabilitas militer indonesia sehubungan dengan adanya konflik Ambalat.

Saya menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak mungkin tercapai tanpa pihak-pihak yang telah banyak membantu dan membimbing. Oleh karena itu, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada:

- 1) Bapak Dr. Fredy BL. Tobing, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, membagi ilmu serta memberikan masukan di dalam tesis ini.
- 2) Bapak Dr. Makmur Keliat, selaku Ketua Program Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia, yang telah memberikan penulis kesempatan dalam menyelesaikan tesis ini.
- 3) Kedua orang tua penulis, Ir. Hermawan, MSi, dan Dra. Dyna SA, MM atas doa dan kasih sayang dan semangat tanpa henti serta kepercayaan bahwa penulis pasti bisa melalui tesis ini dengan baik. Tidak ada daya bagi penulis tanpa ridho papa dan mama.
- 4) Seluruh jajaran Staf Pengajar pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional S2 FISIP UI, mbak Asra, mbak Riris, Pak Hariyadi, Mas Andi, dan lainnya.
- 5) Seluruh jajaran Staf Sekretariat S2 FISIP UI Salemba, terutama untuk mba Ice dan Pak Udin.

- 6) Kedua adik penulis yang sangat penulis sayangi , Geni Fitria H (geyaa baa) dan Garin Indra H (kaka galiin), terima kasih atas dukungan dan keceriaan kalian sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
- 7) My Daniel, teman berbagi, sahabat, partner kerja yang selalu mendukung dan menemani penulis. Terimakasih untuk semua bentuk perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, hal tersebut sangat berperan besar dalam penyelesaian tesis ini.
- 8) Sepupu-sepupu ku yang sudah membantu menyelesaikan tesis ini, utk yang di depok, Rindayu Resti, bos Berry, Rizkia dan yg lainnya.
- 9) Keluarga Besar H. Saeful Bachri. Wa Hera, Pak De Joko, Bi Ilin, Om Bambang, Wa Adenan.
- 10) Keluarga Besar H. Sasmita Atmadja. Terutama untuk mama Lilis, mama neneng, dan papa dokter.
- 11) Sahabat terbaikku, Regia Mediana yang sangat membantu saya untuk masih bisa tertawa disaat stress dan panik dalam menyelesaikan tesis ini.
- 12) Seluruh jajaran Staf Kementrian Pertahanan RI yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini,
- 13) Seluruh jajaran Staf TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU yang sudah membantu penulis baik dalam diskusi informasi data yang diberikan kepada penulis.
- 14) Teman-teman terbaik Angkatan 18 S2-HI Universitas Indonesia yang selalu menyemangati satu sama lain agar dapat menyelesaikan tesis bersama-sama. *The Charlie's Angels* (Abbas, Haura, Fifi), Kaori, Putra, Awi, Banda, Dudi, Fanny, Gadis, Andrew, dan rekan-rekan lainnya.
- 15) Karyawan terbaik ku, Olivia, Bella, Fanny, mba Ira, terimakasih telah banyak membantu saya disaat saya sibuk menyelesaikan tesis ini, kalian dapat dipercaya untuk menjaga mata pencaharian saya yang sangat berarti. Semoga ke depan nya kita akan semakin sukses, karena saya selalu ingat bahwa dimana ada perusahaan yang besar selalu berawal dari yang kecil.
- 16) Angkatan 19 S2-HI Universitas Indonesia yang menemani penulis di semester akhir perkuliahan.

- 17) Seluruh teman-teman di Kota Kinabalu dan Kuala Lumpur, terimakasih sudah memberikan saya perasaan *feels like home* selama saya berada disana.
- 18) Semua teman-teman SMP, SMU, S1 HI UNPAD, Batch 16 Air Asia Crew, yang sangat banyak sehingga tdk bisa disebutkan satu persatu.
- 19) Keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat, serta rekan-rekan lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu di dalam kesempatan ini.

Saya berharap semoga Allah SWT berkenan memberkati dan membalas kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu. Saya menyadari bahwa karya berjudul *Dinamika Persenjataan Malaysia dan Indonesia : Studi tentang Peningkatan Kapabilitas Militer Indonesia Berkaitan Dengan Konflik Ambalat (2006-2010)* ini masih jauh dari kata sempurna. Saya memiliki harapan besar banyaknya masukan dan kritikan yang tentunya akan semakin mengembangkan gagasan dalam tulisan ini. Dengan demikian kata pengantar ini saya akhiri. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Jakarta 15 Juni 2012

Gita Nadya Herdiani

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA

Gita Nadya Herdiani
0906589785

ABSTRAK

Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui peningkatan kapabilitas militer Indonesia dimulai dari periode tahun 2006 hingga tahun 2010 sehubungan dengan adanya konflik Ambalat pada tahun tersebut. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan faktor-faktor yang membuat Indonesia meningkatkan kapabilitas militernya, pemahaman dan penjabaran yang terjadi seputar konflik Ambalat yang menjadi tolak ukur penulis dalam menganalisa peningkatan kapabilitas militer Indonesia. Lalu berlanjut pada melihat dan mengukur sejauh mana kapabilitas militer antara Indonesia dan Malaysia, dan melihat seberapa besar pengaruh dari kapabilitas militer Malaysia dapat mempengaruhi peningkatan militer Indonesia serta menganalisa sejauh mana dinamika persenjataan diantara kedua negara tersebut. Melihat kapabilitas militer dari segi alutsista (alat utama sistem senjata), anggaran pertahanan, dan *manpower*.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi dokumen yang berkaitan dinamika persenjataan Indonesia-Malaysia 2006 hingga 2008. Penelitian ini telah membuktikan bahwa strategi *deterrence* yang dilakukan Indonesia merupakan upaya untuk mengimbangi kekuatan militer Malaysia dengan melakukan peningkatan kapabilitas militernya. Dinamika Persenjataan dari kedua negara dapat dianalisis melalui *Action-Reaction model* yang merupakan salah satu model dari "*The Arms Dynamic*" dimana dalam penelitian ini akan dibuktikan ke arah mana kecenderungan dari dinamika persenjataan diantara kedua negara dan implikasinya bagi Indonesia dengan menggunakan tiga indikator yaitu *Timing*, *Magnitude*, dan *Awareness*. Dampak positif konflik Ambalat bagi Indonesia adalah langkah awal Indonesia menjalankan modernisasi militernya agar bisa mencapai kekuatan militer minimum yang bisa menjaga setiap wilayah Indonesia.

Kata Kunci :

Kapabilitas militer, dinamika persenjataan, *arms build-up*, ambalat, alutsista, perlombaan senjata, *deterrence*, modernisasi militer, *Action-Reaction model*, *Timing*, *Magnitude*, dan *Awareness*

THE UNIVERSITY OF INDONESIA
THE FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS
POSTGRADUATE PROGRAM

Gita Nadya Herdiani
0906589785

ABSTRACT

The main focus of this research is to observe the improvement of Indonesian's military capabilities starting from the period 2006 through 2010 in connection with Ambalat's conflict. At first, this research is explaining the factors that make Indonesia improves their military capabilities, understanding and elaboration that occur around the conflict that because of Ambalat's conflict, authors analyze the increasing military capabilities in Indonesia. Then continue to observe and measure the arms build-up between Indonesia and Malaysia, and observe the influences factors of military capabilities may affect the arms build-up between Malaysia- Indonesia and analyze the extent the arms dynamic between the two countries military capabilities analyzed in accordance defense equipment, major equipment systems weapons, the defense budget, and manpower.

This research is descriptively conducted by studying documents related to the arms dynamic of Indonesia-Malaysia between the period of 2006 to 2010. This research revealed that the strategy of deterrence made Indonesia an attempt to counte rbalance the military power of Malaysia by arms build-up on their military capabilities. The arms dynamics of the two countries can be analyzed through the Action-Reaction model which in this research will reveal which way in the arms dynamic between the two countries and observe the implications for Indonesia using three indicators, Timing , Magnitude, and Awarness. The positive impact of the Ambalat conflict for Indonesia is making their first step to run their arms build-up and military modernization in order to achieve the minimum force that can stabilized of every teritory in Indonesia.

Key Concept :

Capability of militer, The arms dynamic, arms buid-up, ambalat, major equipment systems weapons, arms race, deterrence, military modernization, Action-Reaction model, Timing, Magnitude, dan Awarness

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Signifikansi Penelitian	11
1.6 Tinjauan Kepustakaan	11
1.7 Kerangka Konsep	12
1.5 Metode Penelitian	20
1.6 Sistematika Penulisan	21
BAB 2 PERSENGKETAAN AMBALAT ANTARA MALAYSIA DAN INDONESIA	23
2.1 Latar Belakang Konflik Ambalat antara Indonesia dan Malaysia	23
2.2 Sengketa Ambalat merupakan konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia	26
2.3 Klaim Blok Ambalat ditinjau dari perspektif Malaysia	29
2.4 Klaim Blok Ambalat ditinjau dari perspektif Indonesia	31
2.5 Aksi dan Reaksi pada Konflik Ambalat	35
2.5.1 Aksi Di Perairan Blok Ambalat	39
2.5.2. Karang Unarang	42
2.6 Fase Penyelesaian konflik Ambalat	43

BAB 3 KAPABILITAS MILITER INDONESIA DAN MALAYSIA49
3.1. Klasifikasi Persenjataan51
3.1.1 Klasifikasi Persenjataan dari Angkatan Darat52
3.1.2 Klasifikasi Persenjataan dari Angkatan Laut52
3.1.3 Klasifikasi Persenjataan dari Angkatan Udara54
3.2. Perkembangan Kapabilites Militer Malaysia57
3.2.1 Kekuatan Angkatan Darat Malaysia59
3.2.2. Kekuatan Angkatan Laut Malaysia59
3.2.3. Kekuatan Angkatan Udara Malaysia62
3.3. Perkembangan Kapabilitas Militer Indonesia64
3.3.1 Kekuatan Angkatan Darat Indonesia66
3.3.2. Kekuatan Angkatan Laut Indonesia66
3.3.3 Kekuatan Angkatan Udara Indonesia68
3.4. <i>Deterrence</i> Dalam Kapabilitas Militer Indonesia dan Malaysia72
BAB 4 DINAMIKA PERSENJATAAN MILITER INDONESIA – MALAYSIA 78
4.1. Dinamika Persenjataan Militer Malaysia 81
4.2. Reaksi Indonesia Dalam Peningkatan Kapabilitas Militer Malaysia.....	87
4.3. Implikasi Konsep <i>The Arms Dynamic</i> Bagi Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Malaysia 98
4.3.1 <i>Action-Reaction model</i> (Aksi-Reaksi) Pada Dinamika Persenjataan Antara Indonesia dan Malaysia 100
4.3.1.1 <i>Magnitude</i> 101
4.3.1.2 <i>Timing</i> 102
4.3.1.3 <i>Awarness</i> 103
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN106
5.1 Kesimpulan106
5.2 Implikasi Bagi Indonesia108
5.3 Saran111
DAFTAR PUSTAKA113

DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL

GAMBAR

Gambar 2.1	Blok Ambalat Secara Teritorial Maritim	25
Gambar 2.2	Peta Perbatasan Antara Indonesia Malaysia, Filipina	29
Gambar 2.3	Klaim Indonesia Atas Blok Ambalat	33
Gambar 3.1	Kapabilitas militer sebagai Faktor Pembangun Negara	50
Gambar 3.2	Beberapa Aspek Yang Mempengaruhi Kapabilitas Militer Indonesia – Malaysia	56
Gambar 3.3	Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia - Malaysia (Ranking Dunia)	64
Gambar 3.4	Peta Kekuatan Militer Indonesia dan Malaysia Berdasarkan CIA The World Fact Book (2010)	69
Gambar 3.5	Perbandingan Personil Angkatan Udara Indonesia Dan Malaysia	70
Gambar 3.6	Perbandingan Personil Angkatan Laut Indonesia Dan Malaysia	71
Gambar 4.1	Anggaran Belanja Militer Indonesia Berdasarkan Peringkat Dunia	92

TABEL

Tabel 1.1	Dinamika Persenjataan	19
Tabel 4.1	Kapabilitas Militer Malaysia (2005-2006).....	82
Tabel 4.3	Kapabilitas Militer Indonesia (2004-2005)	88
Tabel 4.4	Kapabilitas Militer Indonesia (2009-2010)	88



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang bertetangga. Namun, keadaan bahwa keduanya terletak sangat berdekatan satu sama lainnya mengakibatkan kecenderungan timbulnya konflik mengenai garis perbatasan yang jelas di antara keduanya. Apalagi, Indonesia merupakan negara kepulauan, dan perbatasan Indonesia dengan Malaysia juga mencakup perbatasan yang terletak di lautan. Oleh karena hal ini, agak sulit untuk menentukan perbatasan yang terdefinisi dengan jelas.

Sebagai contoh pertama adalah perebutan wilayah Sipadan (4 derajat 06 menit lintang utara - 118 derajat 37 menit bujur timur), dan Ligitan (4 derajat 09 menit lintang utara - 118 derajat 53 menit bujur timur) yang dimenangkan oleh Malaysia melalui Mahkamah Internasional (International Tribunal of Justice/ITJ) pada tanggal 17 Desember 2002, letak dua negara yang demikian berdekatan dan membagi rumpun budaya sama tidak menghalangi terjadinya konflik di antara keduanya.

Konflik kedua yaitu konflik Ambalat yang muncul menyusul dimenangkannya perebutan wilayah Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia. Konflik ini dimulai ketika sebuah perusahaan pengolah minyak bernama Shell membuat kontrak eksplorasi daerah Ambalat dengan Petronas milik Malaysia. Hal ini diprotes oleh pihak Indonesia karena sebelumnya, Shell telah melakukan eksplorasi dengan bekerja sama dengan Pertamina milik Indonesia. Di samping itu, Malaysia memberikan izin pada Shell untuk melakukan eksplorasi di wilayah Ambalat, dimana Indonesia telah terlebih dahulu mengklaim kedaulatannya atas wilayah tersebut. Protes dari Indonesia mengenai kepemilikan wilayah Ambalat disambut oleh Malaysia dengan klaim bahwa wilayah tersebut termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Malaysia. Sebagai legitimasi atas klaim tersebut, Malaysia menggunakan sebuah peta yang dibuat oleh Malaysia sendiri pada tahun 1979, dimana blok Ambalat yang terletak di perairan timur Kalimantan Timur tersebut diklaim sebagai milik Malaysia. Berdasarkan pada beberapa konvensi yang telah

disetujui, jelas disebutkan bahwa blok Ambalat merupakan daerah kedaulatan Indonesia. Adapun beberapa konvensi tersebut di antaranya Konvensi Hukum Laut PBB (United Nations Convention on the Law of Sea/UNCLOS) yang resmi diberlakukan pada tanggal 16 November 1994 setelah diratifikasi oleh 60 negara. Diratifikasinya konvensi ini berarti bahwa secara internasional, konsep Negara Kepulauan Indonesia telah diakui.¹

Indonesia merasa bahwa blok Ambalat ini termasuk ke dalam wilayah NKRI, dan bahkan sebelumnya pemerintah Indonesia sudah menjual hak eksplorasi minyak di kawasan ini kepada perusahaan minyak Unocal. Secara diplomatik, Indonesia sudah melayangkan protes resmi kepada pemerintah Malaysia. Namun, kekuatan militer kedua negara sudah mulai terlibat dalam konflik, meskipun dalam skala kecil ditandai dengan adanya tujuh kapal perang TNI Angkatan Laut yang berpatroli di kawasan konflik dengan dukungan beberapa pesawat pengintai. Patroli, sekaligus menunjukkan kekuatan militer itu dilakukan menyusul adanya pesawat Angkatan Laut Malaysia yang berpatroli di wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya sempat terjadi ketegangan antara kedua pihak, pada saat KRI Rencong TNI AL terlibat manuver dengan sebuah kapal perang Malaysia.

Adapun konsep Negara Kepulauan tersebut berangkat dari Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah kesatuan yang terdiri atas lautan dan daratan. Secara sejarah hukum, Indonesia sejak tahun 1957 telah terus memperjuangkan konsep ini dalam Konferensi Hukum Laut PBB pada tahun 1958 dan 1960. Dengan keikutsertaan 86 negara berlangsunglah Konferensi Hukum Laut yang pertama di Jenewa dari tanggal 24 Februari 1958 sampai dengan 27 April 1958, dengan maksud untuk melaksanakan tugas yang dimandatkan oleh Majelis Umum PBB, yang telah menentukan bahwa "*... an international Conference of plenipotentiaries should be convoked to examine the law of the sea, taking into account not only the legal but also the technical, economic and political aspects of the problem, and to embody the result of its work in one or more international convention ...*"

¹ <http://www.bppk.depkeu.go.id/pp5/artikel1.html>, diakses pada 11 November 2011, pukul 22:00 WIB.

Usaha yang ditempuh oleh Indonesia dalam memperjuangkan untuk diterimanya konsep Negara Kepulauannya atas permasalahan mengenai seberapa jauh batas luasnya Laut Teritorial yang dapat diklaim oleh suatu negara juga diharapkan dapat terselesaikan. Kesulitan yang terdapat bagi penentuan luas Laut Teritorial bukanlah berada pada pertanyaan yang bersifat teknis semata. Hal tersebut banyak tersangkut dengan masalah politis, karena suatu perubahan pemahaman pada pengertian Laut Teritorial, meskipun itu hanya sedikit saja, akan membawa konsekuensi yang cukup berarti dalam lapangan ekonomi maupun militer.

Pada sidang Komite I tanggal 7 Maret 1958 oleh ketua delegasi Indonesia disampaikan keluhan dan penyesalan pemerintah Indonesia atas rancangan konvensi yang diajukan oleh International Law Convention, yang didalamnya tidak terdapat satu pasal pun yang secara khusus mengatur mengenai masalah negara kepulauan. Dengan menunjuk pada arti pentingnya prinsip negara kepulauan bagi Indonesia, pada kesempatan itu pula disampaikan harapan agar kiranya konferensi dapat menetapkan suatu status khusus bagi negara kepulauan, dimana negara kepulauan itu diperlakukan sebagai satu kesatuan baik secara geografi maupun ekonomi dan politik serta dengan memperhatikan situasi istimewa yang dimiliki oleh setiap negara kepulauan. Dalam sidang ini oleh pihak Indonesia tidak diberikan uraian yang mendalam mengenai Deklarasi Djuanda, dikarenakan mengingat acara sidang yang kurang tepat untuk itu. Pada tanggal 14 Maret 1958 oleh delegasi Indonesia ditekankan bahwa prinsip negara kepulauan sangat berarti bagi keamanan Indonesia maupun juga bagi komunikasi antar pulau. Delegasi juga mengingatkan akan adanya problem yang cukup sulit bagi pelaksanaan yurisdiksi negara, jika setiap pulau yang ada di nusantara mempunyai laut teritorialnya sendiri-sendiri. Oleh karenanya adalah sangat tidak tepat bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia bila lebar laut teritorialnya diukur dengan menggunakan metode garis pangkal air terendah.

Melihat konvensi yang telah dipaparkan di atas, wajarlah bila Indonesia memprotes klaim Malaysia atas blok Ambalat. Semenjak klaim tersebut tersebar di media massa, berbagai gerakan dimunculkan oleh kedua pihak, sejak pasca dimenangkan nya perkara Sipadan-Ligitan, Malaysia memperkokoh bidang

militernya, melihat aksi Malaysia tersebut maka Indonesia pun perlu mengadakan peningkatan di bidang militer nya terutama pada angkatan laut karena banyaknya isu perbatasan dengan negara Malaysia ada di zona kelautan

1.2. Perumusan Masalah

Strategi militer berupa pembinaan, pengembangan, penggelaran dan penggunaan seluruh kekuatan dan kemampuan militer untuk mendukung strategi pertahanan dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara kepentingan nasional. Pembinaan dan penggunaan militer diarahkan pada keterpaduan tiga angkatan (Darat, Laut, dan Udara) tanpa meninggalkan ciri khas angkatan, baik dalam operasi gabungan maupun operasi angkatan masing-masing. Tujuan dari negara yang berdaulat adalah untuk mempertahankan diri dan melindungi kepentingan nasional nya. Maka peningkatan kekuatan militer yang dilakukan oleh suatu negara adalah wajar dan tanggung jawab utama dari suatu negara.²

Kebijakan suatu negara untuk melakukan modernisasi dalam bidang militer, dapat dianggap sebagai suatu ancaman bagi negara lain, gejala ini disebut *security dilemma*.³ Apalagi pada dua negara berbatasan yang rentan timbulnya suatu konflik karena memiliki banyak daerah perbatasan.

Kekuatan militer Malaysia bertumpu pada Angkatan Tentera Malaysia (ATM) yang meliputi tiga cabang militer utama yaitu Tentera Darat Malaysia (TDM), Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), dan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM). Malaysia merupakan anggota *Five Power Defense Agreement* (FPDA), kelompok tersebut beranggotakan Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Jika Malaysia diserang, anggota FPDA lainnya bakal membantu. Pemerintah Malaysia memandang penting aspek penguasaan wilayah dalam rangka melindungi kedaulatan negara atas wilayahnya sampai ke garis perbatasan pulau terluar. Sebagaimana telah tercatat dalam sejarah, kemenangan Malaysia atas Indonesia dalam kasus Pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2002 membuktikan bahwa penguasaan secara fisik terhadap wilayah yang

² Barry Buzan, *People, State and Fear, An Introduction to Strategic Studies : Military Technology and International Relations*, (London:MacMilan Press, 1987), hlm. 328.

³ Robert Jervis, *Cooperation under the Security Dillema*, (World Politics, No.2 Januari 1978), hlm. 167.

disengketakan merupakan faktor penting untuk memenangkan kasus tersebut secara hukum di Mahkamah Internasional.

Perkembangan militer Tentera Laut Diraja Malaysia kini patut diperhitungkan karena ia telah berubah sebagai satu kekuatan bahari militer yang maju. Memiliki belasan kapal perang berteknologi canggih, Malaysia ikut mengendalikan lalu lintas kapal di Selat Malaka dan sebagian Selat Singapura yang merupakan salah satu jalur niaga bahari yang cukup penting. Wilayah operasi TLDM kini tak hanya di sekitar semenanjung Malaya, namun telah merambah ke kawasan utara Pulau Kalimantan dimana terdapat banyak perbatasan dengan Indonesia. Perkembangan yang pesat dimulai pada awal tahun 2000 dimana selama dalam kurun waktu 10 tahun, total pengembangan kekuatan militer laut adalah tiga kali lipat daripada dekade sebelumnya, membeli Meko-100 buatan Jerman. Bergabungnya beberapa kapal perang tipe Meko-100 buatan Jerman ini yang juga telah mampu dibangun digalangan kapal dalam negeri membuat TLDM selangkah lebih maju dalam pengembangan kapal perangnya. Dan dengan adanya kekuatan kapal selam kelas Scorpene asal DCNS-Perancis, membuat TLDM semakin berniat mendominasi dinamika kehidupan perairan di sekitar Selat Malaka dan Laut China Selatan.⁴

Untuk menyangga kemampuan operasinya, TLDM menambah jumlah armada frigat kelas Lekiu sebanyak dua kapal. Pada keduanya dipasang teknologi perang bahari terkini yang ada di kapal perusak kelas T45. Selain itu, TLDM merencanakan pembelian satu kapal selam Diesel elektrik ditambah 27 kapal patroli generasi baru (New Generation Patrol Vessel – NGPV) serta beberapa pesawat patroli bahari. Dua di antara ke 27 NGPV telah diterima TLDM pada pertengahan 2006. Sementara dua kapal sekelas lainnya diharapkan dapat diterima TLDM akhir 2009. Tentera Laut Diraja Malaysia berharap pada 2020 mereka telah memiliki enam kapal untuk tiap jenis kapal kombatan.⁵

⁴ <http://www.securemalaysia.com/2009/01/kd-rajawali-rmns-home-of-naval-air.html>, diakses pada 12 November 2011, pukul 16.30 WIB.

⁵ <http://www.globalsecurity.org/military/world/malaysia/navy.htm>, diakses pada 6 Desember 2011, pukul 22.15 WIB.

Angkatan Udara Malaysia (Tentera Udara Diraja Malaysia) bertanggung jawab atas operasi dan pertahanan wilayah udara Malaysia. Saat ini TUDM menggabungkan beberapa jenis pesawat udara modern buatan Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia. Pada mulanya TUDM membeli peralatan militernya dari Amerika Serikat namun dengan adanya pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat atas sejumlah teknologi baru pada suatu wilayah regional, membuat Malaysia mempertimbangkan pembelian peralatan militer ke Rusia dan sumber-sumber non-tradisional lainnya.⁶ Pengembangan pembelian senjata militer pun mulai meningkat setelah tahun 2000 diantaranya pada tahun 2003 ditandatangani perjanjian pembelian 18 unit pesawat tempur taktis Sukhoi Su-30MKM dengan jadwal pengiriman mulai tahun 2007 untuk memenuhi kebutuhan peran satuan pesawat tempur multi peran atau *ulti-role combat aircraft* (MRCA).

Pada 8 Desember 2006 Malaysia telah menandatangani kontrak pemesanan 8 unit pesawat Airbus A400M dan pada akhir tahun 2006 Pemerintah Malaysia menandatangani kontrak pembelian 8 unit pesawat Aermacchi MB339AM untuk menambah pesawat sejenis yang telah ada sebelumnya. Pada awal Juli 2008 tender pengadaan helikopter pengganti Sikorsky S-61A-4 akan dimulai digantikan dengan helikopter yang lebih canggih. Pada Juni 2009, pihak TUDM bahwa akan mengganti pesawat tempur MiG-29 dengan pesawat tempur yang memiliki kemampuan manuver yang lebih lincah dan kemampuan menyerang lawan yang lebih baik daripada pesawat sebelumnya. Pada Pameran Pertahanan Asia ke-12 tahun 2010, telah dilakukan penandatanganan kontrak perjanjian pembelian 12 unit helikopter Eurocopter EC725 oleh TUDM untuk keperluan operasi militer.⁷

Angkatan Darat Malaysia atau disebut Tentera Darat Malaysia (TDM) adalah angkatan militer terbesar di dalam Angkatan Darat Malaysia. Angkatan Darat Malaysia mempunyai 17 rejimen dan kor dan yang disiapkan untuk menjadi pasukan tempur, Angkatan Darat Malaysia dipersenjatai dengan senjata-senjata terkini yang diperoleh dari beberapa negara. Anggaran yang sangat besar

⁶ <http://www.milaviapress.com/orbat/malaysia/index.php>, diakses pada 6 Desember 2011, pukul 15:30 WIB.

⁷ <http://www.defenseworld.net/go/defensenews.jsp?id=4404>, diakses pada 12 Januari 2012, pukul 22:30 WIB.

dikeluarkan untuk modernisasi sistem militer angkatan darat nya. TDM kini mempunyai anggota tetap sebanyak 100.000 orang dan pasukan simpanan Angkatan Darat sebanyak 50.000 orang. Pada saat ini TDM mempunyai 4 Divisi Infantri Tempur di bawah pemerintahan Markas Medan Tentera Darat. Formasi Tentera Darat disusun menjadi pasukan seperti berikut. Unit TDM mempunyai kekuatan berikut, 26 Batalion Infantri Standard, 4 Batalion Infantri Ringan, 3 Batalion Infantri Para, 4 Batalion Infantri Mekanis, 1 Batalion Infantri Bantuan, 5 Rejimen Armor (4 Rejimen IFV, 1 Rejimen Kereta Kebal CVR(T) dan 1 Skuadron Para), 16 Rejimen Artileri (4 Rejimen Pertahanan Udara, 2 Rejimen MLRS, 1 Rejimen Artileri Para dan 9 Rejimen Artileri Medan), 3 Rejimen Gerak Khas, Batalion Serangan Udara (Air Assault) dalam perancangan penubuhan.⁸

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Secara tradisional TNI adalah salah satu kekuatan Nasional negara yang disiapkan untuk menghadapi ancaman berbentuk kekuatan militer. Dalam Tugasnya TNI melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP adalah operasi militer dalam menghadapi kekuatan militer negara lawan, berupa agresi, invasi maupun infiltrasi. Dalam menjalankan perannya sebagai alat pertahanan, TNI menjalankan fungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap ancaman yang ada. Berbeda dengan regulasi yang lahir sebelum reformasi, fungsi TNI dalam menangkal dan menindak kini dibatasi hanya pada setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Fungsi TNI sebagai salah satu bagian dari keseluruhan sistem keamanan nasional, namun tetap merupakan kekuatan inti dalam sistem pertahanan nasional.

TNI Angkatan Laut (TNI-AL) adalah tentara nasional yang bertanggung jawab memelihara kemandirian dan ketahanan Indonesia khususnya di bagian laut/perairan yang menjaganya dengan sistem pangkalan-pangkalan utama dan Pangkalan Angkatan Laut. Nama kapal yang dimiliki TNI-AL selalu dimulai dengan KRI, singkatan dari Kapal Perang Republik Indonesia. Selain itu juga ada

⁸ <http://army.mod.gov.my/>, diakses pada 10 Januari 2012, pukul 21:30 WIB.

kapal yang diawali dengan KAL yaitu singkatan dari Kapal Angkatan Laut. Setiap kapal dipersenjatai dengan salah satu atau lebih dari berbagai macam persenjataan yang tersedia menurut kelasnya, mulai dari senapan mesin 12,7mm, kanon, meriam hingga peluru kendali. Saat ini TNI AL memiliki sekitar 68800 prajurit, termasuk di dalamnya 18500 personel marinir dan 1090 penerbangan/personel udara AL. Kekuatan TNI AL secara garis besar sebagai berikut, Kapal Republik Indonesia (KRI) berjumlah 116 kapal, 8 KRI dalam status konservasi, proses penghapusan, dan cadangan. Sisanya, 108 KRI, dibagi menjadi tiga kelompok kekuatan. Kapal Angkatan Laut (KAL) yaitu kapal patroli yang berfungsi untuk mendukung Pangkalan TNI AL dalam melaksanakan tugas-tugas patroli keamanan laut dan tugas-tugas dukungan lainnya. Pesawat udara berjumlah 61 unit, terdiri dari 48 sayap tetap dan 13 sayap putar. Peralatan tempur korps marinir sejumlah 417 kendaraan tempur.⁹

Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU) adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewajiban melaksanakan tugas, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. TNI-AU memiliki anggota sebanyak 18.000 personel aktif, dan memiliki kelengkapan 116 Pesawat Tempur, diantaranya Sukhoi Su27/30SK (14 pesawat) dimana pesawat Sukhoi Su 27/30 SK, adalah pesawat yang paling terbaru dan tercanggih yang dimiliki Indonesia yang dibeli dari Rusia, F16 Falcon (10 Pesawat), F5 Tiger (10 Pesawat), Ov10 Bronco (6 Pesawat), Hawk 200 (40 Pesawat), Hawk 100 (16 Pesawat), Hawk Mk53 (15 Pesawat), B707 AEW (3 Pesawat), C130 Hercules (30 Pesawat), nc212m-200 (20 Pesawat), CN 235-100 (30 Pesawat), Helikopter PUMA (20 buah), Super Puma (30 buah), dan beberapa pesawat pengintai serta artileri pertahanan udara.¹⁰

Indonesia telah mengalokasikan anggaran cukup besar bagi TNI Angkatan Darat (TNI-AD) untuk melaksanakan modernisasi alat utama sistem senjata, pembangunan TNI AD diarahkan kepada terwujudnya kekuatan maksimum

⁹ <http://www.dutchaviationsupport.com/00-HTMS/Indon-Airforce%20-3-FNaval.htm>, diakses pada 16 Januari 2012, pukul 22:30 WIB.

¹⁰ <http://www.tni-au.mil.id/content/profil-satuan-0>, diakses pada 16 Januari 2012, pukul 23:00 WIB.

dengan meningkatkan kesiapan operasional satuan, Penguasaan alutsista harus mempunyai kesamaan teknologi dengan AD negara tetangga. Kekuatan Personil TNI-AD memiliki 350.000 Prajurit aktif, 80.000 prajurit cadangan dan dilengkapi oleh 460 Tank berat, 1300 tank ringan, 190 Sp Gun, 1500 kendaraan Apc, 200 artileri Infanteri TNI-AD dikenal di dunia dan merupakan salah satu tentara yang tertangguh di medan pertempuran, terdiri atas Kopassus, 5000 personil, Raider 10 batalyon, Sat-81 Gultor (Pasukan elite Anti teror) Bagian dari pasukan Kopassus yang secara khusus menangani anti teror, kostrad, 40.000 personil, 2 divisi, memiliki tugas mensupervisi kesiapan operasional semua komando dan melaksanakan operasi pertahanan dan keamanan nasional berdasarkan perintah dari panglima TNI. Peralatan yang digunakan lebih lengkap dibandingkan dengan infanteri biasa, setiap divisi memiliki beberapa brigade lintas udara dan infanteri. Disamping itu, Kostrad sendiri memiliki brigade lintas udara yang terpisah, satu brigade kavaleri, dua resimen artileri, dan beberapa unit bantuan tempur.

Konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia menimbulkan ketegangan hubungan bilateral antara kedua negara, sikap malaysia yang terus menerus meng-klaim beberapa wilayah Indonesia di perbatasan, dan bersikap seolah militer indonesia di daerah perbatasan itu lemah. Dari segi kekuatan militer antara Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda, dimana Indonesia lebih mendominasi pada banyaknya jumlah personel dan infanteri, namun malaysia lebih mendominasi pada peningkatan pembelian alat utama sistem senjata yang lebih berteknologi dan canggih.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana kekuatan militer Malaysia mempengaruhi perkembangan militer Indonesia sehubungan dengan adanya konflik Ambalat, dan bagaimana dinamika persenjataan diantara negara tersebut dilihat dari periode tahun 2006 sampai 2010?

1.4. Tujuan Penelitian

Kawasan perbatasan di Indonesia dan Malaysia memiliki kecenderungan timbulnya konflik mengenai garis perbatasan yang jelas di antara keduanya. Kebijakan suatu negara untuk melakukan modernisasi dalam bidang militer, dapat dianggap sebagai suatu ancaman bagi negara lain, apalagi pada dua negara berbatasan yang rentan timbulnya suatu konflik karena memiliki banyak daerah perbatasan. Ini terbukti dengan terjadinya konflik perebutan pulau Sipadan dan Ligitan, perebutan blok Ambalat, perebutan wilayah Camar Bulan, perebutan kebudayaan, dan masalah sosial seperti permasalahan TKI. Kebangkitan kekuatan militer Malaysia yang didukung dengan kebangkitan kekuatan ekonominya selalu menjadi polemik di kawasan regional ini. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah meneliti faktor apa saja yang menyebabkan Malaysia untuk mengembangkan kapabilitas militernya. Penulis juga ingin meneliti bagaimana inovasi teknologi militer Malaysia pada masa sekarang. Selain itu dengan adanya peningkatan kekuatan militer Malaysia, bagaimana reaksi Indonesia atas peningkatan kapabilitas militer Malaysia serta menganalisis kekuatan militer dari kedua belah pihak negara tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang konflik perbatasan yang terjadi diantara Indonesia dan Malaysia dan memperdalam pemahaman peneliti terhadap faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia pada suatu masa tertentu secara cepat mengembangkan ketahanan militernya dan reaksi negara Indonesia atas peningkatan kapabilitas militer Malaysia. Serta menganalisa seberapa besar ketahanan militer kedua negara tersebut. Maka penulis menjabarkan tujuan penelitiannya sebagai berikut,

1. Menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang konflik Amabalat serta aksi dan reaksi Indonesia-Malaysia menanggapi konflik ini.
2. Menjelaskan kekuatan militer yang dimiliki oleh Malaysia dan Indonesia.
3. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan militer Indonesia yang dimulai pada tahun 2006.
4. Menganalisis arah / kecenderungan dinamika persenjataan diantara kedua negara.

1.5. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan dinamika persenjataan antara Malaysia dan Indonesia terkait dengan konflik Ambalat, diantaranya:

1. Signifikansi Teoritis : Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian ilmu hubungan internasional sebagai bahan pertimbangan atau referensi di dalam mempelajari, membahas, dan memahami mengenai materi pembahasan yang sama. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama di bidang dinamika persenjataan serta dapat menjadi referensi untuk penelitian- penelitian selanjutnya.
2. Signifikansi Praktis : Menambah pengetahuan dengan melihat lebih dalam mengenai reaksi Indonesia melakukan peningkatan kapabilitas militer nya sehubungan dengan adanya konflik Ambalat.

1.6. Tinjauan Kepustakaan

Mengenai reaksi peningkatan persenjataan Indonesia dilihat dari konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji hal ini lebih dalam dan ingin mengetahui kapabilitas militer yang dimiliki oleh kedua negara serta ingin menganalisis apakah konflik ambalat merupakan faktor dominan dari peningkatan militer Indonesia yang dimulai pada tahun 2006. Oleh karena itu penulis membaca dan membandingkan dengan karya ilmiah yang sudah terbit sebelumnya, diantaranya :

1. Lestari, Annisa (2010) *Strategi Pertahanan Indonesia di Selat Malaka: Tawaran Proliferasi Security Initiative Periode 2006-2008*. Tesis, Universitas Indonesia.

Pada karya ilmiah ini menjabarkan peningkatan kapabilitas militer dari tahun 2006 sampai 2008 yang menurutnya hampir tidak adanya peningkatan kapabilitas militer Indonesia pada tahun 2006 sampai 2008. Ketertarikan penulis mengkaji karya ilmiah ini karena penulis memiliki pendapat yang berbeda karena menurut penulis peningkatan kapabilitas militer Indonesia itu bermula pada tahun 2006 walaupun memang benar yang dikatakan dalam karya ilmiah ini bahwa peningkatan tidak terlalu signifikan karena peningkatan

kapabilitas militer itu memakan waktu dan sulit jika dalam rentang waktu yang sempit menunjukkan peningkatan yang sangat besar.

2. Priswari, Inti (2010) *Analisis sengketa perbatasan wilayah kedaulatan blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, serta upaya penyelesaiannya*. Skripsi, Universitas Diponegoro.

Pada karya ilmiah ini menjelaskan dengan rinci sengketa perbatasan wilayah kedaulatan blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, dan menganalisis dari mulai sengketa hingga mencari solusi upaya penyelesaiannya. Ketertarikan penulis mengkaji dan membandingkan karya ilmiah ini karena tidak disebutkan bahwa konflik ambalat merupakan faktor penting dari terjadinya peningkatan kapabilitas militer Indonesia, dan cenderung memperlihatkan kelemahan kekuatan militer Indonesia pada saat konflik ambalat itu berlangsung yang menurut penulis sesungguhnya peningkatan militer Indonesia itu lahir karena adanya konflik Ambalat.

1.7. Kerangka Konsep

Dalam lingkungan yang anarkis ini negara-negara berusaha untuk bergantung pada dirinya sendiri. Begitu pula dalam soal keamanan. Ia berusaha untuk mencapai keamanan melalui usahanya sendiri. Salah satu usaha untuk mencapai keamanan ini adalah dengan berusaha meningkatkan *national power* yaitu salah satu dan yang paling sering dilakukan adalah dengan meningkatkan *power militer*. *Power militer* akan sangat berkaitan erat dengan masalah senjata (*weapon, arms, arsenal*), maupun strategi. Jika ada usaha peningkatan *power militer* maka kedua aspek yang telah disebutkan di atas juga akan ditingkatkan. Peningkatan *power* senjata akan lebih mudah terlihat dan dihitung jika dibandingkan dengan peningkatan dalam strategi. Peningkatan *power* militer melalui senjata tidak hanya dikaitkan dengan jumlah senjata yang dimiliki tetapi juga menyangkut teknologi senjata tersebut. Teknologi senjata menurut penulis akan berkaitan dengan masalah jangkauan senjata, daya hancur senjata, dan keefektifan senjata. Tetapi dalam peningkatan *power* militer ada beberapa masalah yang mengganjal dan menjadi hambatan. Peningkatan terhadap militer suatu negara akan menyebabkan negara lain merasa terancam dan merasa tidak

aman yang pada gilirannya akan mendorong negara tersebut untuk meningkatkan kekuatan militernya sendiri. Hal seperti ini terjadi terus menerus. Hal inilah yang disebut dengan *security dilemma*. *Security dilemma* bukan satu-satunya masalah yang diakibatkan oleh peningkatan kekuatan militer suatu negara melalui modernisasi kapabilitas militer.

Variabel dependen dalam penulisan ini adalah Indonesia, karena variabel Indonesia yang bergantung pada variabel Malaysia, dimaksudkan bahwa dengan adanya peningkatan kapabilitas militer pada Malaysia mempengaruhi Indonesia sehingga Indonesia yang merespon adanya sesuatu pada variabel yang independen dalam hal ini Malaysia. Gilpin mengatakan bahwa inovasi militer merupakan aspek penting dalam stabilitas. Menurut Gilpin jika inovasi militer lebih ke pada strategi ofensif maka ini akan menyebabkan negara yang melakukan strategi ofensif ini menjadi dominan di kawasan dan akan merubah semua sistem di kawasan regional tersebut.¹¹ Dalam setiap sistem internasional selalu ada peristiwa kemajuan dalam bidang politik, ekonomi dan teknologi. Dari tiga bidang tersebut menunjukkan pertumbuhan kekuatan suatu negara dalam sistem internasional, tetapi tidak semua negara memiliki jangka waktu yang sama untuk pertumbuhan dari tiga bidang tersebut sehingga ada negara yang memiliki perkembangan yang pesat dan ada negara yang perkembangannya lambat.

Penulis menggunakan teori dari Barry Buzan, *The Arms Dynamic in World Politics* (1998). Dinamika persenjataan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep perlombaan senjata. Dinamika persenjataan lebih mentitik beratkan kepada situasi yang lebih normal atau stabil, dimana dalam hal ini tidak perlu ada perlombaan senjata antar negara. Menurut Buzan perlu adanya bagian yang dapat menjelaskan kondisi normal dalam hubungan militer. Konsep Dinamika Persenjataan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dalam hubungan militer dalam kondisi normal maupun dalam kondisi perlombaan senjata. Maka Dinamika Persenjataan menurut Buzan merupakan literatur yang menjelaskan bahwa adanya tekanan-tekanan yang memaksa negara untuk mempunyai kekuatan persenjataan dan merubah secara kuantitas dan

¹¹ Robert Gilpin, *War and Change in World Politics*, Australia, (Cambridge University Press 1981) hlm. 60.

kualitas yang mereka inginkan. Dinamika persenjataan tidak hanya digunakan secara global, tetapi dapat digunakan dalam suatu negara atau kawasan regional. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Malaysia. Dalam peningkatan kapabilitas militer merupakan fenomena yang sangat signifikan, Perlombaan senjata berbeda dengan dinamika persenjataan, ini dikarenakan perlombaan senjata (*arms race*) merupakan ekspresi dari permusuhan politik antar negara yang cenderung mengakibatkan perang. Sehingga karakter hubungan antar negara dapat dilihat apakah fenomena ini merupakan perlombaan senjata yang akan membawa situasi yang lebih rumit yaitu perang atau ini merupakan dinamika persenjataan yang lebih tepat menggunakan kata kompetisi persenjataan yang lebih bersifat damai yang bertujuan untuk mempertahankan wilayah negara nya.

Menurut teori dinamika persenjataan dari Barry Buzan dan Eric Herring, aksi-reaksi akan terjadi jika satu negara meningkatkan kemampuan pertahanan dan persenjataannya. Hal ini turut menjelaskan soal perkembangan persenjataan dari zaman dahulu hingga ke zaman modern. Fenomena yang menarik adalah bahwa senjata pada awalnya hanyalah alat sederhana sebagai buatan tangan manusia hingga akhirnya menjadi senjata berbasis teknologi modern dan tak mudah dimiliki oleh semua orang.

Menurut Buzan, dinamika berupa pembangunan persenjataan juga disebut sebagai self-stimulating, bahwa persaingan militer antar negara di mana usaha meningkatkan kemampuan pertahanan salah satu pihak akan menimbulkan ancaman baru bagi pihak lain. Buzan juga mencatat bahwa peningkatan kemampuan sistem persenjataan suatu negara tidak selamanya berlangsung dalam suatu proses kompetisi yang ketat dan tidak selalu dimaksudkan untuk mencapai kemenangan. Tetapi, misalnya bisa saja ditujukan untuk menjadi simbol superioritas suatu negara. Tentunya, dengan modal kekuatan militer dan senjata, sebuah negara mampu menggertak negara lain, bahkan menggerus dominasi negara lain. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh Indonesia setelah kalah dalam kasus Sipadan-Ligitan, tidak ingin dominasi nya diganggu oleh Malaysia pada blok Ambalat.

Dinamika persenjataan dapat berlangsung mengikuti beberapa pola. Salah satunya adalah model aksi reaksi, yang sangat relevan dengan perspektif realis

hingga saat ini. Model ini beranggapan bahwa negara-negara memperkuat sistem persenjataan mereka karena anggapan adanya ancaman dari luar. Ancaman luar membuat aktor-aktor negara yang rasional akan selalu berupaya meningkatkan pertahanannya agar terwujud kata aman. Selain itu, dalam dinamika persenjataan juga dikenal adanya arms build-up yang meliputi peningkatan belanja militer, anggaran militer, personil militer, dan modernisasi sistem persenjataan.

Dari uraian latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka hipotesa sementara penulis adalah sebagai berikut: Kapabilitas militer Malaysia memicu reaksi peningkatan kapabilitas militer dari Indonesia sehubungan adanya konflik Ambalat di kedua belah pihak. Hipotesa ini lahir dari data-data yang sementara diperoleh oleh penulis dengan melihat perkembangan hubungan regional antara Indonesia dan Malaysia dari waktu ke waktu.

Dengan adanya peningkatan kapabilitas militer Malaysia yang dimulai pada tahun 2000-an maka membuat Indonesia sebagai negara tetangga nya juga melakukan peningkatan kapabilitas militernya maka *Action-Reaction model* sangat tepat menggambarkan fenomena tersebut, apabila peningkatan kapabilitas militer Malaysia bersifat ofensif ini akan mengarah pada suasana perlombaan senjata (*arms race*) dan dapat menimbulkan situasi yang bersifat kompetisi yang dapat menyebabkan terjadinya suatu konflik terbuka, melihat juga latar belakang konflik perbatasan pada beberapa tahun terakhir ini, peningkatan kapabilitas militer diantara Indonesia dan Malaysia bersifat ofensif dan ada di antara kedua negara yang melakukan reaksi yang berlebihan maka kemungkinan akan terjadi suatu konflik terbuka antara kedua negara tersebut. Sebaliknya, apabila dengan adanya peningkatan kapabilitas militer diantara Indonesia dan Malaysia bersifat defensif dan tidak ada di antara kedua negara yang melakukan reaksi yang berlebihan maka tidak akan adanya konflik terbuka antara Indonesia dan Malaysia, namun hal ini lebih mengacu kepada modernisasi kapabilitas militer (*military modernization*) yang lahir dari *security dilemma* ataupun dari faktor internal negara tersebut.

Dalam konteks ini, negara dapat melakukan atau mencapai keamanan dengan dua cara, yaitu upaya internal, yaitu meningkatkan kapabilitas ekonomi, meningkatkan kekuatan militer, dan mengembangkan strategi dan upaya eksternal, yaitu memperkuat dan memperluas aliansi atau melemahkan dan meminimalisir kekuatan lawan, sebagai bentuk dari maksimalisasi kekuatan atau strategi untuk mencapai makna *security*.¹² Namun pencapaian keamanan tersebut terkadang menimbulkan dilema keamanan, karena peningkatan kekuatan militer satu negara akan membuat negara lain merasa tidak aman dan kemudian turut meningkatkan kekuatannya.

Salah satu bentuk manifestasi dilema keamanan adalah terjadinya dinamika persenjataan. Satu negara yang berusaha melakukan modernisasi ataupun pembangunan persenjataan akan membuat negara lain merasa terancam sehingga pada akhirnya negara tersebut akan turut melakukan pembangunan persenjataan. Pembangunan, pemeliharaan, kompetisi/pembangunan, dan perlombaan senjata adalah manifestasi dari dinamika persenjataan yang masing-masing istilah tersebut memiliki karakter. Pada dasar konsep ini, hal yang perlu diklarifikasi bukan hanya model yang menjelaskan perlombaan senjata, namun model yang dapat menjelaskan dinamika persenjataan secara keseluruhan yaitu model aksi-reaksi dimana kita dapat melihat dinamika persenjataan ini mengacu pada perlombaan senjata yang bersifat ofensif atau peningkatan kapabilitas militer diantara kedua negara yang bersifat defensif dan memunculkan adanya modernisasi militer di negara tersebut.

Modernisasi kapabilitas militer merupakan sub bidang kajian penting dalam studi ilmu hubungan internasional, dan terutama dalam studi pengkajian strategis dan keamanan karena ia menjelaskan apa, mengapa dan bagaimana usaha salah satu negara untuk meningkatkan kapabilitas nasionalnya melalui peningkatan kemampuan dan keunggulan militer sehingga dapat mempengaruhi hubungannya dengan negara lain. Namun demikian, sulit membedakan antara apakah peningkatan kemampuan persenjataan suatu negara merupakan bagian dari perlombaan senjata dengan negara lain atau sekedar usaha untuk mempertahankan

¹² John Glenn, Darryl Howlett, Stuart Poore (eds), *Neorealism Versus Strategic Culture*, (USA: Ashgate Publishing Limited, 2004), hlm. 5.

diri atau bahkan hanya untuk memelihara status quo hubungan keamanan dalam suatu kawasan tertentu. Pesatnya perkembangan teknologi dan penemuan senjata-senjata baru telah memainkan peranan penting dalam aktivitas hubungan internasional terutama karena ia menentukan arah perlombaan senjata dan dengan demikian mempertanyakansampai seberapa jauh peningkatan kemampuan pertahanan suatu negara benar-benar mampu meningkatkan ketahanan nasionalnya. Fenomena modernisasi kekuatan militer terkait erat dengan masalah keamanan nasional suatu negara. Suatu negara hanya dapat merasa aman apabila dirinya kuat, dan untuk menjamin perlindungan diri karena itulah kemudian sebagian besar negara merasa perlu untuk mendapatkan kekuatan militer sebanyak yang bisa dijangkau oleh sumberdaya nya.¹³

Perlombaan persenjataan menurut definisinya berbeda dengan pengertian pembangunan persenjataan / *arms build-up*, dimana pembangunan persenjataan hanya merujuk pada indikator-indikator utama militer seperti pengeluaran pertahanan dan kepemilikan persenjataan. Meningkatnya anggaran belanja pertahanan, angkatan bersenjata yang lebih modern, akuisisi senjata yang lebih meningkat dan produksi persenjataan disuatu kawasan tidak harus mengidentifikasikan adanya perlombaan senjata apabila tidak didorong oleh interaksi atau dinamika kompetisi di antara mereka yang terlibat. Pembangunan senjata bisa disebabkan oleh faktor-faktor di luar antar-negara, seperti faktor domestik dan sebagainya. Menurut Colin Gray mencatat empat kondisi dasar untuk menunjukkan adanya perlombaan senjata:

- (1) Harus ada dua atau lebih negara yang bertikai;
- (2) Negara yang terlibat perlombaan senjata harus menyusun kekuatan bersenjata dengan perhatian terhadap efektifitas angkatan bersenjata dalam menghadapi, bertempur atau sebagai penangkal terhadap peserta lomba senjata;
- (3) Mereka harus berkompetisi dalam kuantitas (SDM, senjata) dan/atau kualitas (SDM, senjata, organisasi, doktrin);
- (4) Harus ada peningkatan cepat dalam kuantitas dan/atau peningkatan dalam kualitas.¹⁴

¹³ Michael Sheehan, *The Arms Race*, (Oxford: Martin Robertson, 1983), hlm. 10.

¹⁴ Colin S. Gray, "The Arms Race Phenomenon", *World Politics*, (Vol. 24, Abc's Press 1972), hlm. 41.

Dari beberapa definisi diatas, dapat kita rangkum adanya beberapa unsur pokok dalam perlombaan persenjataan, yaitu adanya pihak yang berlawanan, adanya usaha untuk mencari keunggulan militer, terjadi pada masa damai/tidak perang, proses terjadi secara kompetitif, timbal balik, dan eskalatif.

Berbeda dengan asumsi teoritis bahwa perlombaan senjata selalu melibatkan beberapa unsur; pertama, kompetisi untuk memperoleh kekuatan militer dan kedua, kemenangan adalah tujuan dalam lomba itu. Dalam prakteknya, dan bahkan pada umumnya literatur yang ada tidak selalu mencerminkan semua unsur itu secara seimbang. Buzan selain mencatat bahwa peningkatan kemampuan sistem persenjataan suatu negara tidak selamanya berlangsung dalam suatu proses kompetisi yang ketat juga menekankan betapa semua itu tidak dimaksud untuk mencapai kemenangan yang menentukan. Oleh sebab itu, dalam menggambarkan realitas yang ada istilah yang lebih tepat, yaitu dinamika persenjataan / *arms dynamic* sebagai model alternatif. Konsep ini dapat menjelaskan segala sebab yang menjadikan suatu negara meningkatkan kemampuan persenjataan melalui penyesuaian kuantitas maupun kualitas sistem yang telah dimilikinya.¹⁵

Pertama adalah dinamika simetris dimana kekuatan antara pihak-pihak yang berlomba dapat dibandingkan secara langsung karena memang sistem persenjataan itu akan digunakan untuk saling berperang. Konsekuensi pokok dari penggelaran senjata simetris ini adalah kecenderungannya untuk memperbesar target ratio dan kemampuan serangan pertama. Kedua yaitu dinamika asimetris, dimana perkembangan kuantitatif dan kualitatif sistem persenjataan yang tidak serupa dan tidak seimbang. Gejala ini pada umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, sisi pertahanan dari struktur penangkalan. Dalam perang konvensional ia dimaksudkan untuk menyerap kemampuan serangan lawan, sedangkan dalam perang nuklir ia dimaksudkan untuk meningkatkan kadar dan tingkat ketidakpastian yang akan diperoleh lawan dengan melakukan serangan pertama. Ketiga adalah kombinasi antara dinamika simetris dan asimetris, dalam dinamika gabungan ini dapat digambarkan bahwa kemampuan persenjataan yang dimiliki, tergantung konsteks konfigurasi

¹⁵ Barry Buzan, *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*, (London: Macmillan for the International Institute for Strategic Studies, 1987), hlm. 69.

keamanan yang dihadapi oleh suatu negara atau kelompok negara. Adanya pergeseran konfigurasi, misalnya dari situasi bermusuhan atau damai dan sebaliknya, akan menentukan terjadinya dinamika simetris atau asimetris. Konsepsi dinamika persenjataan ini juga sejalan dengan pendapat Buzan, bahwa sebenarnya secara spesifik fenomena perlombaan senjata hanyalah salah satu bagian dari dinamika persenjataan. Bagian lainnya adalah pemeliharaan senjata dan pembangunan persenjataan.

Tabel 1.1¹⁶
Dinamika Persenjataan

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	KATEGORI
DINAMIKA PERSENJATAAN	MODEL	<i>MAGNITUDE</i>	<i>Arms Reduction</i>
		AKSI	<i>Arms maintenance</i>
	REAKSI		<i>Military Modernization</i>
	<i>AWARENESS</i>		<i>Build Up</i>
			<i>Arms Race</i>

¹⁶ Barry Buzan and Herring, *The Arms Dynamic in World Politics*, (London: Macmillan for the International Institute for Strategic Studies 1998), hlm. 79-100.

Kemudian menurut polanya, dinamika persenjataan dapat berlangsung secara mengikuti beberapa model, antara lain adalah model aksi-reaksi yang beranggapan bahwa negara-negara memperkuat sistem persenjataan mereka karena apa yang mereka anggap sebagai adanya persepsi ancaman dari luar. Dengan demikian model ini mengandalkan penalarannya pada anarki internasional dan ancaman luar. Asumsi pokok dalam model ini adalah rasionalitas para aktor dan bahwa aksi-reaksi merupakan dorongan yang deterministik pada dinamika persenjataan. Model ini membedakan antara perlombaan senjata dan peningkatan kemampuan senjata yang mungkin didorong oleh faktor non-interaktif. Formulasi ini lebih tepat menggambarkan sebab utama modernisasi kapabilitas militer.

Meskipun kombinasi dari pendekatan-pendekatan di atas mampu menjelaskan gejala dinamika persenjataan dengan perspektif yang lebih utuh, ia tidak dengansendirinya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang menentukan magnitude dan arah dari dinamika persenjataan, terutama di negara-negara berkembang yang memang seringkali lebih tepat disebut sebagai pembangunan persenjataan daripada perlombaan senjata. Pembangunan persenjataan disini diartikan sebagai peningkatan kemampuan militer suatu negara yang terlihat antara lain dari peningkatan belanja militer, peningkatan personel militer, dan modernisasi sistem persenjataan. Hal itu seringkali berkaitan dengan faktor-faktor lain dari persaingan antar negara. Dalam konteks kasus Ambalat, akuisisi senjata dapat terjadi karena beberapa elemen dalam perlombaan senjata. Faktor lain yang sering disebut sebagai memainkan peranan penting dalam akuisisi ini adalah kemampuan industri persenjataan lokal, pergeseran strategi dan doktrin pertahanan sebagai antisipasi dari pergeseran konfigurasi lingkungan internasional, peningkatan kemampuan ekonomi, dan kemudahan untuk memperoleh sistem persenjataan dari pasar internasional.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk melihat pola hubungan antarvariabel (dependen dan independen) atau interaksi sebab akibat antar variabel (dependen dan independen) yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian analisa yang bersifat eksplanatif sebagai bentuk refleksi terhadap kenyataan realitas sosial.¹⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian eksplanasi atau eksplanatif. Penelitian eksplanasi dapat dilakukan untuk menguji hipotesis dengan statistik inferensial (korelasi, regresi) untuk generalisasi data sampel pada populasi dengan menarik sampel random dari suatu populasi. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menganalisa, mengidentifikasi, dan menjelaskan faktor dan indikator yang terkait dengan pertanyaan penelitian, untuk menjelaskan logika empiris yang diuraikan secara deduktif-induktif.¹⁸

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis, Penelitian kualitatif dapat bertitik tolak dari suatu teori yang telah diakui kebenarannya dan dapat disusun pada waktu penelitian berlangsung berdasarkan data yang dikumpulkan. Pada tipe pertama, dikemukakan teori-teori yang sesuai dengan masalah penelitian, kemudian di lapangan dilakukan verifikasi terhadap teori yang ada, mana yang sesuai dan mana yang perlu diperbaiki atau bahkan ditolak. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah kajian kepustakaan dan dokumentasi. Tinjauan pustaka ini diharapkan dapat menemukan beberapa hal diantaranya studi dokumentasi, yaitu cara mencari data atau informasi dari buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, jurnal dan internet dan yang lainnya.¹⁹ Data yang diperoleh berupa analisa sekunder sekunder. Metode penulisan deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan memahami data-data yang ada dan kemudian dianalisa.

¹⁷ W. Lawrence Newman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Pearson Education, Inc (fifth edition), 2003, hlm. 23.

¹⁸ <http://www.linkpdf.com/download/dl/eksplanatif-doc>, diakses pada 12 Desember 2011, pukul 22.11 WIB.

¹⁹ Jusuf Soewandi, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: (Jurusan Sosiologi-FISIP-Universitas Nasional 2003), hlm. 131.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini akan dibagi dalam lima bab maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: Bab satu yaitu pendahuluan dimana bab ini memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya bab kedua mengenai konflik Ambalat dimana bab ini menjelaskan tentang hubungan regional Indonesia dan Malaysia yang tidak kondusif disebabkan adanya beberapa konflik perbatasan, yang dimulai dengan kasus Sipadan-Ligitan dan mencuatnya konflik Ambalat. Selanjutnya bab ketiga mengenai reaksi Indonesia dalam peningkatan kapabilitas militer Malaysia dimana bab ini akan membahas tentang reaksi yang dilakukan oleh Indonesia menyusul adanya konflik Ambalat dengan Malaysia dan reaksi atas meningkatnya ketahanan militer Malaysia. Selanjutnya bab keempat mengenai dinamika persenjataan militer Indonesia dan Malaysia dimana bab ini akan melihat seberapa besar kekuatan militer yang ada di kedua belah pihak, dan menganalisa apakah pengembangan kekuatan militer antara kedua negara ini akan menjadi suatu hal yang defensif atau ofensif. Selanjutnya bab kelima mengenai kesimpulan dan saran dimana pada bab yang terakhir penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penulisan tesis.

BAB II

PERSENGKETAAN AMBALAT ANTARA MALAYSIA DAN INDONESIA

Perbatasan merupakan suatu hal yang penting bagi negara karena mencerminkan kedaulatan suatu negara dan menjadi jaminan keutuhan wilayah. Dengan wilayah luas berkepulauan, Indonesia memiliki beberapa permasalahan perbatasan dengan Malaysia. Letak dua negara yang demikian berdekatan dan membagi rumpun budaya sama tidak menghalangi terjadinya konflik di antara keduanya. Blok Ambalat yang merupakan batas maritim Indonesia dan Malaysia termasuk salah satu yang paling tinggi permasalahannya jika dilihat dari kasus dan sengketa yang diberitakan media massa. Sengketa perbatasan blok Ambalat yang berada di Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia merupakan bukti belum tuntasnya batas maritim Indonesia. Permasalahan blok Ambalat ini menjadi salah satu konflik hubungan bilateral dan menyita perhatian yang cukup besar dari masyarakat Indonesia maupun Malaysia serta dengan adanya konflik Ambalat ini cenderung mengarah ke arah ofensif yang memungkinkan adanya perlombaan senjata diantara kedua negara.

2.1 Latar Belakang Konflik Ambalat antara Indonesia dan Malaysia

Konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia pada dekade tahun 2000-an dimulai dengan persengketaan mengenai wilayah sipadan dan ligitan (4 derajat 06 menit lintang utara - 118 derajat 37 menit bujur timur), dan Ligitan (4 derajat 09 menit lintang utara - 118 derajat 53 menit bujur timur) yang berakhir dengan kemenangan oleh pihak Malaysia melalui Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002. Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berdasarkan beberapa faktor diantaranya adalah bahwa pemerintah Inggris telah melakukan tindakan administratif secara nyata sebagai wujud kedaulatannya berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasai mercu suar sejak awal 1960. Mahkamah Internasional menolak argumentasi Indonesia yang berdasarkan pada Konvensi 1891 dimana yang dinilai hanya mengatur perbatasan darat dari kedua negara di

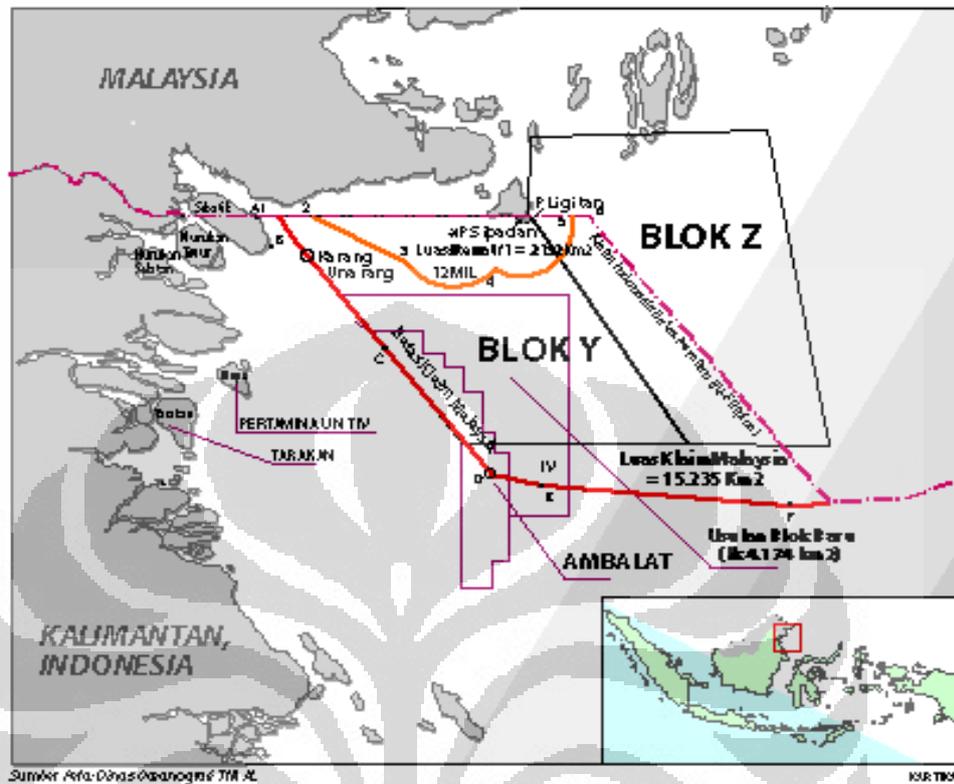
Universitas Indonesia

Kalimantan. Garis paralel 4 10' Lintang Utara ditafsirkan hanya menjorok ke laut sejauh 3 Mil dari titik pantai timur Pulau Sebatik sesuai ketentuan hukum laut Internasional pada waktu itu yang menetapkan laut wilayah sejauh 3 mil. Masalah Sipadan dan Ligitan ini dapat menjadi acuan yang berkaitan dengan konflik Ambalat.

Ambalat adalah blok laut luas mencakup 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makasar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. Kasus Ambalat merupakan permasalahan yang sangat krusial bagi kedua belah pihak baik bagi Indonesia maupun bagi Malaysia karena masalah Ambalat merupakan masalah kedaulatan dan konsitusi suatu negara, berarti jika suatu wilayah diambil oleh negara lain maka pemerintah yang bersangkutan akan mempertahankan kedaulatan wilayahnya dengan cara apapun baik secara kekerasan atau jalur militer maupun diplomasi untuk mempertahankan kedaulatannya serta ditambah dengan adanya kandungan sumber daya alam yang sangat melimpah di wilayah perairan Ambalat yaitu yang berupa minyak dan gas bumi. Blok Ambalat terindikasi mengandung cadangan minyak yang cukup besar, blok yang saat ini dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia ENI, ternyata mampu memproduksi sekitar 30.000-40.000 barel per hari.

Blok Ambalat merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pihak Malaysia pernah mengajukan permintaan agar dilakukan operasi bersama. Namun, permintaan itu ditolak oleh pihak Indonesia, karena jika hal itu dilakukan sebagai operasi bersama, berarti Indonesia mengakui adanya konflik. Pihak Indonesia tetap menginstruksikan kepada perusahaan minyak ENI agar terus melakukan kegiatan di wilayah tersebut. Pihak Indonesia juga meminta dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena wilayah Ambalat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambar 2.1
Blok Ambalat Secara Teritorial Maritim



Sumber : Peta Oseanografi TNI - AL

Malaysia telah mengklaim Blok Ambalat sejak tahun 1979 yang terletak di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan itu sebagai miliknya, lalu memasukkannya ke dalam peta wilayah negaranya. Dengan klaim tersebut, melalui Petronas, Malaysia kemudian memberikan konsesi minyak di Blok Ambalat kepada Shell, perusahaan minyak Inggris-Belanda. Sebelumnya, kegiatan penambangan migas di lokasi yang disengketakan itu dibagi oleh pemerintah Indonesia menjadi Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Blok Ambalat dikelola kontraktor migas ENI asal Italia sejak tahun 1999, sementara Blok East Ambalat dikelola Unocal Indonesia Ventures Ltd. asal Amerika sejak Desember 2004. Sebelumnya, Indonesia terlebih dahulu memberikan konsesi minyak di perairan tersebut kepada berbagai perusahaan minyak dunia, termasuk Shell, sejak tahun 1960-an; antara lain kepada Total Indonesia untuk Blok Bunyu sejak 1967 yang dilanjutkan dengan konsesi kepada Hadson Bunyu BV pada 1985. Konsesi lainnya diberikan kepada Beyond Petroleum (BP) untuk Blok

Universitas Indonesia

North East Kalimantan Offshore dan ENI Bukat Ltd. Italia untuk Blok Bukat pada 1988.

Pada tanggal 16 Februari 2005, Petronas Malaysia memberi hak konsesi minyak kepada perusahaan minyak Inggris, Shell, di Laut Sulawesi, perairan sebelah timur Pulau Kalimantan, hal ini merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Indonesia tidak membiarkan dan mengirimkan surat yang berisi protes kepada Malaysia karena dari berbagai peraturan internasional, salah satunya Konvensi Hukum Laut Internasional, perairan di timur Kalimantan Timur itu jelas merupakan wilayah kedaulatan RI. Menanggapi protes dari Indonesia, pemerintah Malaysia menyatakan bahwa konsesi tersebut berada dalam wilayah teritorial Malaysia. Dengan alasan pengukuran garis batas baru setelah Sipadan-Ligitan, wilayah tersebut secara resmi dinyatakan merupakan wilayah kedaulatan Malaysia. Lokasi yang dinamai Blok Ambalat dan Ambalat Timur itu disebut sebagai Blok Y dan Blok Z oleh Malaysia.

2.2 Sengketa Ambalat merupakan konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia

Konflik yang terjadi antar negara merupakan kondisi yang sudah umum diantara negara-negara di dunia ini apalagi bagi negara yang memiliki banyak titik perbatasan di perairan dengan negara lain biasanya lebih rentan timbulnya konflik. Konflik ini dapat terjadi karena perebutan akan kekuatan, kekuasaan, status dan juga karena pengelompokan dalam sistem internasional. Pendekatan realis juga menyatakan bahwa keinginan negara untuk mendapatkan kekuasaanlah yang menyebabkan terjadinya konflik dan yang menyebabkan kekuasaan ini diperebutkan adalah karena dengan memiliki kekuasaan maka negara memiliki banyak keuntungan, memiliki kemampuan untuk mendapatkan hasil yang lebih dalam posisi tawar menawar bagi negara tersebut.

Konflik dibagi menjadi dua yaitu konflik atas materi yang dapat diukur serta konflik atas materi yang tidak dapat diukur (Goldstein, 1999: 198). Perselisian batas wilayah (*territorial disputes*) termasuk di dalam konflik atas materi yang dapat diukur dimana konflik ini timbul saat batas antara dua wilayah negara atau lebih masih belum jelas sehingga masing-masing negara akan saling

bersitegang memperebutkan kepemilikan daerah yang dipersengketakan. Karena nilai wilayah suatu negara merupakan sesuatu yang sangat berharga maka umumnya suatu negara akan memperjuangkan daerah teritorialnya dan tidak mau diberi imbalan agar melepas sebagian daerahnya tersebut dengan uang apalagi menyerahkannya dengan sukarela terhadap negara lain.²⁰

Batas antar Negara adalah konflik yang terjadi karena perselisihan mengenai batas antar negara yang masing masing telah berdaulat. Perbatasan merupakan suatu hal yang penting bagi negara karena mencerminkan kedaulatan serta menjadi jaminan keutuhan wilayah. Dengan wilayah luas berkepulauan, Indonesia masih memiliki masalah perbatasan dengan negara tetangganya. Batas maritim Indonesia dan Malaysia termasuk salah satu yang paling tinggi permasalahannya jika dilihat dari kasus dan sengketa yang diberitakan media massa, sebagai contohnya, adalah kasus perselisihan antara Indonesia dan Malaysia mengenai kepemilikan gugusan kepulauan Sipadan dan Ligitan dan perselisihan blok Ambalat. Masing-masing negara berusaha agar wilayah yang disengketakan menjadi wilayah teritorial negaranya. Malaysia dengan berlandaskan pada dokumen pemerintahan kolonial Inggris dan Indonesia dengan berdasarkan dokumen pemerintahan kolonial Belanda mengajukan permasalahan ini ke Mahkamah Internasional. Wilayah sangat penting dan merupakan dasar suatu negara, karena itu setiap negara pasti akan memperjuangkan wilayahnya.

Permasalahan blok Ambalat adalah suatu konflik hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia, konflik blok Ambalat disebabkan oleh perbatasan negara di Laut Sulawesi terjadi klaim antara kedua negara dikarenakan cara penghitungan wilayah laut Indonesia dan Malaysia yang berbeda. Untuk menyelesaikannya, Indonesia dan Malaysia sepakat menggunakan cara perundingan yang dimulai pada tahun 2005. Hingga Oktober 2009, perundingan telah dilakukan sebanyak 15 kali. Sejauh ini hasil perundingan yang dicapai adalah pengakuan Malaysia atas Karang Unarang milik Indonesia dan masih akan terus dilakukan upaya lain untuk mencapai kesepakatan batas negara di Laut Sulawesi. Sengketa perbatasan blok

²⁰ Snyder, Glenn, and Paul A. Diesing, *Conflict Among Nations: Bargaining, decision making, and system structure in international crises*. Princeton, (Princeton University Press, 1977), hlm. 21.

Ambalat yang berada di Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia merupakan bukti belum tuntasnya batas maritim Indonesia.

Konflik antara Indonesia dan Malaysia seputar blok Ambalat mengemuka ketika terbetik kabar bahwa pemerintah Malaysia melalui perusahaan minyak nasionalnya, Petronas, memberikan konsesi minyak kepada perusahaan minyak Shell, atas cadangan minyak yang terletak di perairan sebelah timur Kalimantan. Pemerintah Indonesia mengajukan protes atas hal ini karena merasa bahwa wilayah itu berada dalam kedaulatan negara Indonesia. Sebenarnya klaim Malaysia terhadap cadangan minyak di wilayah itu sudah diprotes Indonesia sejak tahun 1980, menyusul diterbitkannya peta wilayah Malaysia pada tahun 1979. Peta tersebut mengklaim wilayah di Laut Sulawesi sebagai milik Malaysia dengan didasarkan pada kepemilikan negara itu atas pulau Sipadan dan Ligitan. Malaysia beranggapan bahwa dengan dimasukkannya Sipadan dan Ligitan sebagai wilayah kedaulatan Malaysia, secara otomatis perairan di Laut Sulawesi tersebut masuk dalam garis wilayahnya. Indonesia menolak klaim demikian dengan alasan bahwa klaim tersebut bertentangan dengan hukum internasional.

Argumentasi Malaysia, yang mendasarkan klaimnya dengan berdasar kepemilikan negara itu atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, tidak bisa diterima Indonesia karena bertentangan dengan hukum internasional. Kepemilikan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan tidak memberikan efek penuh pada batas maritim. Sebagai negara yang bukan negara kepulauan, Malaysia tidak bisa menggunakan klausul yang dimiliki negara kepulauan, seperti Indonesia, untuk menarik garis batas wilayahnya.

Faktor-faktor penyebab timbulnya persengketaan blok perairan ambalat antara Indonesia dengan Malaysia yaitu :

1. Kedua belah pihak yaitu Indonesia maupun Malaysia mengklaim bahwa blok perairan ambalat adalah wilayah toritorial kedaulatan negaranya.
2. Tidak adanya batas negara yang jelas dikawasan perairan ambalat
3. Tidak adanya kesepakatan antara kedua negara atas batas negara
4. Terdapat sumber daya alam yang melimpah ruah yang terkandung dalam perut bumi di kawasan perairan amabalat yaitu minyak dan gas bumi.

Gambar 2.2
Peta Perbatasan antara Indonesian Malaysia, Filipina



Sumber : <http://www.itempoeti.com/2009/06>

2.3 Klaim Blok Ambalat ditinjau dari perspektif Malaysia

Malaysia beryakinan bahwa Ambalat merupakan wilayah mereka dengan demikian kebijakan pemerintah Malaysia menjual minyak dan gas alam yang terkandung didalamnya kepada perusahaan Shell untuk mengeksploitasi minyak dan gas di kawasan perairan Ambalat. Klaim dari Malaysia bahwa setiap pulau berhak mempunyai laut toritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landasan kontinennya sendiri, maka pasal 121 UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982 dapat dibenarkan. Kebijakan politik luar negeri Malaysia mengklaim Ambalat (blok minyak XYZ) di dasarkan pada penggunaan peta laut yang di produksi pada tahun 1979, selain itu Malaysia juga menggunakan pasal 121 UNCLOS 1982 untuk memperkuat keinginan mereka untuk menguasai Ambalat. Peta tersebut memuat Batas Continental Shelf di mana klaim tersebut secara keseluruhan melewati media line, deviasi maksimum pada dua sekor sekitar 5 mil laut. Dengan berdasarkan pasal 121 UNCLOS 1982 dan peta laut tahun 1979, jelas bahwa kawasan perairan Ambalat adalah wilayah toritorial mereka jika penarikan garis lurus dari lintang $4^{\circ} 10'$ ke arah timur yang memotong pulau sebatik karena wilayah perairan tersebut terletak sebelah timur

Universitas Indonesia

titik akhir garis yang dimaksud yang didasarkan pada konvensi 1891 kesepakatan Inggris dan Belanda membagi wilayah kekuasaan kolonialnya. Dengan landasan seperti yang dipaparkan diatas maka Malaysia mempunyai hak mutlak untuk memiliki Ambalat dan mengelola sumber daya alam yang terkandung didalamnya.

Pemerintah Malaysia menggunakan Peta Wilayah Malaysia 1979 yang secara unilateral memasukkan wilayah Ambalat sebagai wilayahnya sebagai dasar klaim tersebut. Malaysia mengklaim wilayah di sebelah timur Kalimantan Timur itu miliknya. Malaysia menyebut wilayah Ambalat sebagai Blok minyak XYZ berdasarkan peta yang dibuatnya pada 1979 dan Malaysia merasa lebih berperan dalam proses pembangunan Ambalat

Ditinjau dari aspek politik, keuntungan yang didapatkan Malaysia yaitu berupa meluasnya wilayah negara, untuk mencapai keinginannya Malaysia harus mempunyai kemampuan militer yang kuat dan persenjataan yang canggih untuk mempertahankan negara dari serangan musuh dengan kata lain adanya deterrence.²¹ Sistem hubungan internasional bersifat anarki dimana siapa yang mempunyai kekuatan yang lebih besar maka dialah yang lebih berperluang memperoleh keuntungan politik, disamping itu harga diri Malaysia sebagai sebuah bangsa dan negara berdaulat akan meningkat.

Ditinjau dari segi ekonomi dimana suatu negara mengklaim suatu wilayah menjadi wilayahnya tiada lain adanya kepentingan nasional yang ingin di capai, keinginan Malaysia memiliki kawasan perairan ambalat yaitu bahwa di kawasan perairan ambalat terdapat sumber daya alam yang sangat melimpah yaitu minyak dan gas bumi, apabila Malaysia dapat mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan ambalat maka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari eksploitasi tersebut, dengan keuntungan tersebut maka Malaysia dapat mensejahterakan rakyatnya dan meningkatkan ekonominya misalnya dengan pengolahan minyak dan gas alam dapat menunjang proses produksi dan meningkatkan peroduktifitas industrialisasi di Malaysia. Pengelolaan eksploitasi minyak dan gas alam di wilayah perairan amabalat maka pemerintah Malaysia dapat menggunakan minyak dan gas sebagai bahan bakar industri dan pemerintah

²¹ Olivier *The New Central Asia: Geopolitics and the Birth of Nations*, (New York: NYU Press ,2007), hlm. 57.

Malaysia dapat menjual minyak dan gas alam ke perusahaan asing yang dapat menguntungkan bagi Malaysia. Dengan meningkatnya produktifitas industrialisasi dan meningkatnya produksi maka penghasilan atau devisa negara akan meningkat.

2.4. Klaim Blok Ambalat ditinjau dari perspektif Indonesia

Salah satu bentuk ancaman keutuhan wilayah nusantara adalah konflik perbatasan negara. Dengan adanya kasus sebelumnya yaitu kasus Sipadan dan Ligitan seharusnya dapat menyadarkan bangsa Indonesia bahwa kita sudah jauh dari konsep Wawasan Nusantara dan juga kelalaian Indonesia yang tidak segera menetapkan batas terluar kepulauan Indonesia. Indonesia telah sejak lama bahkan lebih dulu dari Malaysia melakukan kegiatan penambangan migas di lokasi yang disengketakan itu. Pemerintah Indonesia menjadi Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Blok Ambalat dikelola kontraktor migas ENI asal Italia sejak tahun 1999, sementara Blok East Ambalat dikelola Unocal Indonesia Ventures Ltd. asal Amerika sejak Desember 2004. Pemerintah Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai ND 6 atau Blok Y, sedangkan blok East Ambalat sebagai ND 7 atau Blok Z. Pemberian konsesi minyak di perairan tersebut memang lebih dulu dilakukan Indonesia kepada berbagai perusahaan minyak dunia, termasuk Shell, sejak tahun 1960-an; antara lain kepada Total Indonesia untuk Blok Bunyu sejak 1967 yang dilanjutkan dengan konsesi kepada Hadson Bunyu BV pada 1985. Konsesi lainnya diberikan kepada Beyond Petroleum (BP) untuk Blok North East Kalimantan Offshore dan ENI Bukat Ltd. Italia untuk Blok Bukat pada 1988.

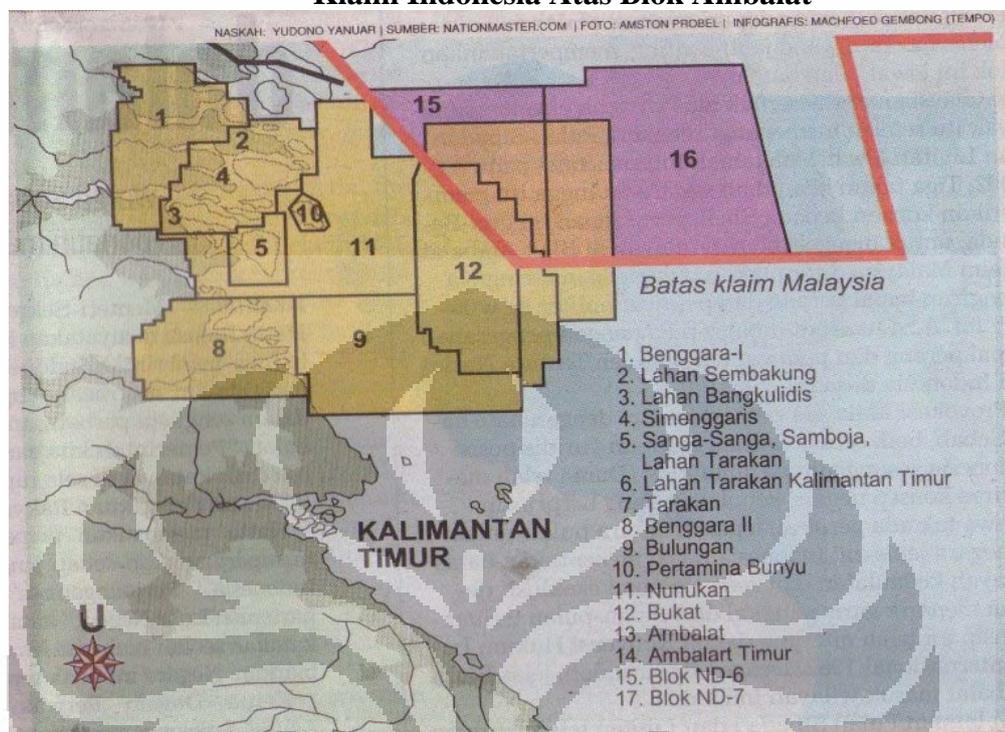
Secara hukum serta berdasarkan konsensus Mahkamah Internasional, Indonesia adalah pemilik wilayah Ambalat. Jika kasus ini kembali diajukan ke Mahkamah Internasional, Indonesia memiliki alat bukti kuat mengenai kepemilikan kawasan tersebut sebagai bagian dari wilayah nusantara diantaranya seperti uraian di bawah ini. Indonesia adalah negara kepulauan. Deklarasi Negara Kepulauan ini telah dimulai ketika diterbitkan Deklarasi Djuanda tahun 1957, lalu diikuti Prp No. 4/1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Negara Kepulauan ini juga telah disahkan oleh The United Nations Convention on the Law the Sea (UNCLOS) tahun 1982 Bagian IV. Isi deklarasi UNCLOS 1982 antara lain di antara pulau-pulau Indonesia tidak ada laut bebas, dan sebagai negara kepulauan,

Indonesia boleh menarik garis pangkal (*baselines*) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar. Malaysia bukanlah negara kepulauan, namun sebagai negara pantai biasa yang hanya boleh memakai garis pangkal biasa (*normal baselines*) atau garis pangkal lurus (*straight baselines*) jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Oleh karena itu, Malaysia seharusnya tidak menyentuh Ambalat, karena Malaysia hanya bisa menarik baselines dari Negara Bagian Sabah, bukan dari pulau Sipadan dan Ligitan.

Tidak ada kesepakatan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi. Indonesia adalah negara kelautan yang memiliki bukti dan dokumen sejak peninggalan pemerintah Belanda yang sangat kuat mengenai nusantara yang memuat hukum laut dan batas garis pangkal nusantara dan batas laut dasar sampai pantai dasar serta di mana posisi perairan Indonesia berada sampai 200 mil dari Zona Ekonomi Eksklusif. Sementara Malaysia baru menetapkan hukum laut dan mengklaim kepemilikan Ambalat tahun 1979.

Berdasarkan deklarasi Juanda 1957 lalu diikuti UU Prp No 4/1960 tentang Perairan Indonesia, tim negosiasi Indonesia menawarkan konsep Negara Kepulauan untuk dapat diterima di Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) III, sehingga dalam "The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982" dicantumkan Bagian IV mengenai negara kepulauan. Di antara pulau-pulau kita tidak ada laut bebas, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar (*the outermost points of the outermost islands and drying reefs*). Dengan demikian, PBB pun mengakui kepemilikan Indonesia atas blok itu. Hal itu diundangkan dengan UU No 6/1996 tentang Perairan Indonesia untuk menggantikan UU Prp No 4/1960 sebagai implementasi UNCLOS 1982 dalam hukum nasional.

Gambar 2.3
Klaim Indonesia Atas Blok Ambalat



Sumber : <http://nationmaster.com/ambalat>

Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar dan wilayah yang luas baik darat maupun lautan memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keutuhan dan persatuan serta kesatuan wilayahnya. Berbagai ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Hal yang berkaitan dengan konsep wawasan nusantara serta implementasinya salah satunya mengenai persengketaan berkaitan dengan daerah perbatasan antar negara seperti sengketa mengenai daerah perbatasan di wilayah Ambalat. Adapun latar belakang yang memunculkan masalah tersebut yaitu Pemberian konsensi eksplorasi pertambangan di Blok ND7 dan ND6 dalam wilayah perairan Indonesia. Tepatnya di Laut Sulawesi, perairan sebelah timur Kalimantan oleh perusahaan minyak Malaysia, Petronas kepada PT Shell, pada tanggal 16 February 2005. Padahal Pertamina dan Petronas sudah lama saling mengklaim hak atas sumber minyak dan gas di Laut Sulawesi dekat Tawau, Sabah yang dikenal dengan East Ambalat. Kedua perusahaan minyak dan gas itu menawarkan hak eksplorasi ke perusahaan

asing. Blok Ambalat diperkirakan memiliki kandungan 421,61 juta barel minyak dan gas 3,3 triliun kaki kubik.

Menurut pihak Indonesia, Malaysia bukanlah negara kepulauan, namun sebagai negara pantai yang hanya boleh memakai garis pangkal biasa (*normal baselines*) atau garis pangkal lurus (*straight baselines*) jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Oleh karena itu, Malaysia seharusnya tidak mengklaim Ambalat, karena Malaysia hanya bisa menarik baselines dari negara bagian Sabah, bukan dari pulau Sipadan dan Ligitan. Diberikannya kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2002 melahirkan potensi berubahnya konfigurasi garis pangkal Indonesia dan Malaysia. Garis pangkal Indonesia kini tidak lagi menggunakan kedua pulau tersebut sebagai titik pangkal sehingga zona laut yang bisa diklaim akan berubah dan cenderung menyempit. Sementara itu, Malaysia bisa saja menggunakan kedua pulau tersebut sebagai titik pangkal yang konsekuensinya adalah wilayah laut yang bisa diklaim akan melebar ke bagian selatan. Ini juga yang memperkuat dasar klaim Malaysia terhadap ambalat. Namun demikian, tetap ada kemungkinan Indonesia menolak memberikan peran penuh kepada kedua pulau tersebut sehingga tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap klaim Malaysia, menurut UNCLOS pasal 121, hal itu dapat dibenarkan. Namun rezim penetapan batas landas kontinen mempunyai *specific rule* yang membuktikan keberadaan pulau-pulau yang *relatively small, socially and economically insignificant* tidak akan dianggap sebagai *special circumstance* dalam penentuan garis batas landas kontinen.

Menurut Konvensi hukum laut, sebuah negara pantai (negara yang wilayah daratannya secara langsung bersentuhan dengan laut) berhak atas zona maritim laut teritorial, EEZ, dan landas kontinen sepanjang syarat-syarat (jarak dan geologis) memungkinkan. Dalam hal ini, tidak diragukan lagi bahwa Indonesia dan Malaysia yang sama-sama telah meratifikasi UNCLOS III memang berhak untuk mengklaim wilayah laut. Hanya saja, seperti dapat diduga, memang akan terjadi pertampalan atau tumpang-tindih klaim antar kedua negara. Ambalat, di satu sisi, berada pada klaim tumpang tindih ini. Dengan demikian, Malaysia secara hukum memang berhak atas klaim tersebut. Garis dasar adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar. apabila tarik dari garis lurus itu, Ambalat

Universitas Indonesia

masuk di dalamnya dan bahkan lebih jauh ke luar lagi. Sikap itu sudah dicantumkan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960, yang kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Indonesia berhasil memperjuangkan konsep hukum negara kepulauan (*archipelagic state*) hingga diakui secara internasional. Pengakuan itu terabadikan dengan pemuatan ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada Desember 1982. Dalam kasus Sipadan dan Ligitan, Indonesia tidak meminta Mahkamah Internasional memutuskan garis perbatasan laut dan Indonesia tidak pernah merundingkannya.

Indonesia menyebut blok yang sama sebagai Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Di Blok Ambalat, Indonesia telah memberikan konsesi eksplorasi kepada ENI (Italia) pada 1999. Sementara itu, Blok East Ambalat diberikan kepada Unocal (Amerika Serikat) pada 2004. Pada 1998 Indonesia memberikan konsesi kepada Shell untuk melakukan eksplorasi minyak tetapi pada saat itu Malaysia mengetahui dan tidak memprotes adanya kegiatan ekonomi di blok Ambalat tersebut. Kasus Sipadan-Ligitan sama sekali tidak bisa menjadi dasar klaim Malaysia. Keputusan ICJ pada 17 Desember 2002 adalah keputusan menyangkut kedaulatan Sipadan dan Ligitan yang tak berpenghuni dan batas landas kontinen adalah dua hal yang sangat berbeda. Menurut Mahkamah Internasional, masalah delimitasi (garis batas) landas kontinen harus dipandang dengan sudut pandang berbeda, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982. Sampai kini, garis landas kontinen yang diakui dunia adalah garis yang ditetapkan Indonesia dalam UU Nomor 1960.

1.5 Aksi dan Reaksi pada Konflik Ambalat

Dalam suatu proses politik internasional yang melibatkan hubungan antar aktor negara dan non-negara didalamnya, dibutuhkan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh aktor-aktor tersebut sebagai representasi dari kepentingan masing-masing aktor yang kemudian saling bertemu. Dalam hubungan internasional khususnya hubungan antar negara hal ini disebut politik luar negeri. Hal ini merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek

internasional tapi juga aspek-aspek eksternal suatu negara.²² Pengertian dasar dari Politik luar negeri ialah "*action theory*", atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut Kebijakan Luar Negeri.

K.J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

1. Nilai (*values*) yang menjadi tujuan para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, dengan adanya tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.²³

Konflik Ambalat dapat dilihat hubungannya juga dengan ekonomi politik Internasional. Perekonomian internasional lebih merupakan arena konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan dari pada sebagai wilayah kerjasama yang saling menguntungkan. Persaingan ekonomi antar negara adalah permainan zero-sum (*zero-sum game*) dimana keuntungan suatu negara merupakan kerugian bagi negara lain. Maka pada konflik ini baik Indonesia maupun Malaysia harus khawatir mengenai keuntungan ekonomi relatif sebab kekayaan material yang di kumpulkan oleh salah satu negara negara dapat menjadi basis bagi kekuatan politik dan militer yang dapat di gunakan untuk melawan negara lain.²⁴

Dipandang dari kacamata realis, aspek-aspek yang harus diperhatikan diantaranya Realisme mengklaim bahwa konflik merupakan *natural state* atau keadaan alamiah dari pada hubungan internasional. Hal ini terbukti dengan adanya konflik berkepanjangan antara Indonesia dan Malaysia menyangkut beberapa

²² Clarke, M. and B. White (eds) *Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy System Approach*, (Cheltenham: Edward Elgar, 1989), hlm. 33.

²³ Yanyan Mochamad Yani, Ph.D., dalam Jurnal *Politik Luar Negeri*, (pustaka unpad, 2008)

²⁴ Meike Mayasari, dalam Jurnal *Persengketaan daerah perbatasan di wilayah Ambalat Kaitannya dengan konsep wawasan nusantara* (pustaka ugm, 2005), hlm. 2.

wilayah yang terletak di perairan perbatasan keduanya. Menurut sejarawan Friedrich Meinecke, *Raison d'état* merupakan prinsip dasar yang digunakan sebagai landasan tindakan-tindakan internasional, yang juga disebut dengan *the State's First Law of Motion*.²⁵ Ini berarti bahwa masing-masing negara bergerak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri: terlihat dari tindakan baik dari pihak Indonesia maupun Malaysia yang masing-masing bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Realisme memang menekankan pada *power* dan politik di antara negara-negara, namun mereka juga mempertimbangkan norma-norma, nilai, dan peranan yang mereka mainkan dalam keteraturan politik internasional, seperti yang dilakukan oleh Hans Morgenthau. Menurut Morgenthau, politik merupakan suatu *struggle for power*.²⁶

Mengingat bagaimana kedua negara yang terlibat dalam konflik ini demikian gigihnya dalam memperjuangkan klaimnya, tentu ada sesuatu di balik klaim mereka. Ini dapat dikatakan bahwa yang diperjuangkan keduanya ialah potensi *power* yang tersimpan dalam wilayah yang diperebutkan tersebut. *Statism* atau statisme, satu dari tiga konsep utama dari Realisme, ialah istilah yang diberikan kepada pemikiran yang mengatakan bahwa negara merupakan representan yang legitim dari keinginan bersama daripada rakyat suatu negara. Hal ini terlihat dalam tindakan Indonesia yang mengklaim kembali wilayah Ambalat yang disertai oleh protes masyarakat Indonesia atas klaim Malaysia. Berarti, Indonesia dalam hal ini bertindak sesuai dengan keinginan bersama rakyatnya.

Para realis percaya bahwa dalam sistem internasional tidak terdapat institusi atau hukum yang berlaku dengan mutlak dalam menjaga hubungan yang terjadi antara negara-negara yang ada, dan tiap-tiap negara bertindak mengikuti kepentingannya masing-masing dan *bukan* ideologi oleh karena itu, tidak dianjurkan bagi negara tersebut untuk bergantung pada negara lain ataupun pada institusi internasional menyangkut nasibnya. Menurut Niccolo Macchiavelli,

²⁵ Tim Dunne dan –Brian C. Smith., “Realism” dalam John Baylis dan Steve Smith, eds., *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, 2nd Edition (Oxford: Oxford University Press), hlm. 142.

²⁶ Tim Dunne dan –Brian C. Smith., “Realism” , *loc.cit.*, hlm. 143.

negara yang hari ini merupakan kawan dapat menjadi lawan pada hari esok. Pada intinya, tiap negara hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri dalam urusan penentuan nasibnya (*self-determination*). Ini terlihat dalam bagaimana UNCLOS yang telah menjamin hak Indonesia atas blok Ambalat tetap dibantah oleh Malaysia. Berarti, sekalipun sebuah institusi internasional telah meratifikasi wilayah kedaulatan suatu negara, negara tersebut harus selalu tetap siap menghadapi gugatan, ancaman, atau klaim negara lain atas wilayah tersebut, dan dalam hal ini harus bergantung pada dirinya sendiri.

Tindakan Malaysia yang mengklaim blok perairan Ambalat sebagai wilayah teritorial negaranya telah membuat sikap dan tindakan reaksi dari Indonesia. Perkembangan kasus Ambalat sangat berdampak negatif dan membuat ketegangan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia dalam kondisi yang kurang baik pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan melalui keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002.

Beberapa sikap masyarakat Indonesia yang merespons kasus Ambalat. Pertama, sikap anti-Malaysia dalam pengertian politik yang ditunjukkan oleh kalangan nasionalis dan masyarakat awam dimana memiliki perasaan sakit hati atas kebijakan politik pemerintah Malaysia dalam kasus TKI. Sikap ini ditunjukkan dalam berbagai demonstrasi dengan isu *Ganyang Malaysia*. Kedua, sikap kritis dan rasional. Sikap ini mencoba mengkritisi kasus Ambalat sebagai bentuk sengketa kewilayahan antardua negara tetangga karena perbedaan sudut pandang politik kemaritiman dan juga kepentingan ekonomi-politik dengan memposisikan kasus Ambalat setara dengan kasus-kasus sengketa batas wilayah atau klaim teritorial, seperti Kepulauan Spratly, yang diperebutkan lima negara asia. Ketiga, sikap kritis-progresif yaitu ditunjukkan oleh berbagai komponen gerakan mahasiswa yang mencoba membaca kasus Ambalat sebagai bentuk pertarungan harga diri bangsa dan negara dari kepentingan ekonomi-politik neo-imperialisme dimana dilandasi oleh kerangka berpikir bahwa kasus konflik Ambalat sebenarnya merupakan konflik kepentingan rezim neo-liberalisme dan neo-imperialisme yang terwakili berbagai serikat perusahaan minyak global yang ingin mengeksploitasi sumber daya minyak di gugus perairan Ambalat yaitu antara perusahaan minyak UNOCAL (AS) dan ENI (Italia) yang telah menjalin

Universitas Indonesia

kontrak dengan pemerintah Indonesia, diwakili Pertamina melawan perusahaan SHELL (Inggris-Belanda) yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah Malaysia, yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah Malaysia. Sengketa perairan Ambalat pertempuran kepentingan antarperusahaan kapitalis minyak di atas untuk memperebutkan sumber daya minyak dan gas yang ada di dasar perairan Ambalat. Dalam konteks demikian sebenarnya konflik Ambalat adalah pertentangan kepentingan antar perusahaan minyak global dengan memanfaatkan politik intervensi pemerintah Malaysia yang mungkin memiliki sikap berani berkonflik melawan pemerintah Indonesia.²⁷

2.5.1 Aksi Di Perairan Blok Ambalat

Malaysia mengklaim wilayah Ambalat karena wilayah tersebut ada pada perairan sejauh 70 Nm dari Pulau Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia pada tahun 2002. Tetapi perlu dilihat bahwa Malaysia bukan negara kepulauan tetapi hanya negara pantai, oleh karena itu Malaysia hanya berhak mengklaim 12 Nm dari kedua pulau itu dan Indonesia yang merupakan negara kepulauan, berhak atas wilayah perairan sepanjang 200 Nm untuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pada ZEE ini memang tidak semua hukum nasional bisa diberlakukan, tetapi pada wilayah laut teritorial, Indonesia berhak menerapkan semua hukum nasional secara penuh. Klaim Indonesia dimulai ketika diterbitkan Deklarasi Djuanda tahun 1957, kemudian diikuti Prp No. 4/1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Negara Kepulauan ini juga telah disahkan oleh The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 Bagian IV. Isi deklarasi UNCLOS 1982 antara lain "di antara pulau-pulau Indonesia tidak ada laut bebas, dan sebagai Negara Kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (*baselines*) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar.

²⁷ Yuli Prasetyaningsih, dalam artikel *Sengketa Ambalat dengan Reaktualisasi Nasionalisme Kritis*, (Dokumen Fakultas Sastra-Seni Rupa UNS, Solo, 2009), hlm. 3.

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.²⁸ Di Indonesia TNI-AL adalah komponen bangsa paling utama yang berhubungan langsung dengan sengketa di Ambalat. TNI-AL dengan sistim senjata armada terpadunya menegakkan kedaulatan dan hukum dilaut di wilayah Ambalat dengan strategi pertahanan maritim. Berdasarkan strategi pertahanan negara, pertahanan digelar secara berlapis disesuaikan dengan peran dan fungsi yang ada dalam menghadapi ancaman militer, pertama tahap Diplomasi melalui kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan. Kedua melalui kebijakan Departemen Pertahanan memobilisasi rakyat secara spontan kekuatan pengganda dengan melibatkan komponen cadangan dan pendukung. Ketiga melalui pertahanan militer untuk menghadapi agresi militer dengan pertahanan militer untuk tujuan preventif, pertahanan militer untuk tujuan preemptif dan pertahanan militer untuk menghadapi musuh yang sudah masuk wilayah Indonesia.

TNI-AL dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam Pasal 7 (ayat (2) huruf b angka 4) menyatakan bahwa TNI bertugas mengamankan wilayah perbatasan, sedangkan dalam Pasal 9 huruf b menyatakan bahwa Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia perlu strategi ataulangkah-langkah nyata secara komprehensif integral dalam rangka penegakan hukum dilaut dan pulau kecilperbatasan termasuk diantaranya perairan Ambalat, antara lain berupa penetapan batas maritim dalam peraturan perundang-undangan, sinergitas

²⁸ Departemen Pertahanan, "Doktrin Pertahanan Negara", Jakarta, 2008.

pembangunan wilayah antara Pemerintah Pusat dan daerah peningkatan Alutsista TNI AL, strategi operasi TNI AL atau strategi pertahanan maritim yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang terbaik bagi penyelesaian kasus Ambalat.

Untuk mengamankan wilayah Ambalat, Indonesia menyiagakan 5 kapal perang Indonesia. Tiga kapal telah berada di perairan yang dipersengketakan (KRI Rencong-622, KRI Wiratno-879, dan KRI Nuku-873), sedangkan dua lagi direncanakan menyusul. Salah satu pesawat pengintai Malaysia, pesawatintai maritim Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) jenis Beech Craft B 200 T Super King sempat melintas pada jarak yang sangat dekat dengan KRI Wiratno yang sedang berpatroli. Pada 5 Maret 2005, kapal perang kedua negara saling berhadapan di perairan sekitar Karang Unarang mulai sekitar pukul 10.15. Saat itu sempat terjadi adu argumen mengenai kedaulatan kedua negara. Lalu, kapal perang Malaysia, TLDM KD Kerambit menjauhi perairan Indonesia dengan dibuntuti KRI Rencong hingga jarak 300 yard. Indonesia akan menambah armada menjadi 7 kapal (antara lain KRI KS Tubun, KRI Tongkol, dan KRI Singa). Malaysia menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa dengan Indonesia. Sejauh ini, Malaysia telah mengerahkan 4 kapal perang (KD Sri Malaka, KD Kerambit, KD Paus, dan KD Baung).

Pada 6 Maret, TLDM KD Kerambit kembali memasuki wilayah Indonesia, diikuti dengan munculnya pesawatintai maritim Malaysia jenis Beech Craft B 200 T Super King yang melakukan manuver sebanyak enam kali. Sehari sesudahnya, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono meninjau kawasan perbatasan RI-Malaysia yang dipersengketakan dengan menaiki KRI KS Tubun. Ketegangan di daerah perbatasan RI-Malaysia di wilayah Amabalat cenderung mereda pada 9 Maret 2005 dimana pihak Malaysia menarik sejumlah armada tempurnya di wilayah perbatasan dan armada TNI AL kemudian melakukan hal serupa. Setelah melakukan pertemuan, Menteri Luar Negeri Malaysia, Syed Hamid Jaafar Albar dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda bersepakat untuk menyelesaikan masalah sengketa perbatasan melalui jalur diplomasi. Kedua negara juga setuju mengambil langkah yang dibutuhkan untuk mengurangi tumbuhnya ketegangan yang telah berkembang dalam beberapa hari

Universitas Indonesia

sebelumnya. Namun walaupun kedua negara telah menyepakati jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah sengketa Ambalat, namun TNI tetap disiagakan di kawasan tersebut. Tujuh KRI dan tiga pesawat akan dikerahkan untuk memantau perkembangan. Pertemuan antara tim teknis Indonesia dan Malaysia untuk membahas penyelesaian sengketa wilayah Ambalat berakhir pada hari Rabu, 23 Maret 2005. Pertemuan itu menghasilkan rencana kerja untuk menyelesaikan masalah sengketa wilayah tersebut. Ada beberapa kemajuan yang dicapai, antara lain posisi kedua pihak menjadi jelas, terutama posisi Malaysia dalam mengukur garis batasnya yang selama ini dipertanyakan oleh Indonesia. Indonesia menegaskan kembali posisinya sesuai dengan ketentuan PBB soal Hukum Laut (UNCLOS). Indonesia tidak dapat menerima penyelesaian Ambalat lewat pengelolaan bersama di kawasan tersebut.

2.5.2. Karang Unarang

Karang Unarang adalah nama sebuah karang yang berada di Laut Sulawesi terletak sekitar 9 mil di sebelah tenggara Pulau Sebatik pada koordinat $04^{\circ}00'38''\text{LU}, 118^{\circ}04'58''\text{BT}$. Karang Unarang ini milik Indonesia. Karang Unarang hanya muncul pada saat air laut surut. Saat air laut surut pada posisi terendah, ketinggian karang mencapai 30 cm. Indonesia membangun suar permanen di Karang Unarang mulai tanggal 21 Februari 2005 sampai 14 April 2005. Mercu suar pondasi bangunan berukuran 5 X 5 meter, ketinggian 17 meter, dengan sinar yang dapat dilihat dari jarak 10 mil.

Karang unarang sebagai patokan bahwa daerah sekitarnya termasuk Ambalat adalah milik Indonesia yang menandai kedaulatan Indonesia. Klaim Malaysia atas blok Ambalat dan adanya provokasi di daerah itu membuat pihak Indonesia bergerak cepat menanggapi aksi tersebut dengan membangun sebuah mercusuar diatas Karang Unarang ini. Pada saat pembangunan mercusuar ini kapal-kapal perang Malaysia secara terang-terangan memprovokasi dengan cara berlayar sangat dekat dengan lokasi tersebut dengan kecepatan tinggi, sehingga memunculkan gelombang air laut yang mengganggu jalannya pembangunan mercusuar. Dari perpektif Malaysia hal tersebut dilakukan karena jika Indonesia berhasil membangun mercusuar disana dan menaikkan bendera Indonesia

diatasnya, maka secara tidak langsung, itu sudah merupakan sebuah tanda bahwa Ambalat adalah wilayah Indonesia.

Dengan adanya provokasi dari pihak Malaysia, pihak TNI AL mengerahkan beberapa Kapal Perang untuk mengawal dan mengusir semua kapal-kapal perang Malaysia yang menghalangi pembangunan mercusuar ini, dimana pada tanggal 8 April 200 terjadi ketegangan yang melibatkan kapal perang pihak Malaysia *KD Sri Johor, KD Buang dan Kota Baharu* berikut dua kapal patroli sedangkan kapal perang dari pihak Indonesia melibatkan KRI Wiratno, KRI Tongkol, KRI Tedong Naga, KRI K.S. Tubun, KRI Nuku dan KRI Singa. Pada saat itu kapal Malaysia memprovokasi dengan mencoba memasuki daerah Ambalat dan Karang Unarang, namun terus dibayang-bayangi oleh kapal perang Indonesia tersebut. Sampai akhirnya KRI Tedong Naga (Indonesia) yang menyerempet KD Rencong (Malaysia) sebanyak tiga kali, akan tetapi tidak pernah terjadi tembak-menembak karena adanya Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/158/IV/2005 tanggal 21 April 2005 bahwa pada masa damai, unsur TNI AL di wilayah perbatasan RI-Malaysia harus bersikap kedepankan perdamaian dan TNI AL hanya diperbolehkan melepaskan tembakan bilamana setelah diawali adanya tembakan dari pihak Malaysia terlebih dahulu. Dengan perjuangan TNI-AL melindungi teritorial Indonesia provokasi ini bisa diatasi hingga pembangunan Mercusuar di Karang Unarang selesai dilakukan. Mercusuar di Karang Unarang yang di atasnya dikibarkan bendera Indonesia yang bertujuan untuk menandakan Ambalat adalah wilayah Indonesia.

2.6. Fase Penyelesaian konflik Ambalat

Adapun konsep Negara Kepulauan tersebut berangkat dari Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah kesatuan yang terdiri atas lautan dan daratan.²⁹ Secara sejarah hukum, Indonesia sejak tahun 1957 telah terus memperjuangkan konsep ini dalam Konferensi Hukum Laut PBB pada tahun 1958 dan 1960. Dengan keikutsertaan 86 negara berlangsunglah Konferensi Hukum Laut yang pertama di Jenewa dari tanggal 24

²⁹ <http://www.mnews/ambalatdispute/KarangUnarang.html>, diakses pada 22 Januari 2012, pukul 19.30 WIB.

Pebruari 1958 sampai dengan 27 April 1958, dengan maksud untuk melaksanakan tugas yang dimandatkan oleh Majelis Umum PBB, yang telah menentukan bahwa *"... an international Conference of plenipotentiaries should be convoked to examine the law of the sea, taking into account not only the legal but also the technical, economic and politic aspects of the problem, and to embody the result of its work in one or more international convention ..."*

Usaha yang ditempuh oleh Indonesia dalam memperjuangkan untuk diterimannya konsep Negara Kepulauan dilakukan pada Komite I tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Jawaban atas permasalahan mengenai seberapa jauh batas luasnya Laut Teritorial yang dapat diklaim oleh suatu negara juga diharapkan dapat diputuskan oleh Komite I ini. Kesulitan yang terdapat bagi penentuan luas Laut Teritorial bukanlah berada pada pertanyaan yang bersifat teknis semata. Hal tersebut banyak tersangkut dengan masalah politis, karena suatu perubahan pemahaman pada pengertian Laut Teritorial, meskipun itu hanya sedikit saja, akan membawa konsekuensi yang cukup berarti dalam lapangan ekonomi maupun militer.

Permasalahan Ambalat menjadi penting bagi Indonesia karena mencakup tiga dari empat variabel kepentingan nasional. Pertama, dari sisi keamanan nasional, ada masalah penjagaan integritas wilayah nasional yang cukup sensitif. Bagi kaum realisme politik internasional, masalah keamanan nasional semacam ini justru menjadi fokus utama kebijakan negara. Malaysia dalam hal ini seperti berupaya menguji kedaulatan efektif Indonesia atas blok Ambalat. Kedua, ada persoalan citra dan harga diri Indonesia karena perasaan terlecehkan sebagai negara berdaulat dengan manuver angkatan laut Malaysia. Ini berakumulasi dengan kasus sebelumnya yaitu kemenangan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan, pada kasus TKI, dan masalah sosial budaya dimana klaim Malaysia atas Lagu Rasa Sayange, tarian Reog, kain Batik yg seharusnya milik Indonesia. Ketiga ada ancaman bagi kesejahteraan ekonomi karena potensi ekonomi dari minyak Ambalat ditakutkan jatuh ke pihak luar karena secara kasar Ambalat memiliki cadangan migas seharga 40 miliar dolar AS, nilai ini cukup signifikan jika bisa

masuk ke kas negara.³⁰ Dengan ketiga kepentingan nasional tersebut, maka pilihan instrumen politik luar negeri yang tersedia adalah diplomasi atau konfrontasi. Namun diplomasi memiliki beberapa kelebihan. Pertama, pada tataran praktik, secara nyata telah ada upaya diplomasi sejak 2005 yang dijalankan kedua negara untuk menyelesaikan Ambalat dan perundingan Ambalat masih berlangsung. Artinya pilihan penyelesaian diplomatik adalah yang paling rasional meskipun masih tetap harus waspada pada segala aspek.

Penyelesaian pertama melalui komunikasi diplomatik dimulai dengan pembukaan komunikasi diplomatik Indonesia dengan Malaysia dimana Malaysia menanggapi pada 25 Februari 2005 dengan menyampaikan pandangan mereka bahwa wilayah Ambalat adalah teritorial nya. Presiden RI kemudian berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Pembicaraan berlangsung konstruktif untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan Badawi pun akan mengirimkan Menteri Luar Negeri Malaysia untuk mengunjungi Indonesia. Diplomasi memasuki babak baru setelah Menlu Malaysia Syed Hamid Albar bertemu dengan Menlu RI Hasan Wirajuda di Jakarta pada 9 Maret 2005 bahkan diterima oleh Presiden RI. Dalam pertemuan antar Menteri Luar Negeri telah disepakati bahwa kedua belah pihak akan membentuk tim teknis yang akan melakukan perundingan ke arah penyelesaian Blok Ambalat. Pertemuan penyelesaian diplomasi pertama dilakukan pada 22 dan 23 Maret 2005. Pertemuan tim teknis Indonesia-Malaysia dilanjutkan di Langkawi pada 25-26 Mei, di Yogyakarta 25-26 Juli, di Johor Baru pada 27-28 September 2005 dan Desember 2005.

Namun hingga 2006 masalah sengketa Blok Ambalat antara Malaysia dan Indonesia masih dalam proses perundingan oleh kedua negara dan belum ada penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua negara. Dalam pertemuan bilateral antara PM Abdullah Ahmad Badawi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Negara Tri Arga, Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 12-13 Januari 2006 telah disepakati bahwa, sengketa Blok Ambalat akan terus diselesaikan secara perundingan. Kedua, secara moral penyelesaian diplomasi

³⁰ <http://www.suamerdeka.com/smcetak/index.php>, diakses pada 6 April 2012, pukul 21:30 WIB.

lebih dipilih karena diplomasi merupakan instrumen politik luar negeri yang beradab, murah, dan terukur. Konfrontasi dan perang semakin banyak dicibir karena tidak hanya mahal tetapi juga karena efek rusaknya yang sulit terkontrol. Yang menyedihkan adalah analisa bahwa dari sisi Alutsista kita akan kalah. Perintah untuk tidak mengeluarkan tembakan dari kapal perang kita da cukup mengusir kapal Malaysia cukup bijaksana. Alasan lain, Indonesia dan Malaysia adalah tetangga serumpun tergabung dalam ASEAN maka Indonesia dan Malaysia harus menghargai kesepakatan yang sudah disepakati dalam ASEAN.

Pada fase diplomasi, alur penyelesaian diplomatik yang telah disepakati sendiri mencakup dua fase. Fase pertama adalah pembicaraan untuk mengeksplorasi dan mengetahui posisi masing-masing negara atas klaimnya di Blok Ambalat. Fase kedua adalah bagaimana kedua negara bisa menyepakati jalan keluar dari klaim tumpang tindih atas Blok Ambalat. Jalan keluar ini ada tiga alternatif. Satu, negara yang bersengketa tidak menyepakati solusi dan membiarkan permasalahan ini tidak terselesaikan dengan catatan negara yang bersengketa menyepakati suatu status quo. Dua, negara yang bersengketa tidak menyepakati batas, tetapi bersepakat untuk melakukan pengelolaan bersama. Tiga, negara yang bersengketa sepakat untuk membawa sengketa mereka ke forum penyelesaian sengketa. Alur penyelesaian diplomatik yang telah disepakati sendiri mencakup dua fase. Fase pertama adalah pembicaraan untuk mengeksplorasi dan mengetahui posisi masing-masing negara atas klaimnya di Blok Ambalat.

Fase kedua adalah bagaimana kedua negara bisa menyepakati jalan keluar dari konflik atas Blok Ambalat. Jika diplomasi gagal maka krisis bisa kembali terjadi kapan saja. Konfrontasi akan sangat kontra produktif bagi hubungan bilateral, maupun stabilitas regional ASEAN ke depan. Krisis dan konfrontasi juga akan berakibat perluasan spektrum politik luar negeri tidak lagi semata menjadi pembahasan para elite decision makers tetapi meluas merambah ke wilayah keterlibatan publik. Tetapi keterlibatan publik lebih cenderung mengarah kepada ekspresi emosi, kemarahan, sweeping, ajakan berperang, penggalangan relawan dan sebagainya. Padahal sebaiknya keterlibatan itu lebih terarah kepada pernyataan sikap, artikulasi kepentingan, maupaun aksi yang rasional dan terukur. Penyelesaian Ambalat membutuhkan tidak hanya tekad dan upaya diplomasi

bilateral berkelanjutan tetapi juga sikap saling menghormati kedaulatan untuk tidak melakukan provokasi. Selagi diplomasi masih berjalan, provokasi dan pelanggaran teritori tentu berbahaya. Bagi Indonesia, diplomasi juga harus dijaga dengan menunjukkan kewibawaan, kekuatan dan ketegasan.

Dalam menghadapi sengketa dan konflik daerah perbatasan ada beberapa model dan pola yang pernah dan dapat dilakukan untuk mengatasinya seperti dijelaskan dalam pasal 33 piagam PBB tentang hukum Laut International bahwa bila tak bisa diselesaikan secara bilateral, ada pelbagai alternatif, misalnya mediator, arbitrator dan mekanisme regional. Dalam kasus Ambalat, Malaysia dalam hal ini tidak akan menggunakan mekanisme regional ASEAN, karena Malaysia memiliki persoalan dengan semua negara tetangganya seperti Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand mengenai batas laut. Hal yang ditakutkan Malaysia adalah apabila semua anggota ASEAN berpihak pada Indonesia.

Bila perundingan bilateral menemui jalan buntu, bisa dipilih solusi *joint development*, dimana Indonesia termasuk pelopor dalam penggunaan mekanisme itu, Pada 1989, setelah bertahun-tahun menemui jalan buntu, Indonesia sepakat tak membuat garis batas dengan Australia di perbatasan antara Australia dan Indonesia bagian timur. Dimana sebagai gantinya Indonesia menyepakati membuat *joint development* dengan melakukan kerja sama ekonomi di wilayah yang disengketakan. Model *joint development* banyak mendapat pujian dari dunia dan konsep ini akhirnya ditiru negara lain.³¹ Menurut UNCLOS 1982, kondisi geografis Malaysia sebagai negara pantai tidak memberikan hak atas kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Maka, klaim Malaysia atas kawasan ZEE hanya merupakan klaim sepihak. Walaupun secara hukum peningkatan kekuatan militer Malaysia di kawasan ZEE tidak dibenarkan, Malaysia tetap mengusahakan agar klaim tersebut diterima.

³¹ Lihat Meike Mayasari., dalam Jurnal *Persengketaan daerah perbatasan di wilayah Ambalat Kaitannya dengan konsep wawasan nusantara*. hlm 6-7.

Blok Ambalat yang merupakan salah satu kawasan zona terluar perbatasan Indonesia , merupakan suatu sistem yang di dalamnya terlibat berbagai pihak dan kepentingan. Permasalahan politik, ekonomi dan sosial mengenai kehidupan masyarakat, perdagangan lintas batas, penyelundupan tenaga kerja dan sumber daya alam di sekitar zona terluar perbatasan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan keuntungan positif bagi perjuangan mempertahankan kedaulatan RI. Ancaman kedaulatan RI di sekitar zona terluar perbatasan harus ditangani secara komprehensif dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak dari Indonesia.



BAB III

KAPABILITAS MILITER INDONESIA DAN MALAYSIA

Dalil bahwa kapabilitas internal negara membentuk prioritas kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan didukung oleh fakta bahwa persiapan yang dimiliki oleh negara untuk berperang mempengaruhi secara kuat penggunaan kekuatan mereka di kemudian hari. Kapabilitas militer membatasi sebuah pilihan-pilihan kebijakan yang dimiliki oleh suatu negara, mereka bertindak sebagai sebuah faktor penengah pada saat pembuatan keputusan mengenai masalah keamanan yang dilakukan oleh pemimpin nasional negara itu.

Dengan kata lain dapat pula dinyatakan bahwa konsep keamanan adalah konsep yang masih diperdebatkan, yang mempunyai makna berbeda bagi aktor yang berbeda. Hal ini disebabkan makna konsep keamanan makin luas yang didorong dengan meningkatnya interdependensi dan makin kompleksnya jaringan hubungan antar bangsa dalam era globalisasi. Secara tradisional, masalah keamanan difokuskan pada tujuan dan pengendalian kapabilitas militer dalam menghadapi ancaman penggunaan kekerasan bersenjata dan lebih didominasi oleh pendekatan yang bersifat militer

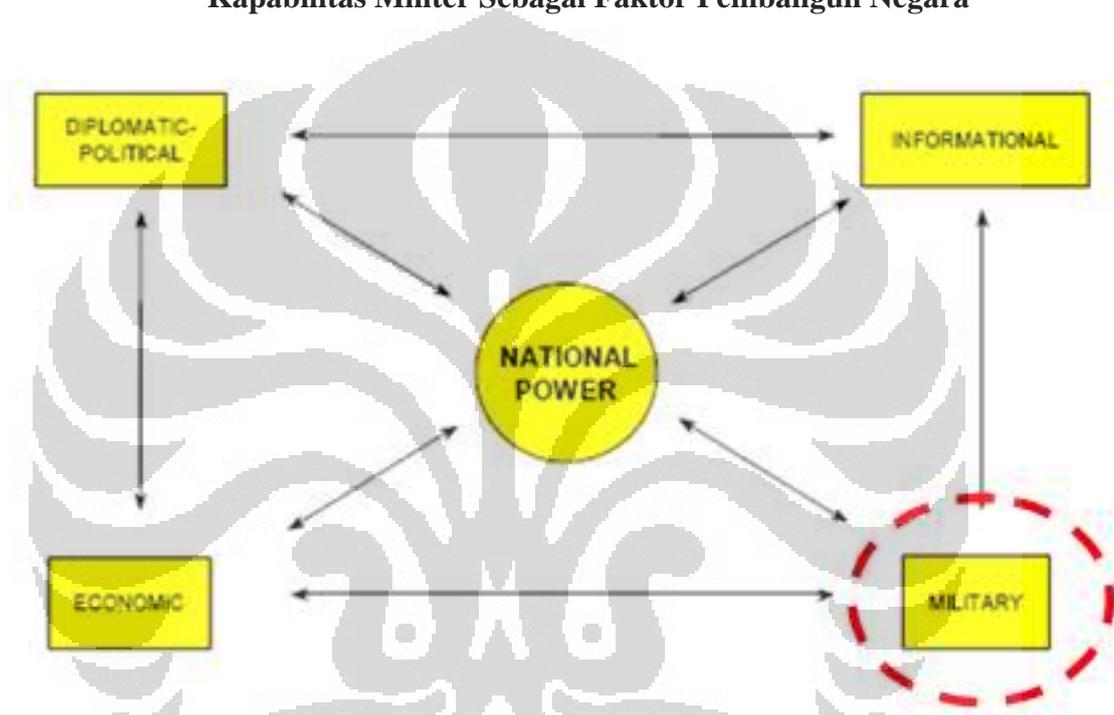
Secara tradisional pemikiran tentang keamanan seringkali dikaitkan dengan tujuan dan pengendalian kapabilitas militer dalam menghadapi ancaman penggunaan kekerasan bersenjata dari negara lain. Sehingga Pendekatan Keamanan secara konvensional lebih didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang berdimensi militer. Tiga elemen penting yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan konsep-konsep keamanan :

- a. pihak yang perlu mendapat jaminan keamanan.
- b. nilai-nilai utama dalam masalah keamanan atau isu-isu yang dapat diangkat menjadi isu keamanan.
- c. bentuk dan sifat ancaman dan pendekatan keamanan yang akan digunakan.

Ketiga unsur ini berkaitan satu sama lain dan saling membutuhkan, militer yang kuat akan menimbulkan efek getar strategis "*deterrence effect*" kepada negara-negara di kawasan sehingga dapat menjadi daya tangkal terhadap ancaman dari luar. Selain itu militer yang kuat dapat mendukung upaya

diplomasi agar memperoleh posisi tawar / *bargaining position* yang memadai dalam setiap penyelesaian suatu konflik antarnegara. Dengan bargaining yang kuat maka secara otomatis militer akan melindungi momentum kemajuan ekonomi dari gangguan pihak luar maupun dalam negeri, terutama dengan cara menciptakan stabilitas dalam negeri serta melindungi aset-aset ekonomi.

Gambar 3.1
Kapabilitas Militer Sebagai Faktor Pembangun Negara



Sumber : Barry Buzan, "People, States, and Fear: The National Security Problem in the Third World," dalam Azar dan Moon, ed. *National Security*, hlm. 15.

Salah satu alat untuk mempertahankan keamanan negara adalah dengan memiliki kapabilitas militer salah satunya adalah senjata yang dapat mempertahankan keamanan suatu negara dari ancaman yang berasal dari luar dan domestik. Namun pergerakan persenjataan ini dapat memicu konflik suatu negara dengan negara lain dimana pergerakan senjata yang bersifat ofensif dapat menyebabkan negara lain atau negara musuh memandang negatif dan mempunyai persepsi bahwa perkembangan persenjataan yang dilakukan negara lain bertujuan untuk perang atau konflik, oleh karena itu peningkatan kapabilitas militer suatu

negara dapat mengakibatkan adanya dinamika persenjataan pada negara yg merasa terintimidasi.

3.1. Klasifikasi Persenjataan

Karena jenis persenjataan sangat beragam dan luas, maka dalam penelitian ini, istilah senjata akan dibatasi pada apa yang sering disebut sebagai sistem senjata utama / *major weapon system* yang dalam istilah TNI dikenal sebagai Alutsista yaitu kependekan dari alat utama sistem senjata. Alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kapabilitas militer suatu negara karena berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk melakukan serangan dan bertahan. Pengukuran alutsista suatu negara dapat dilakukan dengan melihat peralatan yang dimiliki matra serta melihat pengembangan yang dilakukan oleh tiap bidang setiap tahunnya. Pada bagian ini, alat utama sistem persenjataan akan dijelaskan melalui masing-masing bidang, yaitu laut, darat dan udara. Klasifikasi yang dijadikan rujukan untuk melihat klasifikasi persenjataan dalam uraian berikut adalah klasifikasi mengenai sistem senjata utama tersebut, yang diklasifikasikan dalam lima kategori Alutsista

1. Kendaraan lapis baja dan artileri. Kategori ini mencakup semua tipe tank, penghancur tank, kendaraan lapis baja, kendaraan angkut pasukan lapis baja, kendaraan tempur infantri, peluncur roket majemuk, tank dan howitzer yang dengan kaliber sama dengan atau lebih besar dari 100 milimeter.
2. Sistem radar dan pengarah. Kategori ini adalah kategori residual untuk akuisisi elektronik, sistem peluncur dan pengarah yang digelar secara independen dari sistem senjata yang terdaftar dalam kategori senjata lain atau sistem peluncur rudal di atas kapal atau pertahanan titik.
3. Misil. Kategori ini hanya memasukkan misil berpengarah atau biasa kita sebut peluru kendali / rudal.
4. Pesawat. Kategori ini mengecualikan pesawat aerobatik, pesawat intai tidak berawak yang dikendalikan dari jarak jauh), drone dan pesawat luncur.
5. Kapal perang

3.1.1 Klasifikasi Persenjataan dari Angkatan Darat

Klasifikasi Persenjataan

- Tank Tempur Utama / *Main Battle Tank*

Kendaraan tempur baja bersenjata dengan bobot sekurang-kurangnya 16,5 metrik ton tanpa muatan, yang dipersenjatai senjata kaliber paling tidak 75mm dengan kemampuan laras berputar 360 derajat.

- Kendaraan Tempur Lapis Baja / *Armoured Combat Vehicle*.

Kendaraan otomatis dengan proteksi lapis baja dengan kemampuan cross country penjelajah semua medan. ACV meliputi;

Kendaraan Berat Tempur Lapis Baja / *Heavy Armoured Combat Vehicle* yaitu sebuah kendaraan tempur lapis baja dengan bobot lebih dari 6 metrik ton tanpa muatan dengan senjata organik/integral dengan kaliber paling sedikit 75mm .

Kendaraan Tempur Lapis Baja Infanteri / *Armoured Infantry Fighting Vehicle* yaitu kendaraan tempur lapis baja yang dirancang dan dilengkapi untuk mengangkut 1 skuadron infanteri yang disenjatai dengan senjata *Canon organik / integral* dengan kaliber 25mm.

Kendaraan Angkut Pasukan Lapis Baja / *Armoured Personnel Carrier* yaitu kendaraan tempur lapis baja ringan yang dirancang dan dilengkapi untuk mengangkut 1 skuadron infanteri yang disenjatai senjata organik / integral dengan kaliber kurang dari 20mm.

- Artileri / *Artillery*

Senjata dengan kaliber 100mm dan lebih dengan kemampuan menjelajahi target daratan dengan kapasitas tembak utama tidak langsung.

3.1.2 Klasifikasi Persenjataan dari Angkatan Laut

Kategorisasi persenjataan Angkatan Laut didasarkan pada peran operasional, kelayakan senjata, dan daya peluncuran. Kelas kapal diidentifikasi dengan nama kapal pertama. Istilah kapal besar / *ship* mengacu kepada kapal laut dengan kapasitas 1000 ton dan panjang lebih dari 60 meter; Kapal laut / *vessels* dengan kekuatan yang lebih kurang, namun panjangnya 16 meter atau lebih diistilahkan dengan *craft*. Kapal laut yang panjangnya kurang dari 16 meter tidak

diliput. Secara umum, untuk membantu perbandingan antar armada kedua negara dapat digunakan definisi berikut ini.³³

- Kapal Selam / *Submarines*

Semua kapal laut / *vessel* yang dilengkapi untuk operasi militer dan dirancang untuk operasi dibawah permukaan laut. Vessel tersebut dengan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam didaftar secara terpisah dengan nama Kekuatan Nuklir Strategis

- Kapal Tempur Laut Utama / *Principal Surface Combatant*.

Istilah ini meliputi semua kapal laut dengan bobot 1000 ton dan sistem senjata dengan proteksi diri. Semua kapal tersebut diasumsikan memiliki kemampuan anti kapal laut. Mereka terdiri dari: *Aircraft Carrier* yaitu kapal induk/kapal angkut pesawat udara, *Cruiser* yaitu kapal penjelajah, bobot lebih dari 8000 ton, *Destroyer* yaitu kapal penghancur yang memiliki bobot kurang dari 8000 ton, *Frigates* yaitu kapal perusak yang memiliki bobot kurang dari 8000 ton yang secara normal memiliki peran anti kapal selam. Hanya kapal Laut Utama dengan dek penerbangan yang melebihi diatas 2/3 panjang kapal vessel diklasifikasikan sebagai *Aircraft Carriers* dan kapal laut dengan dek penerbangan lebih pendek disebut sebagai *Helicopter Carriers*

- Kapal Tempur Pantai dan Patroli / *Patrol and Coastal Combatants*

Ini meliputi kapal utama dan craft yang peran utamanya adalah melindungi garis pantai dan laut sebuah negara. Diantaraya : Kapal Korvet (Corvettes, 500-1500 ton dengan kapabilitas serang), Missile Craft (Craft berpeluru/rudal, dengan perlengkapan peluncur peluru permanen dan perlengkapan kontrol) dan Torpedo Craft (Craft bertorpedo, dengan torpedo anti kapal laut). Kapal Utama dan Craft yang diluar definisi ini diklasifikasikan sebaga kapal patroli dan dibagi ke dalam offshore/lepas pantai (500 ton), coastal /pantai (75-500 ton), inshore / dalam pantai (kurang dari 75 ton), dan riverine / kapal sungai.

- Kapal Penyapu Ranjau / *Mine Warfare*

Istilah ini meliputi kapal vessel yang tugasnya secara primer meletakkan dan menyapu ranjau. Kapal-kapal tersebut lebih lanjut diklasifikasikan ke dalam offshore, inshore, coastal dan riverine dengan deskripsitonase/bobot yang sama.

³³ *The Military Balance 2000-2001* (London: IISS, 2000), hlm

- Kapal Amfibi / *Amphibious*

Istilah ini meliputi kapal yang secara spesifik dilengkapi untuk mendaratkan pasukan dengan perlengkapannya diatas bibir pantai dengan cara mendaratkan *craft* atau helikopter atau secara langsung mendukung operasi amfibi. Istilah kapal pendarat / *landing ship* mengacu kepada *vessel* yang mampu menjelajahi samudera yang mampu mengirimkan pasukan dan perlengkapan yang siap untuk bertempur. *Vessel* dengan kemampuan amfibi namun tidak diperuntukkan tugas amfibi tidak dimasukkan.

- Kapal Pendukung dan Lainnya / *Support and Miscellaneous*

Istilah ini mencakup kapal laut militer pembantu. Ia meliputi 4 kategori besar yaitu Kapal Pendukung misalnya tanker dan kapal penyimpanan. Kapal pemeliharaan dan logistik seperti kapal angkutan laut, dan Kapal tujuan khusus misalnya kapal tugas intelejen kapal survei dan riset

3.1.3 Klasifikasi Persenjataan dari Angkatan Udara

Istilah Pesawat Tempur / *Combat Aircraft* mengacu kepada pesawat udara yang secara normal dilengkapi untuk membawa peluru udara ke udara atau udara ke darat. Pesawat tempur tadi meliputi pesawat dalam unit konvensi operasional yang peran utamanya adalah pelatihan senjata dan pesawat pelatih dengan tipe yang sama seperti adadi dalam *squadron* lini depan yang diasumsikan tersedia untuk operasi dengan peringatansingkat. Pesawat latih dianggap sebagai pesawat yang mampu bertempur karena dilengkapi dengan peralatan. Pesawat maritim bersenjata dimasukkan dalam total pesawat tempur. Kekuatan pesawat *squadron* bervariasi dengan tipe pesawatnya dan berbeda-beda antar negara. Negara yang berbeda kerap kali menggunakan pesawat dasar yang sama dengan peran yang berbeda, kunci untuk menentukan peran-peran ini terletak pada pelatihan awak nya.³⁴

³⁴ *The Military Balanc, loc.cit.*, hlm. 8-9.

A. Pesawat Udara Wing Tetap / *Fixed Wing Aircraft*

- Penyerang Tempur / *Fighter*

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pesawat udara dengan senjata, kapasitas performa, dan avionik untuk tempur udara. Pesawat udara multi peran digambarkan sebagai fighter ground attack (FGA), Fighter, Recce dan seterusnya, atas dasar peranan masing-masing.

- Pembom / *Bombers*

Pesawat ini dikategorisasikan menurut jelajah dan kapasitas angkut atau muatan sebagai berikut, Long-range (jelajah jarak jauh), mampu mengangkut senjata lebih dari 10.000 kg berat diatas radius tanpa pengisian ulang bahan bakar lebih dari 5000 km; Medium Range (jelajah menengah), mampu mengangkut senjata lebih dari 10.000 kg diatas radius tanpa pengisian ulang bahan bakar dengan jarak antara 1000-5000km; Short-Range (jelajah dekat), mampu membawa senjata lebih dari 10.000 kg diatas radius tanpa pengisian ulang bahan bakar dengan jelajah kurang dari 1000 km. Sejumlah Pembom dengan radius yang digambarkan diatas tadi, namun dirancang untuk membawa beban kurang dari 10.000 kg, dan yang tidak masuk dalam kategori FGA, dideskripsikan sebagai Pembom Ringan / *Light Bomber*

B. Helikopter

- Helikopter Bersenjata / *Armed Helicopter*

Istilah ini digunakan untuk meliputi Helikopter yang dilengkapi untuk mengangkut peluru atau senjata, yang meliputi pesawat antikapal selam / *anti-submarine warfare*. Helikopter tersebut lebih lanjut didefinisikan sebagai berikut ; Helikopter Serang / *Attack*, dengan kontrol tembak terintegrasi dan sistem bidikan, yang dirancang untuk membawa senjata anti baja, senjata udara ke darat atau senjata udara-ke-udara;

Helikopter pendukung tempur / *combat support*, dilengkapi dengan intai area atau senjata beladiri, namun tanpa kontrol tembak terintegrasi dan sistem bidikan;

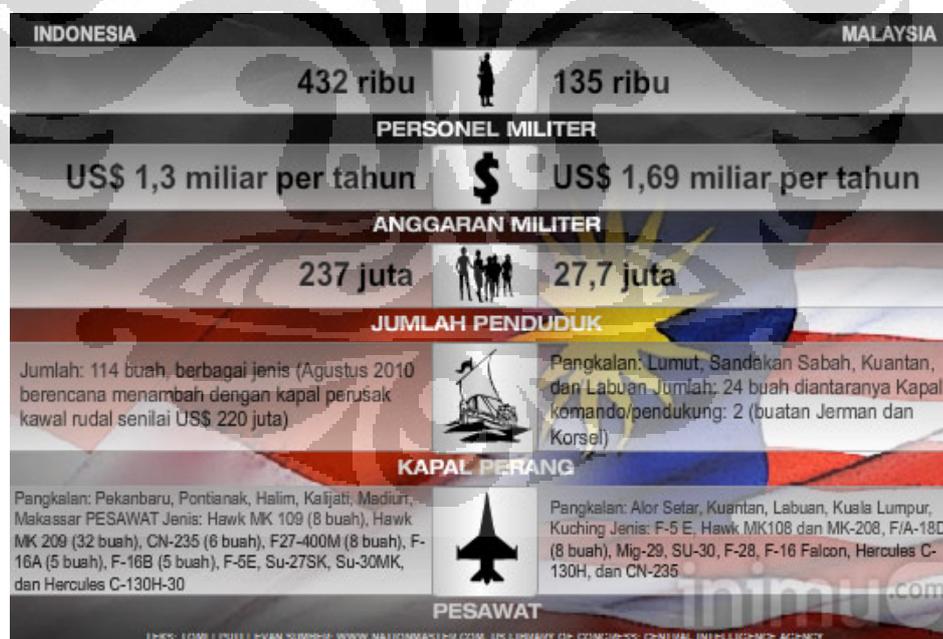
Helikopter Penyerang / *Assault Helicopter*, dirancang untuk mengangkut pasukan kemedan perang.

- Helikopter Angkut / *Transport Helicopter*

Istilah tersebut menggambarkan hel tak bersenjata yang dirancang untuk mengangkut pasukan atau kargo untuk mendukung operasi militer.

Dari uraian pada bab sebelumnya, selama periode tahun 2006-2010 terdapat sejumlah program pembangunan kekuatan militer yang dilaksanakan Indonesia dan Malaysia, yang terlihat dari segi besarnya anggaran pertahanan dan program-program pembelian alutsista dari sejumlah negara lain. Apakah pembangunan kekuatan didorong oleh adanya perasaan terancam / *security dilemma* oleh satu Negara terhadap Negara lain dikarenakan adanya masalah-masalah perbatasan sebagai eksis dari pertumbuhan ekonomi yang pesat, sebatas modernisasi menggantikan alutsista lama yang telah ketinggalan teknologinya, ataukah pembangunan kekuatan militer kedua Negara dapat dikategorikan sebagai perlombaan senjata.

Gambar 3.2
Beberapa Aspek yang Mempengaruhi Kapabilitas Militer Indonesia - Malaysia



Sumber : http://nationmaster.com/central_intelligence_agency

3.2. Perkembangan Kapabilitas Militer Malaysia

Pemerintah Malaysia memandang penting aspek penguasaan wilayah dalam rangka melindungi kedaulatan negara atas wilayahnya sampai ke garis perbatasan pulau terluar. Sebagaimana telah tercatat dalam sejarah, kemenangan Malaysia atas Indonesia dalam kasus Pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2002 membuktikan bahwa penguasaan secara fisik terhadap wilayah yang disengketakan merupakan faktor penting untuk memenangkan konflik Ambalat secara hukum di Mahkamah Internasional. Penempatan pangkalan militer di wilayah blok Ambalat yang disengketakan memberikan keuntungan taktis sebagai faktor pengantar bagi Indonesia yang ingin mempersengketakan wilayah tersebut. Sedangkan pembangunan obyek wisata di Pulau Sipadan yang mengundang minat wisatawan asing di samping memberikan keuntungan secara finansial juga secara politis dapat membangun opini masyarakat internasional bahwa kawasan Blok Ambalat adalah benar-benar milik Malaysia. Opini masyarakat internasional ini penting untuk memperkuat diplomasi apabila sengketa blok Ambalat ini dibawa ke Mahkamah Internasional.

Pada awal tahun 2000 Tentera Darat Malaysia (TDM), mulai bangkit dan memulai proses modernisasi alutsista. Diawali dengan pembentukan resimen *Main Battle Tank* melalui pembelian 48 unit *PT-91M MBT* buatan Polandia yang merupakan varian terbaru dari modifikasi tank *T-72* Rusia. Mereka juga membeli 28 unit *South African G5 Mk III 155 mm howitzers* ditambah 36 unit *Astros II MLRS* dari Brazil (baru 50% yang tiba) dalam rangka modernisasi persenjataan resimen armed. Dari data pembelian senjata, saat ini resimen armed Malaysia tercatat mempunyai 4 macam jenis senjata armed, termasuk diantaranya alutsista baru rudal *Astros II* dan Meriam *155 mm G5 Mk III*. Selain itu persenjataan mereka merupakan jenis meriam lama yakni 200 unit *OTO-Melara 105 mm Mod 56* (jenis *pack howitzer*) buatan Italia dan 75 unit *VSEL FH-70 155 mm Howitzers* buatan Inggris.

Pengerahan Angkatan Tentara Malaysia di Blok Ambalat merupakan salah satu pencerminan dari program pembangunan pertahanan Malaysia yang dimana persiapan strategis Malaysia untuk menggelar pasukannya merupakan wujud keberhasilan program Sixth Malaysia Plan saat Malaysia mengalokasikan US\$2,4

Universitas Indonesia

miliar untuk pemenuhan kebutuhan pertahanan. Pengeluaran belanja militer di periode ini meliputi pembelian 8 F/A-18 Hornet serta 18 MiG-29 Fulcrum. Di periode ini, Malaysia juga membelanjakan US\$159 juta untuk pembelian radar pertahanan udara serta pembangunan fasilitas-fasilitas Angkatan Laut. Program tersebut dilanjutkan dalam Seventh Malaysia Plan dimana program lanjutan ini diarahkan untuk mengubah titik berat strategi pertahanan Malaysia dari counter-guerilla dan counter-insurgency ke arah pembentukan Tentera Malaysia modern. Hal ini ditandai dengan transformasi AD Malaysia menjadi Rapid Deployment Force (RDF) yang dilengkapi dengan peralatan tempur darat, seperti 300 tank tempur utama (T-72, T90, dan T-80 (Rusia); Mk3M (Inggris) Leopard IA5 (Jerman), dan K1A1 (Korea Selatan). Untuk mendukung pembentukan RDF, Angkatan Udara Malaysia diperkuat dengan pembelian sistem pertahanan rudal, 30 helikopter tempur, 16-18 pesawat tempur baru seperti F/A-18E/F Super Hornet, atau Su-30MKM dan MiG-29MRCA. Angkatan Laut Malaysia juga sedang berbenah dengan rencana pembelian senilai US\$2,2 miliar untuk 27 kapal perang beragam jenis untuk melengkapi 56 kapal perang yang saat ini telah dimiliki Malaysia. Malaysia juga sedang membangun 15 pangkalan laut baru. Pangkalan terbesar yang akan dibangun berada di Teluk Sepanggar yang berlokasi 25 km dari Kota Kinabalu Sabah yang akan berfungsi sebagai Markas Komando Armada Angkatan Laut Malaysia.³⁵

Peningkatan kapabilitas militer Malaysia yang mencolok terlihat pada saat kasus Sipadan dan Ligitan bergulir, dimulai pada awal 2000-an Malaysia memiliki fokus khusus dalam inovasi militer dan perkembangan kapabilitas militer negaranya dimana menurut Gilpin mengatakan bahwa inovasi militer merupakan aspek penting dalam stabilitas. Menurut Gilpin jika inovasi militer lebih kepada strategi ofensif maka ini akan menyebabkan negara yang melakukan strategi ofensif ini menjadi dominan di kawasan dan akan merubah semua sistem dikawasan. Dengan ini maka jika inovasi militer lebih bersifat ofensif maka ini akan membuat sistem menjadi tidak stabil dan kecenderungan untuk menjadi negara ekspansi terlihat dengan jelas, lain hal dengan inovasi militer yang bersifat defensif ini akan

³⁵ <http://www.army.mod.gov.my/militaryjournal>. diakses pada 26 januari 2012, pukul 19:38 WIB.

membuat sistem menjadi stabil dan menjaga status quo teritorial di kawasan. Hal inilah yang diinginkan oleh Malaysia untuk menjadi dominan di kawasan perairan yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga nya yg dalam kasus Ambalat ini dengan Indonesia di zona perairan blok Ambalat.

3.2.1 Kekuatan Angkatan Darat Malaysia

Dari segi kekuatan dan jumlah personil kekuatan angkatan darat Malaysia lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia, hal ini disebabkan karena jumlah populasi di Malaysia jauh lebih sedikit daripada Indonesia. Fokus kekuatan militer Malaysia memang lebih di titik beratkan pada sektor laut dan udara. Kekuatan tempur Angkatan Darat Malaysia mengalami sedikit pengecilan dari segi keanggotaan semenjak awal dekade 2000-an. Anggaran pembelanjaan pertahanan negara pada tahun 2005 juga mengalami penurunan hingga 20 persen. Pusat kekuatan Angkatan darat Malaysia memiliki empat divisi infanteri dibawah pemerintahan yang disebut Markas Medan Tentara Darat yang memiliki sekitar. 48 000 anggota angkatan darat.

Angkatan Darat Malaysia pada tahun 2006 memiliki kapabilitas sekitar 105.000 anggota tetap dan sekitar 40 000 anggota tidak tetap. Angkatan Darat Malaysia juga tidak mempunyai kelebihan yang yang nampak dibandingkan kapabilitas tentara Indonesia hal ini dikarenakan penitik beratan Malaysia pada sektor laut dan udara sementara Indonesia sebaliknya menitik beratkan pada sektor angkatan darat padahal Indoneisa adalah negara maritim. Pada saat konflik Ambalat mencuat, Angkatan Darat Malaysia membeli senjata baru yang canggih seperti pembelian 68 unit tank dan bekerjasama dengan Rusia, AS, Perancis untuk pembelian peralatan persenjataan berikutnya, yang nantinya pada tahun 2015 memiliki target sebesar 1600 kendaraan perang darat.

3.2.2. Kekuatan Angkatan Laut Malaysia

Angkatan Laut Malaysia merupakan angkatan laut terbesar ke-3 di kawasan Asia Tenggara. Angkatan Laut Malaysia memiliki tanggung jawab atas operasi dan pertahanan maritim Malaysia. Tugas dan fungsi pokok Angkatan Laut Malaysia adalah menjaga perairan pantai dan teritorial, kepentingan strategis, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), pulau-pulau teritorial, dan melawan tindak

kejahatan di laut. Wilayah maritim Malaysia yang menjadi tanggung jawab TLDM adalah seluas 603.210 km² dimana luas ini hampir dua kali lipat luas daratan Malaysia yang seluas 329.860 km². Dengan kekuatan yang ada pada saat ini, Angkatan Laut Malaysia masih memerlukan penambahan armada kapal dan perlengkapan militer lainnya serta peningkatan sistem berteknologi mutakhir hingga mampu mencapai kondisi terbaik. Untuk meningkatkan kesiagaan armada laut, terutama akses ke Samudera Hindia, Angkatan Laut Malaysia membangun sebuah pangkalan Angkatan Laut Malaysia baru di Pulau Langkawi, Kedah. Sementara untuk kesiapsediaan akses ke Samudera Pasifik, armada laut Angkatan Laut Malaysia menggunakan pangkalan yang berada di Semporna, Sabah. Saat ini, kedua kapal selam TLDM tersebut ditempatkan di pangkalan Angkatan Laut Malaysia Teluk Sepanggar untuk mengawasi wilayah perairan Malaysia di Selat Melaka, Laut China Selatan, Laut Sulu, dan Laut Sulawesi yang merupakan daerah perairan blok Ambalat.

Kapabilitas Militer Angkatan Laut Malaysia semenjak tahun 2005 terus berinovasi dan memiliki beberapa kelengkapan persenjataan laut sebagai berikut.

Kapal Selam Kelas Scorpene

1. KD Tunku Abdul Rahman, diserahkan secara resmi kepada TLDM pada 3 Februari 2009 di Toulouse, Prancis
2. KD Tun Abdul Razak, diserahkan secara resmi kepada TLDM pada 5 November 2009 di Cartagena, Spanyol

Kapal Selam

1. KD Jebat
2. KD Lekiu
3. KD Kasturi
4. KD Lekir
5. KD Laksamana Hang Nadim
6. KD Laksamana Tun Abdul Jamil
7. KD Laksamana Mohammad Amin
8. KD Laksamana Tan Pasmah

Kapal Patroli Lepas Pantai (OPV - Offshore Patrol Vessel)

1. KD Kedah (berdinas mulai 25 September 2003)
2. KD Pahang (berdinas mulai 25 Maret 2004)
3. KD Perak (berdinas mulai 12 November 2007)
4. KD Terengganu (diluncurkan 6 Desember 2007, belum berdinas)
5. KD Kelantan (diluncurkan 24 November 2008, belum berdinas)
6. KD Selangor (diluncurkan 23 Juli 2009, belum berdinas)

Kapal Tempur / Kapal Serang Cepat

1. KD Perdana (dipersenjatai rudal)
2. KD Serang
3. KD Ganas
4. KD Ganyang (dipersenjatai rudal)
5. KD Jerong
6. KD Todak
7. KD Paus
8. KD Yu
9. KD Baung
10. KD Pari
11. KD Handalan (dipersenjatai rudal)
12. KD Perkasa (dipersenjatai rudal)
13. Pendekar (dipersenjatai rudal)
14. KD Gempita (dipersenjatai rudal)

Kapal Penyapu Ranjau (Mine Countermeasures Vessel)

1. KD Mahamiru
2. KD Jerai
3. KD Ledang
4. KD Kinabalu

Kapal Pendukung

1. KDSri Indera Sakti (1503)
2. KD Sri Indera Sakti
3. KD Mahawangsa
4. MV Bunga Mas Lima

5. MV Mahsuri
6. KTD Sotong
7. KTD Kepah
8. KLD Tunas Samudera
9. STS Puteri Mahsuri

Kapal Patroli Lepas Pantai

1. KD Musytari
2. KD Marikh
3. KD Lembing
4. KD Sri Malaka.³⁶

3.2.3. Kekuatan Angkatan Udara Malaysia

Kekuatan Angkatan Udara Malaysia mulai berkembang pesat dan menjadi salah satu fokus utama militer Malaysia. Dimulai pada tahun 2003 ditandatangani perjanjian pembelian 18 unit pesawat tempur taktis Sukhoi Su-30MKM dengan jadwal pengiriman mulai tahun 2007 untuk memenuhi kebutuhan peran satuan pesawat tempur multi peran atau *ulti-role combat aircraft* (MRCA). Kontrak pembelian Sukhoi Su-30 ini sebesar 900 jutadollar AS dengan sebagian pembayarannya diwujudkan dalam bentuk komoditi. Sukhoi Su-30 milik Angkatan Udara Malaysia ditempatkan di pangkalan baru Angkatan Udara Malaysia di Gong Kedak, Kelantan. Pada 8 Desember 2006 Malaysia telah menandatangani kontrak pemesanan 8 unit pesawat angkut Airbus A400M. Pada akhir tahun 2006 Pemerintah Malaysia menandatangani kontrak pembelian 8 unit pesawat Aermacchi MB339AM untuk menambah pesawat sejenis yang telah ada sebelumnya. Pada Maret 2007, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Malaysia, Najib Tun Razak, mengumumkan kepada publik bahwa masa dinas aktif pesawat tempur MiG-29 dalam jajaran Angkatan Udara Malaysia akan tetap dipertahankan hingga tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama, Najib Tun Razak juga mengumumkan bahwa helikopter Nuri (Sikorsky S-61A-4) akan dinon-aktifkan mulai tahun 2012 dan akan digantikan oleh helikopter Eurocopter EC725. Pihak Malaysia menyatakan pada media usai

³⁶ http://www.army.mod.gov.my/navy_2006, diakses pada 26 Januari 2012, pukul 23:55 WIB.

membuka acara Heli-Asia 2007, bahwa tender pengadaan helikopter pengganti Sikorsky S-61A-4 akan dimulai awal Juli 2008.³⁷

Pada masa 2000-2006 Angkatan Udara Malaysia memiliki 18 pesawat Sukhoi-30MKM yang memiliki kecanggihan yang sama dengan Sukhoi-30MKI yang dimiliki oleh India. Sukhoi-30MKM ini bisa dikatakan adalah salah satu pesawat terbaik saat ini. Pesawat ini tentunya lebih baik dari sebagian pesawat Sukhoi Indonesia, seperti Su-27 SK dan Su-30MK. Dengan jumlah pesawat Su-30MKM sebanyak 18 pesawat tentunya itu merupakan sebuah kekuatan yang cukup menggentarkan. Selain itu, kekuatan Angkatan Udara Malaysia masih di topang oleh kehadiran 8 pesawat F-18 Hornet dan juga 14 pesawat Mig-29. Kedua pesawat ini canggih dan disegani serta memberikan efek gentar yang cukup memadai. Keberadaan Mig-29 ini mungkin tidak semua dari 14 pesawat yang masih di operasikan tetapi tetap saja ini cukup memberikan penambahan kekuatan. Kekuatan ini juga masih di topang oleh kehadiran sekitar 16 F-5 E/F dan 13 Hawk-208 sebagai Third Class Fighter di Angkatan Udara Malaysia. Selain itu pesawat ini pun dilengkapi oleh rudal rudal yang cukup mumpuni. Tercatat ada beberapa jenis rudal yang dimiliki yaitu AIM-120C5 dan juga AIM-7 Sparrow yang bisa ditembakkan dari F-18 Hornet. Sedangkan untuk jet Su-30MKM dan Mig-29 dilengkapi dengan rudal-rudal R-73 dan juga R-77. Kehadiran rudal-rudal ini memberikan nilai tambah yang sangat besar di Angkatan Udara Malaysia. Namun, saat ini Angkatan Udara Malaysia belum dilengkapi dengan pesawat peringatan dini yang bisa membantu jet tempur dalam operasinya untuk meningkatkan daya tangkalnya. Namun Malaysia sudah berencana untuk membeli pesawat jenis ini.

³⁷ <http://www.army.mod.gov.my/airforce> 2006, diakses pada 6 februari 2012, pukul 22:15 WIB.

Gambar 3.3
Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia-Malaysia (Ranking Dunia)

Armed Forces of the World																
Country	Rnk	Land Power	Tot Qual	Tot Pop	GDP	Act Men	Mil Bud	Bud Man	AFV	Air Cmbt	Ldrs	Eqp	Exp	Spt	Mob	Trad
East Asian Nations																
China	1	2757	32	1300	\$3500	2100	\$55000	\$26	13000	2600	6	5	5	6	4	6
Korea, South	2	920	39	49	\$990	680	\$28000	\$41	6700	620	6	6	6	5	4	5
Korea, North	3	688	19	23	\$12	1100	\$900	\$1	5500	600	5	4	3	3	5	4
Japan	4	523	73	127	\$4700	240	\$48000	\$200	1850	440	6	8	6	8	8	7
Taiwan	5	449	41	24	\$390	290	\$10000	\$34	2900	480	6	6	6	6	5	5
Vietnam	6	327	22	85	\$75	450	\$3700	\$8	2600	230	5	4	5	4	3	6
Indonesia	7	199	16	235	\$450	300	\$4000	\$13	930	95	5	3	6	4	3	5
Australia	8	172	52	20.5	\$1100	51	\$20000	\$392	1200	140	8	7	7	5	4	7
Thailand	9	156	12	65	\$250	300	\$3400	\$11	1800	170	5	3	5	2	3	3
Singapore	10	142	40	4.5	\$160	72	\$7500	\$104	2100	110	7	7	6	4	3	3
Malaysia	11	112	25	26	\$201	109	\$4000	\$37	1600	70	6	5	5	3	3	4
Philippines	12	100	20	92	\$160	107	\$1200	\$11	520	55	6	4	7	3	2	4
Cambodia	13	39	12	14.5	\$35	122	\$9000	\$74	430	20	4	3	5	3	1	4
New Zealand	14	14	39	4.2	\$140	9	\$2100	\$233	290	6	6	6	6	5	3	6
Laos	15	11	6	6.7	\$5	28	\$15	\$1	55	24	5	2	5	2	1	2
Mongolia	16	6	10	3	\$3.5	8	\$22	\$3	900	10	5	3	5	1	2	3

Sumber : <http://www.strategypage.com/fyeo/howtomakewar/databases/armies/ea.asp>

3.3. Perkembangan Kapabilitas Militer Indonesia

Setiap negara pasti ingin menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Demi menjamin keamanan nasional, setiap negara memiliki kekuatan nasional yang didalamnya terdapat kekuatan militer. Unsur militer merupakan faktor penting dalam kekuatan nasional. Kesiapan militer berarti organisasi militer dan struktur yang membantu untuk melanjutkan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Kekuatan sebuah negara dalam konteks militer didasarkan pada kualitas dan kuantitas angkatan bersenjata, dan jenis persenjataan-konvensional, unconventional atau nuklir. Kualitas kepemimpinan militer dan perencanaan juga menambahkan sebagai unsur-unsur militer dari kekuatan nasional. Sementara semua bangsa mungkin memiliki perbedaan persenjataan dalam teknologi peperangan yang menentukan nasib bangsa dan peradaban. Amerika Serikat adalah kekuatan utama karena kesiapan militer, teknologi, dan kualitas dan kuantitas manusia dan senjata. Militer dalam UU TNI tahun 2004 pasal 1 ayat 20 adalah: "Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Universitas Indonesia

Sebelum adanya konflik Ambalat di tahun 2005, bisa dikatakan hampir tidak adanya proses modernisasi alutsista TNI secara keseluruhan dan tidak adanya peningkatan kapabilitas militer Indonesia yang disebabkan oleh faktor internal dari Indonesia yang pada saat itu lebih memfokuskan sebagian besar anggaran untuk sektor ekonomi. Sehingga pada saat konflik Ambalat mencuat di tahun 2005, kekuatan militer Indonesia dapat dikatakan tertinggal dari Malaysia. Atas dasar peristiwa inilah, Indonesia melakukan upaya Modernisasi TNI baik Angkatan darat, Udara dan Laut. Adanya kewaspadaan dari pihak Indonesia bahwa pada suatu saat nanti akan adanya kemungkinan terjadi lagi konflik seperti Ambalat dan bahkan yang lebih buruk. Untuk menanggapi hal itu harus di persiapkan segala kesiapan untuk menghadapinya. Berkaca dari lemahnya militer Indonesia ketika itu membuat pemerintah Indonesia mengadakan program MEF (*Minimum Essential Force*) yang bertujuan melakukan modernisasi militer yang jauh lebih besar dari beberapa periode sebelumnya. Hal ini dilakukan supaya Malaysia tidak lagi menganggap remeh TNI dan melakukan provokasi di wilayah Indonesia. Dengan semakin banyaknya penambahan dan peremajaan alutsista TNI di semua matra, membuat Negara tetangga itu berpikir ulang jika mau membuat provokasi mengenai Ambalat lagi.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok itu dibagi dua yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Dalam tingkat strategis, isu politik, ekonomi, dan tindakan ilegal lintas negara, memiliki jangkauan wilayah nasional, regional, serta global, dan isu tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keamanan nasional, regional, dan global. Isu politik, ekonomi, dan keamanan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, selanjutnya isu tersebut akan selalu menjadi perhatian masyarakat internasional karena akan menyangkut pada kepentingan nasional masing-masing negara.

3.3.1 Kekuatan Angkatan Darat Indonesia

Angkatan Darat Indonesia disebut juga TNI-AD memiliki jumlah Personil 350.000 orang Prajurit aktif serta 80.000 orang prajurit cadangan, dan memiliki perlengkapan sebanyak 460 Tank berat, 1300 tank ringan, 190 Sp Gun, 1500 kendaraan Apc, 200 artileri. Indonesia telah mengalokasikan anggaran cukup besar bagi TNI Angkatan Darat (TNI-AD) untuk melaksanakan modernisasi alat utama sistem senjata, pembangunan TNI AD diarahkan kepada terwujudnya kekuatan maksimum dengan meningkatkan kesiapan operasional satuan, Penguasaan alutsista harus mempunyai kesamaan teknologi dengan AD negara tetangga. Kekuatan Personil TNI-AD memiliki 350.000 Prajurit aktif, 80.000 prajurit cadangan dan dilengkapi oleh 460 Tank berat, 1300 tank ringan, 190 Sp Gun, 1500 kendaraan Apc, 200 artileri Infanteri TNI-AD dikenal di dunia dan merupakan salah satu tentara yang tertangguh di medan pertempuran, terdiri atas Kopassus, 5000 personil, Raider 10 batalyon, Sat-81 Gultor (Pasukan elite Anti teror) Bagian dari pasukan Kopassus yang secara khusus menangani anti teror, kostrad, 40.000 personil, 2 divisi, memiliki tugas mensupervisi kesiapan operasional semua komando dan melaksanakan operasi pertahanan dan keamanan nasional berdasarkan perintah dari panglima TNI. Peralatan yang digunakan lebih lengkap dibandingkan dengan infanteri biasa, Setiap divisi memiliki beberapa brigade lintas udara dan infanteri. Disamping itu, Kostrad sendiri memiliki brigade lintas udara yang terpisah, satu brigade kavaleri, dua resimen artileri, dan beberapa unit bantuan tempur.

3.3.2. Kekuatan Angkatan Laut Indonesia

TNI Angkatan Laut (TNI-AL) adalah tentara nasional yang bertanggung jawab memelihara kemanan dan ketahanan Indonesia khususnya di bagian laut/perairan yang menjaganya dengan sistem pangkalan-pangkalan utama dan Pangkalan Angkatan Laut. Nama kapal yang dimiliki TNI-AL selalu dimulai dengan KRI, singkatan dari Kapal Perang Republik Indonesia. Selain itu juga ada kapal yang diawali dengan KAL, singkatan dari Kapal Angkatan Laut. Setiap kapal dipersenjatai dengan salah satu atau lebih dari berbagai macam persenjataan yang tersedia menurut kelasnya, mulai dari senapan mesin 12,7mm, kanon, meriam hingga peluru kendali. Saat ini TNI AL memiliki sekitar 68800 prajurit,

Universitas Indonesia

termasuk di dalamnya 18500 personel marinir dan 1090 penerbangan/personel udara AL. Kekuatan TNI AL secara garis besar sebagai berikut, Kapal Republik Indonesia (KRI) berjumlah 132 kapal, KRI, dibagi menjadi tiga kelompok kekuatan:

A.. Kekuatan Pemukul (Striking Force) terdiri dari 18 KRI yang memiliki persenjataan strategis:

1. 2 kapal selam kelas Cakra.
2. 6 Fregat kelas Ahmad Yani
3. 3 Korvet kelas Fatahillah
4. 4 Korvet kelas SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach)
5. 16 Korvet anti kapal selam kelas Parchim
6. 1 Fregat kelas Ki Hajar Dewantara
7. 4 kapal cepat roket (KCR) kelas Mandau.
8. 2 kapal cepat torpedo (KCT) kelas Ajak.
9. 2 buru ranjau (BR) kelas Pulau Rengat.

B. Kekuatan Patroli (Patrolling Force) berjumlah 46 KRI.

C. Kekuatan Pendukung (Supporting Force) berjumlah 48 KRI, terdiri dari:

1. 8 angkut tank (AT) kelas Teluk Langsa
 2. 4 angkut tank (AT) kelas Teluk Semangka
 3. 2 angkut tank (AT) kelas Teluk Banten
 4. 8 angkut tank (AT) Kelas Frosch
 5. 1 markas (MA) kelas Multatuli
 6. 6 penyapu ranjau (PR) kelas kondor
 7. 5 bantuan cair minyak (BCM)
 8. 1 bengkel apung (BA) kelas Jayawijaya
 9. 3 bantu tunda (BTD)
 10. 3 bantu umum (BU)
 11. 1 bantu angkut personel (BAP) kelas Tanjung Kambani
 12. 3 bantu hidrooseanografi (BHO) kelas Pulau Rondo
 13. 1 bantu hidrooseanografi (BHO) kelas Dewa Kembar
- Kapal patroli pendukung

Kapal Angkatan Laut (KAL) adalah kapal patroli yang berfungsi untuk mendukung Pangkalan TNI AL (Lanal) dalam melaksanakan tugas-tugas patroli keamanan laut dan tugas-tugas dukungan lainnya.

3.3.3 Kekuatan Angkatan Udara Indonesia

Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU) adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewajiban melaksanakan tugas, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. TNI-AU memiliki anggota sebanyak 18.000 personil aktif, dan memiliki kelengkapan 116 Pesawat Tempur, diantaranya

1. Sukhoi Su27/30SK (14 pesawat) dimana pesawat Sukhoi Su 27/30 SK, adalah pesawat yang paling terbaru dan tercanggih yang dimiliki Indonesia yang dibeli dari Rusia
2. F16 Falcon (10 Pesawat)
3. F5 Tiger (10 Pesawat)
4. Ov10 Bronco (6 Pesawat)
5. Hawk 200 (40 Pesawat), Hawk 100
6. (16 Pesawat)
7. Hawk Mk53 (15 Pesawat)
8. B707 AEW (3 Pesawat)
9. C130 Hercules (30 Pesawat)
10. nc212m-200 (20 Pesawat)
11. CN 235-100 (30 Pesawat)
12. Helikopter PUMA (20 buah)
13. Super Puma (30 buah), dan beberapa pesawat pengintai serta artileri pertahanan udara³⁸.

³⁸ <http://tni-au.mil.id/content/profil-satuan-0.html>, diakses pada 18 Desember 2011, pukul 14:23 WIB.

Angkatan Udara Indonesia pada masa (2006-2010) telah banyak membeli alutsista baru dan mengadakan kerjasama dengan beberapa negara pembuat alutsista. Melihat dari dampak embargo terhadap TNI AU, maka Angkatan Udara Indonesia melakukan beberapa perubahan mendasar dalam melakukan modernisasi keuatannya. Pihak terkait selalu mengedepankan syarat bebas embargo dalam membeli atau mendapatkan alutsista baru. Hal ini memang tidak berjalan mulus sepenuhnya namun setidaknya itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah memiliki strategi untuk menghindari di kemudian hari. Indonesia juga tidak lagi hanya membeli peralatan dari pihak Barat tetapi juga dari Timur.

Gambar 3.4
Peta kekuatan militer indonesia dan malaysia
Berdasarkan World Fact Book (2010)

	INDONESIA	MALAYSIA
Cabang Militer	TNI: (TNI-AD ,TNI-AL,; (Korps Marinir,), TNI-AU, Kommando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas)	Angkatan Tentera Malaysia: Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, (TLDM), Tentera Udara Diraja Malaysia,(TUDM)
SDM Yang Layak untuk tugas militer	Pria : 54,264,299 Wanita: 53,274,361	Pria : 6,247,306 Wanita : 6,175,274
Anggaran Militer	3% dari GDP (Peringkat 42)	2.03% dari GDP (Peringkat 69)
Personel AU	21.000	12.500
Personel AD	297.000	96.000
Personel AL	43.000	12.500
Ekspor senjata konvensional	50.000.000 US \$	277.000.000 US \$

Sumber : <http://www.globalsecurity.org/military/world>

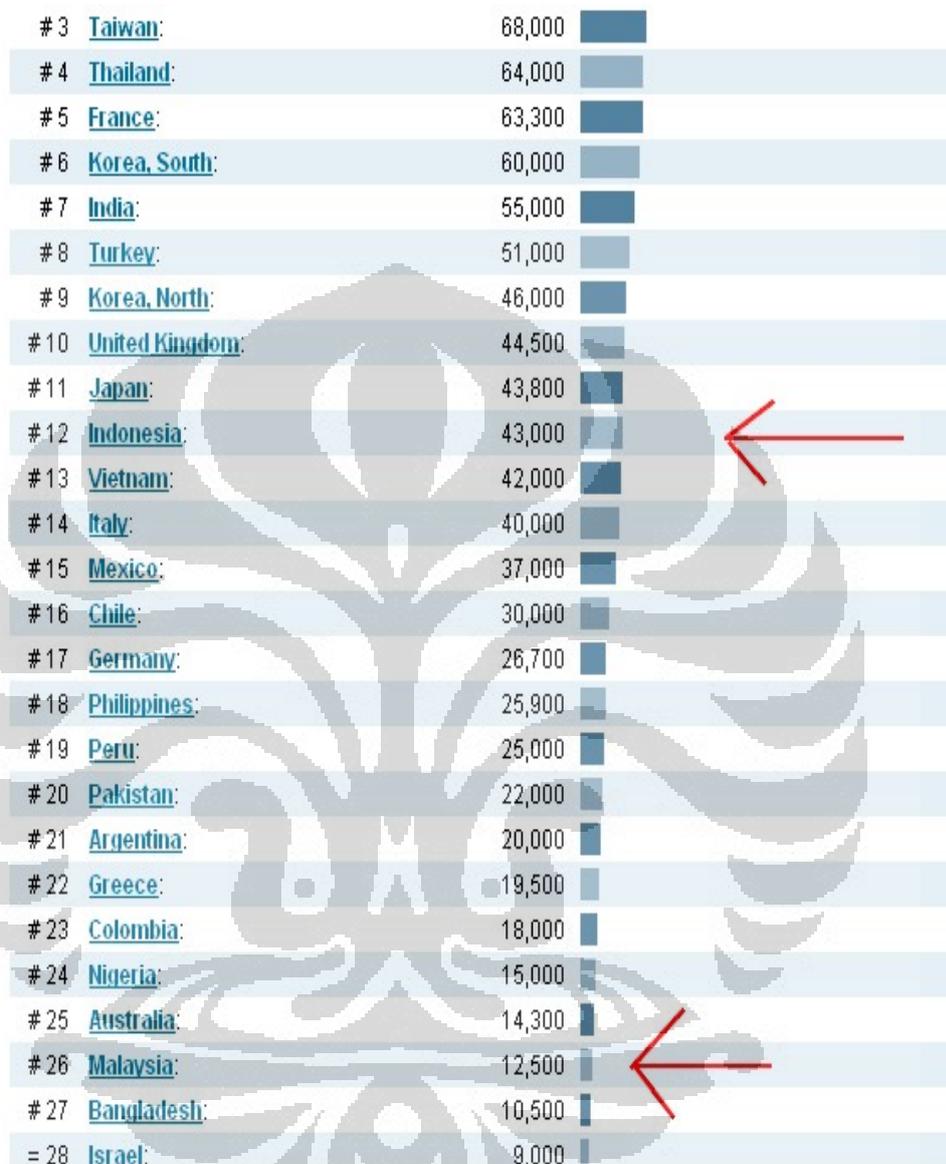
Gambar 3.5
Perbandingan Personil Angkatan Udara Indonesia dan Malaysia



Sumber: *Military Balance 2006-2010*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies

Jumlah personel angkatan udara Indonesia hampir dua kali lipat dari jumlah angkatan laut Malaysia, faktor utama karena luas teritorial udara Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia, tetapi apabila jumlah personel dilihat dari jumlah populasi dan luas negara, daya jangkauan personel angkatan udara Malaysia lebih unggul daripada Indonesia

Gambar 3.6
Perbandingan Personil Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia



Sumber: *Military Balance 2006-2010*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies

Jumlah personel angkatan laut Indonesia hampir empat kali lipat dari jumlah angkatan laut Malaysia, faktor utama karena luas teritorial laut Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia dan mengingat Indonesia adalah negara maritim, tetapi apabila jumlah personel dilihat dari jumlah populasi dan luas teritorial laut, daya jangkau personel angkatan laut Malaysia lebih unggul daripada Indonesia.

Universitas Indonesia

3.4. Deterrence Dalam Kapabilitas Militer Indonesia dan Malaysia

Deterrence berupa ancaman yang bertujuan untuk menghindarkan suatu negara dari agresi negara lain dalam kata lain, *deterrence* adalah bentuk dari persuasi dalam strategi militer. Untuk menyampaikan sebuah ancaman, pengancam konstitusi apa yang dapat digunakan untuk menyerang, dan kemudian menentukan tingkat dari respon apa yang memadai untuk menghalanginya.³⁹ Hal tersebut tergantung pada pendapat *the deterrer* terhadap tujuan dari lawannya serta nilai-nilai yang dianutnya. Bagi suksesnya *deterrence*, ancaman juga harus dapat dipercaya. Agresor yang potensial tidak hanya harus percaya bahwa biaya untuk sebuah penyerangan dapat lebih besar dari keuntungan yang didapat, tetapi juga terdapat kemungkinan yang signifikan bahwa sejumlah biaya harus disiapkan dan dikeluarkan. Penerapan konsep *deterrence* dimana salah satu pihak mencoba untuk mencegah pihak lain untuk melakukan tindakan yang belum dilakukan.⁴⁰

Malaysia mengaplikasikan *general deterrence* yang merupakan strategi jangka panjang yang dimaksudkan untuk membuat negara lain mempertimbangan dengan serius atas segala bentuk ancaman terhadap ketahanan negara. *General deterrence* berjalan setiap waktu, berusaha untuk mencegah negara lain yang mencoba menyerang dengan berbagai cara militer karena konsekuensi yang diinginkan.

Immediate deterrence, sebaliknya diaplikasikan oleh pihak Indonesia yang merupakan suatu tanggapan terhadap yang ancaman yang jelas dan tegas atas kepentingan negara. Ketika *aggressor* mulai menyerang *general deterrence* dinyatakan gagal, tetapi *immediate deterrence* mungkin masih dapat dilakukan untuk meyakinkan *aggressor* untuk menghentikan dan tidak melanjutkan serangan. Kebijakan pembangunan postur pertahanan Indonesia (darat, laut, dan udara) dalam merespon pembangunan militer Malaysia dalam kurun waktu 2006-2010 lebih dimaksudkan untuk mencapai kekuatan pertahanan daripada membangun kekuatan ofensif. Kebijakan tersebut dilakukan mengingat adanya

³⁹ Frank C. Zagare and D. Marc Kilgour, *Perfect Deterrence*, New York: (Cambridge University Press. 2000), hlm. 4.

⁴⁰ Robert Jervis, *Perception and misperception in international politics*, New Jersey: (Princeton University Press 1976), hlm. 76.

persepsi bahwa Malaysia berpotensi untuk mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia.

Deterrence akan dapat berjalan dengan sukses bila kedua belah pihak yang saling berlawanan masing-masing memiliki kapabilitas dan kredibilitas. Kapabilitas disini diartikan sebagai kemampuan untuk melukai atau memberikan ancaman.⁴¹ Sedangkan kredibilitas berarti kemampuan untuk membuat pihak lain percaya bahwa ancaman itu nyata.⁴² Walaupun demikian para ahli *perfect deterrence theory* yakin bahwa diantara kedua aspek tersebut, kapabilitas lah yang memiliki peranan sangat signifikan. Kapabilitas sering kali dilakukan dengan cara memamerkan kekuatan angkatan bersenjata atau pun senjata-senjata mutakhir, sehingga negara lawan dapat melihatnya. Dengan memiliki kapabilitas tersebut, maka strategi *deterrence* akan dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, aspek psikologis meliputi perhitungan biaya konflik dari lawan. Jika pihak lawan menyadari bahwa biaya akibat konflik tidak sebesar dari biaya yang akan timbul bilamana pihaknya menerima serangan tanpa melakukan apa-apa, maka *deterrence* akan gagal.⁴³ Banyak kasus-kasus mengenai gagalnya strategi *deterrence* yang telah terjadi dikarenakan kurangnya *threat capability*. Hal ini membuat *capability* atau kapabilitas menjadi variabel terpenting dalam menentukan sukses atau tidaknya sebuah *deterrence*.

Sebagai strategi, *deterrence* seringkali berbeda dengan membela diri. Fokus selanjutnya lebih kepada kapabilitas militer dibandingkan dengan tujuannya. *Deterrence* berfungsi dengan ancaman akan adanya hukuman, sedangkan *defence* berfungsi dengan menyangkal kemampuan musuh untuk menerima pandangannya saat terjadinya penyerangan. Hal ini dengan munculnya senjata nuklir yang telah membuat perubahan dalam perdamaian. Sebelum munculnya Mutual Assured Destruction (MAD), istilah “*deterrence*” dan “*defence*” berhubungan dengan periode waktu yang berbeda. Sebelum terjadinya penyerangan, kekuatan militer diharuskan untuk menghalangi musuh. Setelah penyerangan, saat *deterrence* gagal, kekuatan militer digunakan secara aktif untuk menahan serangan yang dilakukan musuh.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 295.

⁴² *Ibid.*, hlm. 296.

⁴³ Frank C. Zagare, *The Dynamic of Deterrence*, (University of Chicago Press. 1987), hlm. 291.

Teori Pencegahan dalam pertahanan sangat erat berhubungan dengan keamanan, teori pencegahan ini diartikan dengan mempersenjatai diri atau mengembangkan kemampuan militer untuk mempertahankan diri. Negara yang beranggapan seperti ini terjebak dalam pengertian strategi pencegahan bukannya teori pencegahan itu sendiri. Strategi pencegahan berhubungan dengan postur, kemampuan, ancaman dan bagaimana negara berkomunikasi dengan militer, sedangkan teori pencegahan adalah prinsip dari strategi itu bersumber.⁴⁴

Teori pencegahan saat ini seharusnya menjadi landasan prinsip bagi negara dalam menentukan strategi mengontrol distribusi persenjataan dalam negeri, juga landasan untuk kerjasama dalam strategi militer antar negara, terutama konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang rentan terhadap konflik. Sehingga perubahan paradigma terhadap teori ini yang dari mempersenjatai diri yang berujung pada perlombaan senjata menjadi kerjasama keamanan untuk mencegah terjadinya perang dan dominasi suatu negara atas negara lain di kawasan regional.

Variabel pertama dalam pelaksanaan *deterrence* adalah *Threat Capability* yaitu kemampuan untuk menyebarkan ancaman merupakan variabel terpenting untuk menentukan sukses atau tidaknya sebuah strategi *deterrence*. *Threat capability* sering kali dilakukan dengan cara memamerkan kekuatan militer serta strateginya melalui parade-parade, uji coba senjata, atau latihan bersama. Tujuannya adalah agar negara atau pihak lain dapat melihat kekuatan yang mereka miliki. Provokasi Malaysia dalam hal ini meningkatkan eskalasi di perairan perbatasan antara Indonesia - Malaysia pada Februari 2005 di laut Sulawesi. Hal ini diawali adanya klaim sepihak oleh Malaysia pada tanggal 16 Februari 2005 yang mengumumkan bahwa blok Ambalat merupakan konsesi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Shell dan Petronas (Malaysia) dimana blok tersebut tumpang tindih dengan Blok Ambalat yang dioperasikan oleh Eni Ambalat dan East Ambalat oleh Unocal Ventures (Indonesia). Malaysia menunjukkan kehadiran militernya dengan melanggar wilayah perairan Indonesia yang menurut Malaysia adalah wilayahnya. Ketegangan di perbatasan laut tidak dapat dihindarkan lagi dengan adanya gesekan, saling membayangi, aksi manuver yang

⁴⁴ Patrick Morgan, *Deterrence Now*, Cambridge: (Cambridge University Press. 2003), hlm. 61.

cukup membahayakan dan aksi lainnya. Malaysia meningkatkan usaha klaim dan kehadiran di Ambalat dengan mengerahkan segala potensi maritim, polisi perairan, Tentara Laut Diraja Malaysia, yang menunjukkan secara strategi maritim bahwa Ambalat adalah milik Malaysia. Pada tahun 2009, Malaysia dengan sengaja memamerkan peningkatan kapabilitas militernya dan dipublikasikan sendiri oleh Perdana Menteri Malaysia, padahal peningkatan kapabilitas negara itu seharusnya merupakan bagian yang seharusnya tidak dipublikasikan karena dapat merugikan diri sendiri sebab negara-negara lain akan tahu seberapa besar kapabilitas militer yang dimiliki oleh Malaysia, namun hal itu tidak berlaku apabila Malaysia memang sengaja untuk memamerkan peningkatan atau kemajuan militernya agar pihak Indonesia dapat melihat kekuatan yang Malaysia miliki sekarang dan merasa terancam atas peningkatan kapabilitas militer tersebut.

Threat capability memiliki dua dimensi, yaitu, fisik dan psikologis. Aspek fisik adalah kemampuan untuk melaksanakan ancamannya. Bilamana pihak lawan mengetahui bahwa ancaman yang diberikan hanya merupakan sebuah geretakan, maka *deterrence* dipastikan akan gagal. Begitu pula dengan ancaman yang dapat dengan mudah digagalkan oleh pihak lawan melalui preemptive strike juga disebut tidak memiliki kapabilitas yang memadai.⁴⁵ *Capability*, komitmen yang jelas tidak akan berguna apabila negara tidak mempunyai cara atau sarana untuk menunjukkannya, ketika *deterrence* berputar sekitar menyakinkan aggressor bahwa kerugian dari tindakan tidak sebanding dengan keuntungannya, *defender* harus menyakinkan pula bahwa dia juga memiliki kemampuan untuk membalas. Provokasi Malaysia di Ambalat jalan terus karena Malaysia yakin mempunyai kekuatan militer yang lebih canggih, instrumen militer dan intelegen kuat, diplomasi dan ekonomi yang lebih mendukung, serta dukungan dari negara-negara lain yang tergabung dalam persemakmuran Inggris.

Variabel kedua dalam pelaksanaan *deterrence* adalah Kredibilitas. Dimana Kredibilitas berhubungan dengan kemampuan untuk membuat ancaman menjadi dapat dipercaya. Sebuah ancaman akan dapat dipercaya oleh pihak lawan hanya jika ancaman tersebut dianggap rasional namun dalam beberapa kasus,

⁴⁵ Frank C. Zagare, *The Dynamic of Deterrence*, (University of Chicago Press. 1987) hlm. 292-293.

ketidakadaan *Threat Credibility* justru membantu terjaganya status quo. Indonesia harus menakutkan Malaysia tentang keputusan dan keinginannya untuk menunjukkan komitmennya untuk membalas. Walaupun Indonesia telah menyatakan komitmen dan menunjukkan kemampuannya untuk membalas, *deterrence* masih mungkin mengalami kegagalan jika Malaysia meragukan keinginan Indonesia mengambil resiko perang. Indonesia harus dengan jelas menunjukkan komitmen serta kredibilitasnya untuk mempertahankan kepentingan negaranya, di sisi lain Malaysia harus mengkalkulasikan juga keuntungan atau kerugian dari reaksi timbal balik Indonesia yang dalam hal ini masih sangat rasional bagi Malaysia untuk menyerang.

Sebelum memanasnya konflik Ambalat di tahun 2005, hampir tidak adanya peningkatan kapabilitas militer yang signifikan di Indonesia dan hampir tidak adanya modernisasi alutsista TNI. Pada saat provokasi Malaysia di Ambalat, Indonesia melakukan upaya peningkatan kapabilitas militer salah satunya dengan cara modernisasi TNI baik Angkatan darat, Udara dan Laut. Indonesia memiliki firasat bahwa kasus seperti ambalat yang rentan terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia akan dapat terjadi lagi di kemudian hari, maka Indonesia mempersiapkan segala bentuk kesiapan untuk menghadapinya.

Melihat adanya ancaman berupa gertakan dari Malaysia yang memamerkan peningkatan kapabilitas militernya membuat Indonesia mengambil langkah besar dengan mengadakan program MEF (Minimum Essential Force) yang bertujuan melakukan modernisasi militer Indonesia secara besar-besaran. Hal ini dilakukan supaya Malaysia tidak lagi menganggap remeh TNI dan melakukan provokasi di wilayah Indonesia. Dengan demikian diharapkan bahwa provokasi Malaysia kedepan dapat di kurangi bahkan dihentikan. Dengan semakin banyaknya peningkatan kapabilitas militer di segala bidang (darat, laut, udara) dan modernisasi alutsista TNI di semua bidang dapat membuat Malaysia berpikir ulang jika mau membuat provokasi mengenai Ambalat dan pada daerah perbatasan lainnya.

Pada saat ini yaitu tahun 2012 ini hampir sudah tidak ada lagi provokasi terang-terangan dari Malaysia di Ambalat. Kalaupun ada hanya masalah ringan yang mampu diatasi secara jalur diplomatik. Modernisasi militer yang dilakukan Indonesia mulai tahun 2006 sudah menampakkan hasilnya. Malaysia sadar bahwa militer Indonesia yang mereka hadapi sekarang tidaklah sama dengan Militer Indonesia pada tahun 2005 dahulu diaman pertama kali nya Malaysia melakukan provokasi ambalat dan *Threat capability*. Ketegangan agak mereda setelah adanya usaha perundingan kedua belah pihak dengan cara diplomasi, penurunan ketegangan diantara keduabelah pihak. Namun, sebelum adanya keputusan final dari mahkamah internasional dan disepakati kedua belah pihak maka ketegangan akan tetap ada di perairan Ambalat karena TLDM tetap hadir di perairan Ambalat dan TNI AL dengan segala upaya mengusir kapal perang TLDM untuk keluar dari perairan yang diklaim Indonesia. Provokasi akan terus berlangsung sampai status batas laut kedua negara di perairan ambalat dapat disepakati kedua belah pihak. Indonesia berusaha untuk mempertahankan kedaulatan RI, menggunakan bukti-bukti secara legal tentang pengelolaan dan pemilikan wilayah Ambalat.

Dari keterangan diatas terlihat bahwa *deterrence* bukan merupakan sebuah senjata cadangan. Banyak pihak yang menganggap bahwa strategi nuklir berdasarkan pada konsep ini, dan tidak ada sorang pun yang dapat menjamin kelangsungan perdamaian meskipun dengan mengizinkan para pemimpin politik untuk tidak mempedulikan konteks internasional yang menyebabkan pentingnya *deterrence*. Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan yang memungkinkan terjadinya *deterrence* adalah keadaan dimana ada ketersediaan teknologi yang memungkinkan pengembangan senjata yang efektif untuk menakuti-nakuti lawan. Strategi ini memiliki beberapa tujuan diantaranya untuk memproteksi serangan baik yang dilakukan dengan senjata nuklir maupun senjata konvensional . Keadaan ini tidak terlepas dari *strategi military defence* yang menggunakan pertahanan melalui strategi *deterrence* dan *compellence* yang menggunakan elemen militer maupun non militer.

BAB IV

DINAMIKA PERSENJATAAN MILITER INDONESIA - MALAYSIA

Inovasi militer merupakan aspek penting dalam stabilitas. Inovasi militer lebih kepada strategi ofensif maka ini akan menyebabkan negara yang melakukan strategi ofensif ini menjadi dominan di kawasan dan akan merubah semua sistem dikawasan ⁴⁶. Dengan ini maka jika inovasi militer lebih bersifat ofensif maka ini akan membuat sistem menjadi tidak stabil dan kecenderungan untuk menjadi negara ekspansi terlihat dengan jelas, lain hal dengan inovasi militer yang bersifat defensif ini akan membuat sistem menjadi stabil dan menjaga status quo teritorial di suatu kawasan.

Dalam penelitian ini, inti permasalahan akan dilihat dari perkembangan dinamika persenjataan / *arms dynamic* Indonesia sebagai reaksi dari konflik Ambalat dengan Malaysia dimana di latar belakang dengan adanya konflik perbatasan yang mencuat semenjak tahun 2002 mulai dari sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang akhirnya mencuatkan konflik Ambalat diantara kedua negara. Melihat signifikansi peningkatan atas perkembangan dinamika persenjataan yang terjadi di antara kedua negara . Selanjutnya signifikansi peningkatan diatas akan dilihat kaitannya dengan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan internasional dan domestik, serta dari sejumlah faktor tersebut akan dilihat juga secara kualitatif. Berdasarkan pemaparan ketiga masalah diatas, sebagai kontribusi terhadap para pengambil kebijakan akan dilihat bagaimana dinamika persenjataan antara kedua negara dan khususnya implikasinya terhadap negara Indonesia dan pengaruhnya pada pembangunan kapabilitas militer Indonesia dan pengaruh bagi kemajuan TNI. Sebagai barometer untuk melihat tingkat signifikansi perbandingan dinamika persenjataan, diidentifikasi indikator perbandingan yaitu anggaran pertahanan, pengembangan kekuatan personel militer, dan akuisisi persenjataan. Ketiga indikator ini adalah elemen-elemen dari struktur kekuatan militer yang menjadi tampilan dari postur militer sebuah negara.

⁴⁶ Robert Gilpin, "War and Change in World Politics", Australia: (Cambridge University Press 1981), hlm. 60.

Menurut teori dinamika persenjataan dari Barry Buzan dan Eric Herring, aksi-reaksi akan terjadi jika satu negara meningkatkan kemampuan pertahanan dan persenjataannya. Menurut Buzan, dinamika berupa pembangunan persenjataan juga disebut sebagai rangsangan kepada suatu negara, bahwa persaingan militer antar negara di mana usaha meningkatkan kemampuan pertahanan salah satu pihak akan menimbulkan ancaman baru bagi pihak lain. Buzan memaparkan juga bahwa peningkatan kemampuan sistem persenjataan suatu negara tidak selamanya berlangsung dalam suatu proses kompetisi yang ketat dan tidak selalu dimaksudkan untuk mencapai kemenangan. Tetapi, misalnya bisa saja ditujukan untuk menjadi simbol superioritas suatu negara.⁴⁷

Tentunya, dengan modal kekuatan militer dan senjata, sebuah negara mampu menggertak negara lain, seperti Malaysia yang sudah lebih dulu meningkatkan kapabilitas militernya semenjak tahun 1990 merasa bahwa pada tahun 2000-an kekuatan militernya jauh diatas kekuatan militer Indonesia merasa dapat menggerus dominasi Indonesia, dimulai dengan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang akhirnya dimenangkan oleh Malaysia membuat Malaysia menginginkan hal yang lebih yaitu mempersengketakan blok Ambalat yang diketahui sudah sejak lama adalah milik Indonesia, tetapi Malaysia memiliki klaim bahwa batas garis pantai akan berubah karena Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia.

Dinamika persenjataan dapat berlangsung mengikuti beberapa pola. Salah satunya adalah model aksi reaksi, yang sangat relevan dengan perspektif realis hingga saat ini. Model ini beranggapan bahwa suatu negara memperkuat sistem persenjataan mereka karena anggapan adanya ancaman dari luar. Ancaman luar membuat aktor-aktor negara yang rasional akan selalu berupaya meningkatkan pertahanannya agar terwujud keamanan dan ketahanan negara. Selain itu, dalam dinamika persenjataan juga dikenal adanya *arms build-up* yang meliputi peningkatan belanja militer, anggaran militer, personil militer, dan modernisasi sistem persenjataan. Dalam kasus persengketaan wilayah Ambalat antara Malaysia dan Indonesia ini penulis mencoba memperlihatkan bahwa Indonesia

⁴⁷ Barry Buzan and Herring, *The Arms Dynamic in World Politics*, (London: Macmillan for the International Institute for Strategic Studies 1998), hlm. 79.

memperkuat sistem persenjataan karena melihat peningkatan persenjataan Malaysia, dan mencoba memperlihatkan apakah dengan adanya peningkatan kapabilitas militer suatu negara dapat mempengaruhi negara lain yang bersangkutan. Riset mengenai dinamika persenjataan Indonesia dan Malaysia relevan bila dilihat dari perspektif waktu saat ini, diantaranya mengidentifikasi dan menggambarkan sejumlah faktor penyebabnya dan menganalisis faktor mana yang dianggap paling determinan dari semuanya. Dalam kurun waktu 2006 sampai 2010 mengkaji apakah persengketaan Ambalat mempengaruhi kapabilitas militer kedua belah pihak negara dan merupakan faktor yang dianggap paling mempengaruhi naik dan turunnya dinamika persenjataan. Dilihat dari implikasinya terhadap kekuatan pertahanan Indonesia, realitasnya memang semakin menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan akuisisi dibandingkan sebelum konflik Ambalat meout.

Ada beberapa faktor, baik eksternal maupun internal, yang menjadi penyebab dan secara determinan memotivasi terjadinya kecenderungan pembangunan kekuatan militer dan dinamika persenjataan diantara Indonesia dan Malaysia ini. Terjadinya *arms build-up* di di salah satu negara apapun alasannya kemudian melahirkan adanya *security dilemma* bagi negara yang lainnya. Sengketa Ambalat dipandang sebagai adanya ketidakpastian keamanan sehingga *arms build-up* oleh Indonesia dipandang sebagai suatu hal yang perlu dilakukan. Postur militer yang menjadi pokok kajian penelitian ini adalah terkait dengan pendekatan studi strategis dan keamanan. Oleh karena itu obyek dasar penelitian ini adalah kapabilitas militer yang didalamnya meliputi unsur pembahasan militer, pertahanan, belanja alutsista, jumlah personel militer, dan peralatan militer yang menjadi indikator terjadinya penurunan atau peningkatan dalam suatu pola dinamika persenjataan. Dalam penelitian ini akan membedakan antara apakah peningkatan kemampuan persenjataan suatu negara merupakan bagian dari perlombaan senjata dengan negara lain atau sekedar usaha untuk mempertahankan diri atau bahkan hanya untuk memelihara status quo hubungan keamanan dalam suatu kawasan tertentu serta mengetahui bagaimana usaha salah satu negara untuk meningkatkan kemampuan nasionalnya melalui peningkatan kemampuan militer akan dapat mempengaruhi hubungannya dengan negara lain.

4.1. Dinamika Persenjataan Militer Malaysia

Upaya peningkatan pembangunan kekuatan militer Malaysia sudah lebih dulu dilakukan daripada Indonesia, hal ini dapat terlihat dari anggaran pertahanannya, dimana Malaysia mengalokasikan anggaran pertahanan yang jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Ketika Indonesia masih memiliki persoalan krisis ekonomi, anggaran pertahanan Indonesia hanya mencapai 1,8 milyar dollar AS. Sedangkan Malaysia sendiri, yang relatif secara ekonomi cepat mengatasi krisis ekonomi, dengan langkah pasti mengalokasikan jumlah besar untuk pembangunan kekuatan militer dan pertahanannya dimulai awal tahun 2000-an. Dalam dua tahun berikutnya, anggaran pertahanan kedua negara relatif tidak berubah, dimana Indonesia masih berada di bawah Malaysia.

Pembangunan kekuatan militer oleh Malaysia, dipengaruhi oleh adanya persepsi ancaman dari kekuatan militer yang dimiliki oleh Singapura, yang merupakan bagian dari Malaysia hingga Singapura memisahkan diri pada tahun 1965. Sejak berpisah Singapura, hubungan kedua negara mengalami kenaikan dan penurunan dalam hal bilateral dan keduanya bersaing akan pasar dan investasi asing. Singapura yang dipandang memiliki kekuatan militer terkuat dan terancangh diantara sesama negara ASEAN, secara berlanjut selalu disaingi oleh Malaysia yang berupaya untuk mengejar ketertinggalan dari Singapura, baik dari sisi anggaran pertahanan maupun pembelian persenjataan baru. Dari pihak Indonesia sendiri, pembelian senjata ataupun pembangunan kekuatan militer ditujukan untuk mengurangi jurang perbedaan kapabilitas militer dengan Malaysia.

Malaysia dalam melaksanakan pembangunan kekuatan militer mulai tahun 2000 tidak bersifat ofensif. Dari sisi persepsi ancaman, Indonesia juga tidak ditempatkan sebagai ancaman bagi negara tersebut. Pada awalnya kekuatan militer Indonesia tidak memberikan ancaman bagi Malaysia, tetapi kekuatan militer Singapura yang menjadi faktor dalam memotivasi dilaksanakannya pembangunan kekuatan militer Malaysia. Rasa kecurigaan terhadap Singapura jauh lebih besar dibandingkan kekhawatiran Malaysia terhadap Indonesia yang juga sama memiliki permasalahan sengketa perbatasan darat dan maritim. Memang benar bahwa Malaysia juga mempunyai konflik perbatasan dengan

Universitas Indonesia

Indonesia, namun konflik tersebut bukanlah faktor utama pendorong pembangunan kekuatan militernya, karena kecil kemungkinan konflik dengan Indonesia akan menghasilkan serangan Indonesia ke Malaysia untuk menduduki wilayahnya. Hal itu karena kemampuan militer Indonesia pada waktu itu untuk melakukan serangan terhadap Malaysia terbatas. Sementara konflik dengan Singapura sangat terbuka kemungkinannya diikuti oleh serangan ke wilayah Malaysia.

Seiring dengan kemajuan ekonomi, modernisasi, dan peningkatan kemampuan penangkalan, pembangunan kekuatan militer Malaysia periode tahun 2000-2005 adalah peningkatan jaminan keamanan yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2000, pada awalnya juga tidak diarahkan untuk menciptakan kekuatan bargaining terhadap Indonesia. Malaysia tidak melaksanakan program-program pembelian alutsista karena faktor kecurigaan terhadap Indonesia, mengingat pada saat itu kekuatan militer Indonesia masih berkutat pada permasalahan dalam negeri dan belum memfokuskan pada pembangunan sektor militer.

Tabel 4.1
Kapabilitas Militer Malaysia
(2005-2006)

Faktor Kapabilitas Militer	Jumlah
Personel Angkatan Darat	105.000 + cadangan 40.000
Personel Angkatan Laut	12.500 + cadangan 3500
Personel Angkatan Udara	12.500 + cadangan 4000
Anggaran Belanja Militer	2300 (dalam US\$ Juta)
Ekspor senjata konvensional	277 (dalam US\$ Juta)
Jumlah Penduduk	27,7 juta jiwa

Sumber : The Military Balance The International Institute for Strategic Studies

Pada awal tahun 2000, perbedaan dukungan anggaran pertahanan menyebabkan kekuatan pertahanan Indonesia tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan Malaysia dalam hal kekuatan Alutsista. Kenyataan inilah yang kemudian menarik diamati apakah superioritas Malaysia mempengaruhi sikapnya terhadap Indonesia. Dikaitkan dengan adanya kecenderungan bahwa kekuatan militer suatu negara mempengaruhi perilakunya terhadap lingkungan eksternalnya, maka dapat dikatakan bahwa sampai tingkatan tertentu sikap Malaysia terhadap Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh keunggulan kekuatan pertahanannya. Fenomena ini setidaknya telah terlihat dalam kasus perairan Ambalat, dimana angkatan bersenjata Malaysia berani bersitegang dengan TNI di wilayah perairan Laut Sulawesi tersebut, yang sesungguhnya secara hukum internasional berada di wilayah Indonesia.

Sikap Malaysia yang tidak ragu menggunakan kekuatan militer dan memperlihatkan kapabilitas militernya dalam kasus Ambalat, tentunya tidak akan terjadi bila negara tersebut tidak memiliki keunggulan kekuatan dibandingkan Indonesia. Hal ini terjadi karena biasanya suatu negara yang sadar memiliki kelemahan kekuatan militer cenderung mengedepankan pendekatan diplomasi dalam penyelesaian masalah dengan negara lain. Demikian pula, Malaysia belum tentu akan bersedia mengambil resiko menggelar kekuatan militernya untuk berpatroli di daerah tersebut, tanpa mengetahui kekuatan militer Indonesia. Dalam hal ini kekuatan militer Indonesia tidak memiliki efek daya tangkal yang memadai, sehingga diperkirakan kapabilitas militer Malaysia lebih memiliki kelebihan.

Kemampuan militer Malaysia dikembangkan secara cepat untuk mengantisipasi berbagai klaim teritorialnya. Dalam hal ini Malaysia mengalami konflik kepentingan dengan Indonesia, Philipina, Brunai, Singapura, ditambah klaim di Spratley. Malaysia mengandalkan pada pakta pertahanan anti agresi Indonesia: FPDA. Sejumlah F-18 milik RAAF berada di Butterworth, dekat Penang, bersama dengan dua P3C, mengintai Indonesia, yang dilengkapi kemampuan perang elektronik. Dengan F/A-18D dan ke 28 Hawk Malaysia sudah memiliki kemampuan yang dapat menahan agresi pasukan asing. Dengan dilengkapi dengan Harpoon dan Sea Eagle, TDM merupakan saingan yang tangguh bagi TNI. Belum lagi 18 Mig29 Fulcrum, serta Skyhawks. Dalam

Universitas Indonesia

keadaan embargo senjata seperti sekarang, TNI tidak akan mampu menghadapi TDM. Dua frigate baru-nya (kelas Yarrow Lekiu) dipersenjatai dengan Exocet Block II SSM dan Seawolf SAM. Dua frigate lain dari type FS1500 HDW Jerman yang juga dipersenjatai dengan Exocet. Empat korvet (dua kelas Assad), 14 Fast Attack Craft yang dilengkapi Exocet MM38, dan tentu saja kapal patroli serta kapal pendukung lain. Pembaharuan armadanya direncanakan dalam 20 tahun, melibatkan pengadaan 27 kapal, kelihatannya akan berinti frigate MEKO A100. Rencana pengadaan dua kapal selam telah di buat sejak lama, namun selalu terhenti karena masalah dana. Dua kelas Oberon yang direncanakan mungkin saja sudah diperoleh, hal ini belum jelas, namun pelatihan awak-nya telah dilakukan di India, Australia dan Pakistan. Kapal-kapal Oberon bekas Australia mungkin dengan mudah dapat diperoleh mengingat RAN sedang beralih ke kelas Collins.⁴⁸

Dalam keadaan di embargo, kemampuan militer TNI berada dibawah TDM. Hal ini menjamin pasokan militer yang memadai atas TDM. Walaupun postur militer TDM tidak memungkinkan untuk melakukan agresi ke wilayah RI. Namun dalam keadaan seperti itu konflik militer terbatas di perbatasan atau di daerah yang diperebutkan seperti blok Ambalat dapat dipastikan akan dapat dimenangkan lagi oleh TDM seperti halnya kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Hal ini merupakan potensi ancaman yang serius bagi TNI apabila tidak segera membenahi kapabilitas militernya.

Pembangunan kekuatan militer Malaysia dalam perencanaan nasionalnya tercantum dalam Rencana Malaysia 2001 - 2005, dimana pemerintah Malaysia mengalokasikan dana sebesar RM10.8 milyar untuk sektor keamanan. Besaran dana tersebut akan dialokasikan bagi penguatan kemampuan pertahanan dan peningkatan kemampuan TDM. Pembangunan kekuatan dilakukan antara lain dengan alutista baru serta pembangunan pangkalan militer. Pada 2003, Malaysia menandatangani kontrak pengadaan 18 pesawat tempur Sukoi Su – 30MKM jet fighters dari Rusia senilai US\$ 900 juta. Pesawat Su – 30 MKM akan dilengkapi dengan peralatan avionik buatan Barat. Selain itu, Malaysia juga melakukan

⁴⁸ <http://www.securemalaysia.com/2009/01/home-of-naval-army.html>, diakses pada 16 januari 2012, pukul 21:38 WIB.

perluasan Pangkalan Udara Gong Kedak, Terengganu yang nantinya akan digunakan sebagai pangkalan pesawat Su – 30 MKM, melalui perpanjangan landasan dan pemasangan sistem kendali udara maju. Di samping pesawat tempur, Malaysia pada Desember 2005 memesan empat pesawat angkut Airbus, Eropa. Pesawat angkut ini direncanakan diserahkan pada 2013 guna melengkapi armada angkut Tentara Udara Diraja Malaysia saat ini yang diperkuat oleh C – 130H/T Hercules dan CN – 235 – 220M. Malaysia juga melakukan pembaharuan sistem pertahanan udara dengan Inggris dan Rusia dengan nilai kontrak sebesar 364 Juta Dollar AS.⁴⁹

Angkatan Laut Malaysia melakukan pengadaan enam kapal korvet kelas Meko A-100 (kelas kedah) yang dibangun di galangan Bolhm & Voss, Hamburg, Jerman. Dari enam kapal kelas Meko, dua kapal pertama dirakit di galangan PSC Naval Dockyard, Malaysia dan telah diserahkan pada April dan Agustus 2006. Empat kapal sisanya akan dibangun di galangan BN Shipyards, Malaysia. Kehadiran kapal korvet kelas Meko akan melengkapi armada Tentera Laut Diraja Malaysia yang sebelumnya telah diperkuat oleh fregat kelas Lekiu dan Korvet kelas Laksamana. Pada Maret 2005, ditengah ketegangan hubungannya dengan Indonesia manyangkut blok Ambalat, Malaysia mengumumkan rencananya membeli fregat kelas 2000 dari Inggris. Kapal perang kelas Lekiu akan dibuat berdasarkan kontrak dengan BAE System Marine in Glasgow, untuk melengkapi dua fregat kelas Kedah yang telah lebih dulu berdinis.

Pada Juni 2002 Malaysia juga menandatangani kontrak pengadaan dua kapal selam kelas Scorpene dan satu kapal selam bekas Agosta A-70 dari Prancis senilai US\$ 972 juta. Menurut rencana, dua kapal selam kelas Scorpene akan diserahkan pada tahun 2008 - 2009, menjadikan Tentera Laut Diraja Malaysia sebagai pengguna kapal selam ketiga di Asia Tenggara setelah Indonesia dan Singapura. Tentera Darat Malaysia sesuai dengan Rencana Malaysia 2001 - 2005 memperoleh alutista antara lain berupa 48 tank tempur utama (*main battle tank*) PT-91 dari Polandia, roket MLRS (*multi launch rocket system*) Astros dan Brazil dan kendaraan tempur infanteri (*infantry fighting vehicles*) Adnan IFV dari

⁴⁹http://www.btimes.com.my/Current_News/BTIMES/20Review.html, diakses pada 16 Januari 2012

Inggris. Selain itu, TLDM tetap mengagendakan pembelian satu kapal selam Diesel elektrik kelas Scorpene (sebagai pelengkap kapal selam sekelas KD Tunku Abdul Rahman yang telah lebih dulu tiba), plus 27 kapal patroli generasi baru (New Generation Patrol Vessel-NGPV) kelas Kedah serta beberapa pesawat patroli bahari. Dua di antara ke 27 NGPV kelas Kedah telah diterima TLDM pada pertengahan 2006 (KD Kedah dan KD Pahang). Sementara dua kapal sekelas lainnya, KD Perak dan KD Trengganu, diharapkan dapat diterima TLDM akhir 2009. Tentera Laut Diraja Malaysia berharap pada 2020 mereka telah memiliki enam kapal untuk tiap jenis kapal kombatan yang sekarang ada di gudang senjatanya.⁵⁰

Malaysia membangun sejumlah pangkalan baru bagi Angkatan Laut dan Angkatan Udaranya, seperti di Lumut dan Sabah. Untuk memperkuat pertahanan maritim disekitar Laut Sulu, Laut Sulawesi dan Laut China Selatan, Malaysia mengembangkan pangkalan Angkatan Laut di Teluk Sepanggar, Sabah. Pangkalan Angkatan Laut Teluk Sepangat nantinya akan menjadi pangkalan bagi kapal selam kelas Scorpene yang dibeli dari Prancis. Menurut data, Malaysia menghabiskan US \$284 juta untuk membangun pangkalan tersebut dan disini terletak Markas Komando Angkatan Laut Wilayah II.

Wilayah operasi TLDM kini tak hanya di sekitar Semenanjung Malaya, namun telah merambah ke kawasan utara Pulau Kalimantan di mana negeri jiran ini memiliki banyak kepentingan nasional. Salah satu bentuk provokasi Malaysia adalah pelanggaran wilayah yang kerap dilakukan oleh Angkatan Udara Malaysia (Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM)) atau sering disebut Royal Malaysian Air Force (RMAF) maupun Angkatan Laut Malaysia (Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM)) atau sering disebut Royal Malaysian Navy. Contohnya pelanggaran garis batas oleh Malaysia sangat kerap terjadi. Berdasarkan catatan TNI Angkatan Laut, sepanjang tahun 2007 terjadi 94 kali pelanggaran dan 38 kali pelanggaran pada tahun 2008.

⁵⁰ securemalaysia.com/2009/01/home-of-naval-navy.html, diakses pada 18 Januari 2012, pukul 21:45 WIB.

Malaysia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang membeli Airbus Military A400M. Pesawat ini diklaim sebagai generasi terbaru Airbus yang pertama kali mendarat di Asia. Pesawat serba bisa ini akan menjalani tur ke sejumlah negara di Asia Tenggara. Tujuannya, untuk promosi kehebatan. Airbus Military A400M tiba di Malaysia untuk pameran pertahanan se-Asia di Kuala Lumpur. Airbus Military A400M diluncurkan tahun 2003. Pertama kali untuk kebutuhan tujuh negara Eropa. Yaitu Belgia, Prancis, Jerman, Luxemburg, Spanyol, dan Inggris. Sejak peluncuran delapan angkatan udara di Eropa dan Asia telah memesan 117 pesawat ini. Pesawat angkut militer ini punya 4 mesin dengan 11 ribu tenaga kuda. Mampu membawa muatan seberat 37 ton dan 116 tentara lengkap dengan peralatan militer. Pesawat yang punya jarak tempuh 8.700 kilometer itu tidak hanya untuk militer, tapi untuk kepentingan lain seperti kemanusiaan dan pengisian bahan bakar di udara.⁵¹

4.2. Reaksi Indonesia Dalam Peningkatan Kapabilitas Militer Malaysia

Pembangunan kekuatan Militer Indonesia sebelum tahun 2006 kurang progresif, khususnya menyangkut pengadaan alutista baru, tidak lepas dari faktor internal dan eksternal. Secara internal, pemerintah Indonesia mempunyai keterbatasan anggaran bagi alokasi kepentingan pertahanan. Kekurangan anggaran terjadi karena Indonesia masih harus memprioritaskan pada kegiatan pemulihan ekonomi, di samping pemberian prioritas pada bidang pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Adanya embargo senjata dari Amerika Serikat dan negara Eropa mempengaruhi rencana pengadaan alutista, khususnya melalui program Kredit Ekspor. Akibat embargo senjata, jangankan untuk membeli alutista baru, pengadaan suku cadang bagi alutista yang sudah dimiliki saja mengalami hambatan. Akibatnya, tingkat kesiapan operasional TNI mengalami penurunan tajam.

⁵¹ securemalaysia.com/2009/01/home-of-naval-airforce.html, diakses pada 18 Januari 2012, pukul 22:35 WIB.

Tabel 4.2
Kapabilitas Militer Indonesia
(2004-2005)

Faktor Kapabilitas Militer	Jumlah
Personel Angkatan Darat	180000
Personel Angkatan Laut	45.000
Personel Angkatan Udara	15.000
Anggaran Belanja Militer	1690 (dalam US\$ Juta)
Ekspor senjata konvensional	78 (dalam US\$ Juta)
Jumlah Penduduk	215 juta jiwa

Sumber : The Military Balance The International Institute for Strategic Studies

Kurangnya dukungan anggaran, pertahanan merupakan masalah yang dihadapi Indonesia sebelum tahun 2006. Untuk melaksanakan operasi militer di beberapa daerah konflik, TNI mengalami kesulitan untuk memnuhi anggaran yang dibutuhkan. Sebagai contoh karena kurangnya dukungan anggaran, dari 120 KRI yang dimiliki oleh TNI AL, pada tahun 2003 hanya sepertiga kekuatan yang layak laut. Padahal kapal-kapal perang tersebut dibutuhkan bukan hanya untuk menghadapi pencurian operasi TNI di wilayah-wilayah konflik dan menjaga keamanan maritim. Pada saat yang sama, kondisi keamanan maritim di Selat Malaka tengah mendapat sorotan masyarakat internasional karena manignkatnya angka perompakan dan pembajakan. Keterbatasan dukungn anggaran pertahanan semakin diperparah dengan dijatuhkannya embargo senjata oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa terhadap Indonesia. Akibat embargo, banyak alutista TNI, khususnya TNI AL dan TNI AU yang tidak dapat beroperasi karena tidak ada suku cadang. Hal itu berakibat pada pengaruhnya kinerja TNI dalam menghadapi konflik – konflik yang terjadi. Sebagai contoh, dari 22 pesawat angkut C-130 B/H/HS Hercules TNI AU hanya enam pesawat yang siap terbang. Merujuk pada aspek Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), dari data pengadaan senjata konvensional berdasarkan anggaran, ada 173 jensi senjata konvensional

Universitas Indonesia

yang dimiliki Indonesia, padahal hanya 7 sampai 51 jenis senjata konvensional yang biasanya dimiliki oleh satu negara. Akibatnya, dari aspek dinamika kesenjataan, alokasi anggaran itu lebih banyak digunakan untuk pemeliharaan / *arms maintenance* daripada pengadaan / *arms build-up* dan sedikit sekali untuk pengembangan / *arms modernization* . Kondisi berbeda dengan Malaysia yang terus melakukan pembelian kapal tempur, kapal laut, kapal patroli, tank, hingga sistem pertahanan udara, dalam membangun kekuatan pertahanannya.

Menurut data tahun 2005 yang bersumber dari Departemen Pertahanan, menunjukkan bahwa kekuatan matra darat, kendaraan tempur berbagai jenis yang jumlahnya 1.766 unit, hanya 1.077 unit (60,99 persen) yang siap untuk dioperasikan. Pada tahun itu kekuatan pertahanan Indonesia berada dalam kondisi "under capacity", bahkan apabila disejajarkan dengan sesama anggota negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi terbawah. Rendahnya kemampuan untuk menerapkan teknologi baru di bidang pertahanan menyebabkan peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah usang dan ketinggalan jaman dengan rata-rata usia lebih dari 20 tahun. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa kekuatan matra darat, kendaraan tempur berbagai jenis yang jumlahnya 1.766 unit, hanya 1.077 unit (60,99 persen) yang siap untuk dioperasikan; kendaraan motor berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 47.097 unit, yang siap dioperasikan sebanyak 40.063 unit (85,04 persen); dan pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 61 unit, hanya 31 unit (50,82 persen) yang siap untuk dioperasikan. Kekuatan matra laut, kapal perang (KRI) yang jumlahnya 114 unit, hanya 61 unit (53,51 persen) yang siap untuk dioperasikan; kendaraan tempur Marinir berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 435 unit, yang siap dioperasikan hanya 157 unit (36,09 persen); dan pesawat udara yang jumlahnya mencapai 54 unit, hanya 17 unit (31,48 persen) yang siap untuk dioperasikan. Sedangkan untuk kekuatan matra udara, pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya 259 unit, hanya 126 unit (48,65 persen) yang siap untuk dioperasikan dan peralatan radar sebanyak 16 unit, hanya 3 unit (18,75 persen) yang siap untuk dioperasikan. Dengan wilayah yang sangat luas baik wilayah daratan, laut maupun udara, maka kuantitas, kualitas

serta kesiapan operasional alat utama sistem senjata (alutsista) sebesar itu sangat sulit untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara secara optimal.⁵²

Dengan demikian, pada prinsipnya faktor pendorong pembangunan kekuatan militer Indonesia lebih didasari oleh pertimbangan kepentingan nasional, yakni demi menjaga Integritas dan keutuhan wilayah Negara, dalam arti memenuhi kebutuhan untuk mengawai tetap tegaknya Negara Kesatuan RI. Persengketaan wilayah perbatasan dengan Malaysia termasuk pendorong langkah ini. Berdasarkan hasil pendalaman data-data dan diskusi dengan pihak-pihak terkait, pembangunan kekuatan militer Indonesia selama rentang waktu 2006-2010 adalah upaya modernisasi alutsista, membangun kembali kekuatan militer yang memiliki efek *deterrence*, dan mengikuti kemajuan teknologi.

Pertama, modernisasi alutsista. Sebagian besar alutsista pertahanan Indonesia merupakan alutsista lama yang sudah ketinggalan teknologi, yang didominasi oleh teknologi era 1960-an. Akibatnya, tercipta kesenjangan postur militer Indonesia dengan Malaysia yang sudah lebih dahulu mengadakan modernisasi kekuatan militer. Selain ketinggalan teknologi, sebagian alutsista yang tergolong baru pun tidak dapat berfungsi karena adanya embargo dari produsen senjata terkait isu HAM, misalnya pesawat tempur F-16 Hawk 100/200 yang mengadopsi teknologi 1980-an dan 1990-an. Walaupun embargo peralatan militer oleh Amerika Serikat dicabut pada tahun 2005, sehingga Indonesia dapat melanjutkan upaya memperbaiki kekuatannya, pemerintah Indonesia memilih untuk membeli persenjataan dari Negara lain sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Padahal mengingat besarnya Asia Tenggara, Indonesia relatif memiliki kesempatan besar untuk membangun kekuatannya melalui Amerika Serikat yang memiliki teknologi peralatan militer canggih.

Kasus Blok Ambalat yang mengemuka pada awal tahun 2005 meskipun tidak sampai memicu perang antara Indonesia dan Malaysia, namun hal tersebut telah menimbulkan situasi yang tidak harmonis dalam hubungan kedua negara. Pengerahan sejumlah kapal perang oleh kedua belah pihak di sekitar perairan

⁵² Departemen Pertahanan, *Jurnal Tahunan Direktorat Wilayah Pertahanan*, Jakarta : 2006.

Ambalat merupakan bentuk pernyataan klaim atas blok Ambalat. Modernisasi atau peningkatan kemampuan peralatan tempur TNI AL merupakan solusi yang tepat bagi penyelesaian pelanggaran batas laut di daerah Ambalat oleh Malaysia. Angkatan laut Malaysia berani masuk ke wilayah laut Indonesia karena mereka merasa peralatan tempur lebih maju dan kuat dibandingkan peralatan tempur TNI AL. Dulu, ketika TNI AL masih lebih kuat Malaysia tidak akan berani masuk wilayah Indonesia. Klaim Malaysia yang melanggar wilayah laut Indonesia, terutama di kawasan Ambalat, memicu Indonesia untuk bagaimana memodernisasi dan meningkatkan persenjataan tempur TNI AL agar tidak direndahkan dan menjaga kedaulatan NKRI. Banyaknya pelanggaran oleh angkatan laut Malaysia di kawasan Ambalat merupakan konsekuensi dari persengketaan wilayah yang belum ada keputusan. Oleh sebab itu, perundingan batas-batas negara harus terus dilanjutkan, tetapi hal yang tidak kalah pentingnya adalah memodernisasikan atau meningkatkan kemampuan tempur TNI AL merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi pelanggaran wilayah laut oleh Malaysia

Anggaran pertahanan sampai dengan tahun 2006 baru mencapai 0,9 persen dari Produk Domestik Bruto atau 5,7 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.. Dalam periode lima tahun ke depan untuk membangun postur pertahanan pada tingkat "*minimum essential force*" anggaran pembangunan pertahanan seharusnya mencapai 3 sampai 4 persen dari Produk Domestik Bruto. Rendahnya anggaran pertahanan ini menyebabkan upaya-upaya peningkatan kemampuan kekuatan pertahanan sangat sulit dilakukan. Padahal diplomasi luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional secara signifikan memerlukan dukungan kekuatan pertahanan yang memadai. Meskipun masih dalam skala rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, kebijakan, strategi, dan perencanaan pertahanan mulai mengarah kepada pembentukan *minimum essential force*. Alat utama sistem senjata (alutsista) TNI telah mengalami peningkatan kemampuan meskipun belum sampai memenuhi kebutuhan minimal. Peningkatan kemampuan alutsista TNI lebih banyak dibangun melalui perpanjangan usia pakai yang dilaksanakan melalui *repowering* atau *retrofit*. Hal ini akan dilanjutkan pada tahun 2007 sebagai langkah yang strategis dalam upaya

mengoptimalkan alutsista yang tersedia. Selain dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah, hal tersebut merupakan langkah yang lebih murah apabila dibandingkan dengan pembelian alutsista baru. Pembelian alutsista baru secara selektif hanya dilaksanakan untuk menggantikan alutsista yang sudah tidak dapat dioperasikan dan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan teknologi pertahanan. Di samping itu, upaya modernisasi alutsista, khususnya pertahanan udara, mulai dicari kemungkinan memanfaatkan teknologi Rusia yang modernitasnya setingkat dengan teknologi Eropa dan Amerika Serikat. Upaya ini dilakukan sehubungan dengan embargo alutsista berkepanjangan dari Amerika Serikat. Upaya pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri juga mulai meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas produk peralatan militer.

Gambar 4.1

Anggaran Belanja Militer Indonesia Berdasarkan Peringkat Dunia

South Korea	\$25,500,000,000	2007
Brazil	\$24,400,000,000	2008
Australia	\$22,000,000,000	2009
Canada	\$19,500,000,000	2009
Israel	\$18,700,000,000	1999
Iraq	\$17,900,000,000	2008
Spain	\$17,700,000,000	2009
Poland	\$11,800,000,000	2009
Taiwan	\$10,500,000,000	2008
Greece	\$9,350,000,000	2007
Venezuela	\$7,700,000,000	2004
Sweden	\$7,000,000,000	2008
Iran	\$6,300,000,000	2007
Norway	\$6,200,000,000	2007
Mexico	\$6,070,000,000	2006
North Korea	\$5,500,000,000	2005
Thailand	\$5,000,000,000	2009
29 Indonesia	\$4,740,000,000	2008
Pakistan	\$4,260,000,000	2006
South Africa	\$3,700,000,000	2007
Denmark	\$3,271,600,000	2003
Argentina	\$3,000,000,000	2009
Georgia	\$2,500,000,000	2008
Egypt	\$2,500,000,000	2006
Ukraine	\$2,065,000,000	2008
Philippines	\$1,348,000,000	2007
Libya	\$1,300,000,000	2007
Syria	\$935,000,000	2000
Lebanon	\$744,000,000	2005
Afganistan	\$188,400,000	2008
Nepal	\$104,900,000	2005

Sumber: *Military Balance 2006-2010*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies

Berdasarkan alokasi anggaran Dephan 2006-2010, TNI AD kedepannya akan diperlengkapi dengan Mi-17 (Helikopter Transport) 10 unit, Peralatan Tambahan untuk Mi-17-V5 1 paket, Mi-35 Tempur 5 unit, Sukucadang Mi-35 P 1 paket, Amunisi dan perlengkapan Mi-35 Tempur 1 paket. TNI-AL Kapal Selam Kilo 636 2 unit, BMP-3F (Tank amphi) 20 unit, Persenjataan Yakhonk 2 shipset.

TNI-AD

Mi-17 (Helikopter Transpor)	10 unit
Peralatan Tambahan untuk Mi-17-V5	1 paket
Mi-35 Tempur	5 unit
Sukucadang Mi-35 P	1 paket
Amunisi dan perlengkapan Mi-35 Tempur	1 paket

TNI-AL

Kapal Selam Kilo 636	2 unit
BMP-3F (Tank amphi)	20 unit
Persenjataan Yakhonk	2 shipset

TNI-AU

SU-27 SKM (Sukhoi Tempur)	3unit
SU MK2 (Sukhoi Tempur)	3unit
Amunisi Sukhoi	4paket
Sukucadang Sukhoi	4 paket

Pembelian Sukhoi pada 6 September 2007, telah disepakati perpanjangan kredit negara (*state credit*) antara Indonesia dan Rusia. Sebelumnya, yakni pada 22 September 2005, Indonesia dan Rusia juga telah menyetujui adanya kerjasama bantuan teknis militer serta MoU asistensi implementasi bantuan teknis militer yang ditandatangani pada 1 Desember 2006 untuk masa 2006-2010. Pemerintah Rusia. Menyediakan fasilitas kredit untuk pembelian alutsista bagi pemerintah Indonesia senilai US\$1 miliar. Perinciannya adalah untuk pengadaan alutsista sebesar Rp87,32 triliun, perawatan dan pemeliharaan alutsista sebesar Rp62,46 triliun, dimana untuk tahun 2010 dialokasikan Rp23,10 triliun. TNI AD sudah

Universitas Indonesia

memiliki batalyon infantri terbesar se-ASEAN, yakni 100 batalyon lebih. Di laut, TNI AL memiliki frigad, dan di udara TNI AU akan memiliki dua skuadron Sukhoi.⁵³

Teknologi kapal selam Indonesia sudah ketinggalan dibandingkan negara tetangga Malaysia. Karena itu, Dephan telah menganggarkan US\$700 juta untuk pembelian kapal selam. TNI AL membeli dua kapal selam untuk menambah kekuatan kapal selam Indonesia yang sudah lama dari Rusia dan Korea Selatan. Kapal selam yang dimiliki oleh Malaysia bisa disaingi oleh kapal selam buatan Rusia kelas kilo dimodifikasi project 636. Sedangkan, kapasitas kapal selam buatan Korsel tidak berbeda jauh dengan yang dimiliki Indonesia sekarang, yakni tipe U214. Pembelian kapal selam ini bisa memancing perlombaan persenjataan antara Indonesia dan Malaysia. Tetapi jika Indonesia memang ingin membangun kekuatan militer, tentunya harus bersaing dalam kualitas.

Angkatan Laut RI memiliki misi menjadi Green Water Navy yaitu angkatan laut yang mampu menjaga kedaulatan negara dan yang mampu menahan agresi dan melumpuhkan lawan, menjaga stabilitas negara, serta mendukung politik luar negeri. Dengan armada sekitar 114 kapal dan 16.000 personel, akan sulit merealisasikan ambisi tersebut. Sebagai negara maritim, seharusnya Indonesia memiliki 274 armada dan lebih banyak lagi personel AL. Rencana pembelian empat kapal perang ini telah dirintis sejak tahun 2004 dan pembuatan dua kapal telah dimulai sejak awal 2005, sedang dua sisanya dibuat tahun 2006. Korvet kedua, KRI Hasanuddin, diluncurkan Desember 2007. Korvet ketiga, KRI Sultan Iskandar Muda, selesai September 2008 dan KRI Frans Kaisiepo akan diluncurkan Maret 2009.

Program pengadaan ketiga jenis alutsista dari Kredit Ekspor untuk kebutuhan TNI sudah lama berjalan dengan alokasi Kredit Ekspor 2005 yang akan habis September 2007. Bahkan, sejak Pemerintah Rusia menawarkan kredit negara pada Maret 2006, Dephan sudah menyusun daftar belanja TNI. Antara lain, untuk TNI AD 10 unit helikopter angkut jenis MI- 17 V5 dan 5 unit

⁵³ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Jurnal Tahunan 2006-2010 Direktorat Wilayah Pertahanan*, Jakarta : 2010.

helikopter serang jenis MI-35P. Untuk TNI AL, dua Kapal Selam jenis Kilo Class versi Project 636, 20 tank amfibi BMP-2, dan peluru kendali antikapal jenis Yakhont berserta sistem pengendalian tembakan untuk dua kapal. Untuk TNI AU, dianggarkan tiga pesawat tempur jenis Sukhoi SU-27 SKM dan tiga pesawat tempur jenis Sukhoi SU-30 MKM beserta paket suku cadang dan persenjataannya. Indonesia tetap akan menggunakan jatah kredit negara Rusia tersebut untuk pembelian alutsista lainnya. Bersama nota kesepahaman, Rusia juga melampirkan penawaran 13 jenis persenjataan kepada Indonesia. Salah satunya adalah sistem senjata antitank metis dan transfer teknologinya.

Kelemahan pertama yang dimiliki oleh militer Indonesia adalah kemampuan yang menjadi kunci modernisasi pertahanan. Kelemahan kedua adalah postur pertahanan Indonesia saat ini tidak disertai dengan pembagian kompartemen wilayah pertahanan yang memadukan kekuatan integratif Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kompartemen-kompartemen wilayah pertahanan ini dapat dibentuk dengan satu pertimbangan utama yaitu menangkalkan kemungkinan serangan dari luar. Dengan demikian, untuk menangkalkan negara-negara di kawasan Asia Timur-Tenggara, Indonesia membutuhkan minimal 4 kompartemen wilayah pertahanan. Dua kelemahan tersebut mengarahkan Indonesia untuk mengambil kesimpulan bahwa perlu dilakukan modifikasi gelar postur pertahanan Indonesia terutama karena sistem ini tidak sesuai dengan strategi pertahanan negara yang telah dikembangkan. Modifikasi ini perlu segera dilakukan berdasarkan kaji ulang strategi pertahanan negara yang saat ini sedang dilakukan oleh Departemen Pertahanan. Kasus Blok Ambalat menunjukkan bahwa tuntutan UU 34/2004 tentang TNI perlu segera diwujudkan. Tuntutan tersebut adalah lakukan modifikasi gelar pertahanan sehingga kekuatan TNI terfokus digelar di daerah konflik, perbatasan, wilayah terpencil, serta pulau-pulau paling luar yang berbatasan dengan negara lain. Program pembelian alutsista TNI tahun 2006 sampai dengan 2014 telah disetujui dengan anggaran sebesar US\$ 15 Milyar (Rp. 140 Trilyun). Berikut ini disampaikan prediksi Alutsista yang diterima TNI (2006-2014):

- 6 Pesawat Tempur Sukhoi SU27/30 dan Arsenal 16 Sukhoi
- 16 Pesawat Tempur Super Tucano

- 24 Pesawat Tempur F16 (hibah)
- 16 Pesawat Tempur (opsi: Yak-130, T50)
- 16 Pesawat Tempur (opsi: SU35 BM, Gripen, Typhoon)
- 4 Pesawat Intai Strategis
- 8 Pesawat Intai Taktis
- 24 UAV
- 12 Hercules
- 6 C17J Spartan
- 80 Rudal hanud area surface to air
- 400 Rudal hanud titik surface to air
- 8 Radar Militer Master T
- 600 Rudal Anti Tank
- 200 Rudal C802 / 705
- 50 Rudal Yakhont
- 20 Rudal Exocet Blok3
- 70 Main Battle Tank
- 80 Infantri Fighting Vehicle
- 100 Panser Canon
- 300 Panser APC
- 200 Rudal Lapan-Pindad surface to surface
- 11 KRI Landing Ship Tank
- 1 LPD
- 25 KRI Kapal Cepat Rudal
- 8 KRI Trimaran
- 4 KRI Korvet
- 2 Kapal Selam
- 80 Tank Amphibi BMP3F
- 70 Tank Amphibi BTR90
- 20 RM Grad
- 80 RM Langusta
- 90 Howitzer
- 8 Heli EC 725 Cougar

- 12 Heli anti kapal selam (AKS)
- 12 Heli anti kapal permukaan (AKPA)
- 5 Heli Tempur Mi35
- 8 Heli Tempur / Angkut Mi17
- 24 Heli Tempur Bell 412Ep

Kekuatan militer Indonesia menyusul upaya peningkatan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), sudah bisa menandingi kekuatan militer Malaysia dan bahkan dapat membuat khawatir negara di kawasan ASEAN. Kekuatan yang dimaksud adalah 100 batalyon lebih atau batalyon infantri terbesar se-ASEAN yang dimiliki TNI AD, kapal perang jenis frigat yang dimiliki TNI AL, dan dua skuadron Sukhoi yang akan dimiliki TNI AU dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri yakni membangun Kapal Cepat Rudal 40 yang panjangnya 60 meter yang mampu membawaa 120 rudal dengan radius tembak yang cukup luas. Peningkatan kekuatan militer yang signifikan itu karena Kementerian pertahanan tahun 2009-2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150 triliun. Uang untuk alutsista itu terdiri dari Rp 50 triliun untuk pengadaan, Rp 45 triliun untuk perawatan, dan Rp 50 triliun untuk produksi dalam negeri. Dengan pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan pembangunan kesejahteraan. Sementara dalam waktu yang bersamaan, pembangunan kesejahteraan akan selalu diikuti dengan pembangunan keamanan. Penguatan alutsista yang terus dilakukan pemerintah Indonesia saat ini tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan RI.

Tabel 4.3
Kapabilitas Militer Indonesia
(2009-2010)

Faktor Kapabilitas Militer	Jumlah
Personel Angkatan Darat	180000
Personel Angkatan Laut	45.000
Personel Angkatan Udara	15.000
Anggaran Belanja Militer	1690 (dalam US\$ Juta)
Ekspor senjata konvensional	78 (dalam US\$ Juta)
Jumlah Penduduk	215 juta jiwa

Sumber : The Military Balance The International Institute for Strategic Studies

4.3. Implikasi Konsep *The Arms Dynamic* Bagi Hubungan Bilateral antara Malaysia dan Indonesia

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori dari Barry Buzan, *The Arms Dynamic in World Politics* (1998). Di dalam bukunya, Buzan tidak hanya menjelaskan definisi dari dinamika persenjataan, namun juga menjabarkan dinamika persenjataan itu sendiri. Tidak hanya Buzan yang berbicara soal dinamika persenjataan, selain Buzan ada Samuel P Huntington. Huntington mengatakan bahwa modernisasi kapabilitas militer merupakan peningkatan yang bersifat progerif dari sumber domestik yang berasal dari kekuatan militer suatu negara. Ini dapat dilakukan secara kualitatif, dengan mendambahkan jumlah persediaan persenjataan atau dengan cara kuantitatif, menggantikan kekuatan militer (sistem persenjataan) dengan yang baru dan kekuatan yang lebih efektif (teknologi). Faktor utama yang sangat berkontribusi dalam modernisasi kapabilitas militer berasal dari perkembangan teknologi militer dan adanya perkembangan dari sektor yang mendukung peningkatan kapabilitas militer seperti sektor ekonomi, politik dan sumber daya manusia. Modernisasi senjata merupakan sekedar usaha untuk mempertahankan diri atau bahkan hanya untuk

Universitas Indonesia

memelihara *status quo* hubungan keamanan dalam suatu kawasan tertentu. Menurut Buzan dinamika persenjataan dapat dijelaskan melalui dua model, yaitu *The Action-Reaction Model, Domestic Structure Model*.⁵⁴

Dinamika persenjataan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep perlombaan senjata. Dinamika persenjataan lebih mentitik beratkan kepada situasi yang lebih normal atau stabil (dalam hal ini tidak ada perlombaan senjata antar negara). Menurut Buzan perlu adanya bagian yang dapat menjelaskan kondisi normal dalam hubungan militer, hal ini tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep suatu perlombaan senjata saja namun bisa dijelaskan dengan faktor-faktor dari teori aksi reaksi lainnya seperti modernisasi kapabilitas militer. Konsep Dinamika Persenjataan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dalam hubungan militer dalam kondisi normal maupun dalam kondisi perlombaan senjata. Maka Dinamika Persenjataan menurut Buzan merupakan literatur yang menjelaskan bahwa adanya tekanan-tekanan yang memaksa para aktor (dalam hal ini negara) untuk mempunyai kekuatan persenjataan dan merubah secara kuantitas dan kualitas yang mereka inginkan. Dinamika persenjataan tidak hanya digunakan secara global, tetapi dapat digunakan dalam suatu negara atau kawasan.

Dinamika persenjataan, kata yang tepat untuk menjelaskan konsep ini adalah "*maintenance*" memelihara status quo militer. Sehingga karakter hubungan antar negara dapat dilihat apakah fenomena ini merupakan perlombaan senjata yang akan membawa situasi yang lebih rumit yaitu perang atau ini merupakan dinamika persenjataan yang lebih tepat menggunakan kata kompetisi persenjataan yang lebih bersifat damai yang mengarah pada modernisasi kapabilitas militer negara yang bertujuan untuk mempertahankan karakter status quo dan ingin memperbaiki posisi negara tersebut dalam kancah internasional atau kawasan. Kondisi hubungan Indonesia dan Malaysia, secara nyata dapat menggunakan persepsi ini, dalam arti antara kedua Negara memang terdapat sejumlah masalah bilateral yang menyangkut masalah perbatasan antara kedua negara tersebut, terlebih setelah konflik Ambalat mencuat hubungan bilateral kedua negara ini

⁵⁴ Barry Buzan and Herring, *The Arms Dynamic in World Politics*, (London: Macmillan for the International Institute for Strategic Studies 1998), hlm. 79.

menjadi kurang baik dan timbulnya kecurigaan atas peningkatan kapabilitas militer yang membuat adanya security dilemma diantara kedua pihak.

4.3.1 *Action-Reaction Model* (Aksi-Reaksi) pada Dinamika Persenjataan Antara Indonesia dan Malaysia

Dari pemaparan bab sebelumnya dan pada bab ini, penulis akan mengkaji dinamika persenjataan antara Indonesia dan Malaysia dengan teori Buzan yaitu *The Action-Reaction model* melihat kepada kekuatan yang mendorong dinamika persenjataan dalam hubungan yang kompetitif antar negara. Di dalam model ini negara akan mempersenjatai diri sebagai usaha untuk mencapai keamanan terhadap ancaman (*threat*) pihak lain atau meningkatkan kekuatan (*power*) untuk mencapai tujuan politik terhadap kepentingan negara lain. Dengan demikian model ini mengandalkan penalarannya pada anarki internasional dan ancaman luar. Asumsi pokok dari model ini adalah rasionalitas para aktor dan bahwa aksi-reaksi inilah yang menjadi pendorong yang determinan dalam dinamika persenjataan.

Di dalam model ini, kekuatan militer dapat digunakan untuk mencapai tujuan melalui *force*, baik itu secara eksplisit maupun implisit. Model aksi reaksi ini kemudian lebih mengarah kepada *arms race* antar kedua negara apabila hasil yang didapatkan cenderung ofensif, dan sebaliknya model aksi reaksi ini mengarah pada modernisasi kapabilitas militer apabila hasil yang di dapatkan cenderung ke arah yang defensif. Tujuan dari model ini lebih mengarah kepada reaksi yang ditanggapi oleh negara terhadap aksi pembangunan senjata (*arms build-up*) negara lain. Oleh sebab itu sebagian besar instrumen militer digunakan untuk tujuan yang bersifat ofensif maupun defensif. Model aksi-reaksi ini merupakan cara klasik dalam melihat dinamika persenjataan. Penjelasan secara mudah untuk menejelaskan model aksi dan reaksi ini bahwa suatu negara meningkatkan persenjataannya masing-masing dikarenakan negara tersebut merasa terancam dengan negara lain.

Dengan adanya peningkatan kapabilitas militer Malaysia maka Indonesia melakukan peningkatan kapabilitas militernya terjadinya dinamika persenjataan. Maka *Action-Reaction model* sangat tepat menggambarkan fenomena tersebut.

Universitas Indonesia

Dalam kasus Ambalat, dinamika Persenjataan antara Malaysia dan Indonesia dapat dilihat melalui konsep ini dengan menggunakan tiga indikator yang ada pada *Action Reaction model*. Jika *Magnitude* bersifat tinggi (salah satu negara memiliki jumlah kekuatan yang lebih besar), *Timing* tinggi (respon salah satu negara atas peningkatan kapabilitas militer negara musuh cepat atau ditanggapi dengan waktu yang singkat), *Awareness* tinggi (kepakaan salah satu negara atas perilaku negara lain, jika tidak peka akan membawa situasi menjadi tidak seimbang dan akan menyebabkan situasi dilema keamanan) dan peningkatan kapabilitas militer diantara kedua negara bersifat ofensif ini akan mengarah pada suasana perlombaan senjata (*arms race*) dan dapat menimbulkan situasi yang bersifat kompetisi yang dapat menyebabkan terjadinya suatu konflik terbuka.

Dengan menggunakan tiga indikator dari *Action-Reaction model*, yaitu *Magnitude*, *Timing* dan *Awareness*. Jika *Magnitude* rendah (kedua belah pihak negara memiliki jumlah peralatan militer yang hampir sama), *Timing* rendah (respon salah satu negara atas peningkatan kapabilitas negara lain tidak cepat) dan *Awareness* (kepekaan kurang atas perilaku negara lain) dan peningkatan kapabilitas militer diantara kedua negara bersifat defensif ini akan mengarah pada modernisasi kapabilitas militer, denga diantara kedua negara dan dengan demikian suasana rivalitas tidak akan terjadi dan stabilitas keamanan diantara Indonesia dan Malaysia tetap kuat dilihat dengan tidak terjadinya situasi dilemma keamanan (*security dilemma*) dan tidak ada salah satu negara yang melakukan reaksi yang berlebih seperti *preemptive strike* yang disebabkan oleh dilema keamanan. Atau sebaliknya jika *Magnitude*, *Timing* dan *Awareness* semua tinggi akan tetapi tidak adanya konflik terbuka antara Malaysia dan Indonesia mungkin disebabkan oleh hubungan bilateral yang erat.

4.3.1.1 *Magnitude*

Dilihat pentingnya kekuatan besar dalam hal jumlah, volume, dan ruang lingkup. Jika proses dinamika mengalami reaksi yang berlebih, dan berubah menjadi suatu negara lebih menguasai dalam kekuatan dibanding negara lain untuk menjegah lawan (*preventive war*) (melawan musuh sebelum musuh menjadi lebih kuat) atau serangan lebih dulu (*preemptive war*) (melawan lebih dulu dengan alasan bahwa sebuah serangan dari musuh sudah dekat atau sebentar lagi). Situasi

Universitas Indonesia

ini dapat menyebabkan posisi musuh yang kalah dalam jumlah kekuatan kedalam situasi dilema keamanan maka dengan demikian potensi untuk terjadinya konflik terbuka lebih memungkinkan, lain hal jika jumlah kekuatan antara negara tersebut berdekatan, sesuai yang dikatakan oleh Huntington bahwa itu membuat situasi menjadi perlombaan senjata antar negara yang berseteru dan akan membawa situasi tersebut menjadi situasi “*balance of power*”.⁵⁵

Magnitude disini bersifat rendah karena terlihat dari proses dinamika mengalami reaksi yang tidak berlebihan dimana terlihat kekuatan antara kedua negara tidak terlalu jauh perbedaannya, Tidak terlihat juga bahwa diantara Indonesia dan Malaysia ada yang lebih menguasai dalam kekuatan militernya. Tidak terdapat juga jurang yang tinggi antara kedua negara yang dapat menyebabkan posisi salah satu yang kalah dalam jumlah kekuatan kedalam situasi dilema keamanan maka dengan demikian potensi untuk terjadinya konflik terbuka sangat kecil, lain hal jika jumlah kekuatan antara negara tersebut berdekatan akan membuat situasi menjadi perlombaan senjata antar negara yang berseteru.

4.3.1.2 Timing

Melihat dari kecepatan dan urutan interaksi antara kedua negara. Tingkatan presisi dalam hal waktu dan urutan dalam merespon satu sama lain harus disesuaikan. Jika dibandingkan dengan *magnitude*, *timing* lebih sulit untuk dibaca ataupun diukur. Sesuai yang dikatakan oleh Buzan bahwa *timing* ini seperti bermain catur dilihat dari cepat atau lambat dalam menanggapi kekuatan musuh. Proses tanggap cepat atau lambat yang dilakukan untuk menanggapi kekuatan musuh itu akan memberi karakter seperti apa sebuah dinamika persenjataan. Contoh di masa perang dingin, masing-masing polar berpandangan bahwa rival mereka akan terus menjadi pesaing secara prinsipil, setidaknya selama sepuluh tahun ke depan. Oleh sebab itu, diperlukan segala usaha secara komprehensif untuk menjatuhkan satu sama lain, sehingga masing-masing polar dapat bertahan.

Dalam konflik Ambalat antara Indonesia dan Malaysia ini dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh Indonesia menanggapi kapabilitas militer Malaysia

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 93

di tahun 2006, Indonesia merasa kapabilitas militernya tertinggal dari Malaysia dan memiliki anggapan bahwa dengan ketertinggalan ini maka Malaysia dapat mendominasi diantara hubungan bilateral antara kedua negara tersebut, hal ini diperlihatkan oleh Malaysia pasca konflik Sipadan dan Ligitan merasa bahwa kapabilitas militer mereka lebih unggul dibandingkan Indonesia sehingga memiliki kepercayaan diri untuk mendominasi blok Ambalat dan mempersengketakan dengan Indonesia yang jelas wilayah itu milik Indonesia lebih dahulu, merasa kedaulatannya dilanggar maka bermula dari tahun 2006 pihak Indonesia melakukan peningkatan kapabilitas militernya di tiga aspek yaitu darat, udara, dan laut dengan peningkatan anggaran yang signifikan yang terutama untuk angkatan laut karena sengketa Ambalat itu merupakan teritorial laut. Dapat dilihat bahwa respon yang dilakukan oleh Indonesia atas Malaysia memiliki waktu yang cukup berdekatan dan berdasarkan ini dapat dikatakan bahwa *timing* dalam *action-reaction model* cukup tinggi, tetapi *timing* yang cukup tinggi ini perlu dipertimbangkan dengan banyaknya jumlah alutsista yang dibeli, karena walaupun anggaran untuk peningkatan kapabilitas militer meningkat, namun besarnya anggaran ini tidak memberikan suatu pembelian alutsista yang sangat signifikan, hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam negara itu sendiri, di mana faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam penetapan anggaran peningkatan kapabilitas suatu negara. Dalam hal ini respon Indonesia menurut *timing* tidak bisa dikatakan sangat tinggi/tinggi karena adanya beberapa faktor yang membuat peningkatan kapabilitas militer tidak bisa maksimal.

4.3.1.3 Awareness

Tingkatan di mana masing-masing pihak menyadari akan dampak yang mereka perbuat terhadap satu sama lain. Tingkat kesadaran sangat diperlukan dalam meningkatkan atau menurunkan sistem militer, namun seringkali tingkatan kesadaran dalam hal meningkatkan atau menurunkan sistem militer hanya mengacu kepada ancaman dari pihak luar, sehingga ancaman yang diciptakan oleh diri sendiri kadang terabaikan. Persepsi yang tidak seimbang inilah yang kemudian dijadikan sebagai elemen kunci didalam *security dilemma*. Jika sebuah negara sangat peka dengan perilaku negara lain, maka ini akan menimbulkan

potensi untuk menjaga hubungan antar negara dengan mengharapkan sebuah keseimbangan dan mencegah reaksi yang berlebihan.

Peningkatan kapabilitas militer Indonesia ini selain reaksi dari peningkatan kapabilitas militer Malaysia juga dikarenakan atas kesadaran Indonesia sendiri yang menyadari bahwa pembangunan nasional sebelum tahun 2006 tidak menitik beratkan pada bidang militer karena adanya isu dalam negeri seperti contohnya isu ekonomi yang berimbas pada pembangunan peningkatan militer Indonesia, kalau dilihat dari peningkatan kapabilitas militer kawasan dimana Indonesia dan Malaysia tergabung dalam ASEAN, Dimana pembangunan militer diawali oleh Singapura dan diikuti oleh peningkatan kekuatan persenjataan yang dilakukan oleh Malaysia sehingga Indonesia dan Filipina serta beberapa negara lain melakukan hal yang sama yaitu *military build up*. *Military build up* yang terjadi di kawasan ASEAN merupakan kepekaan dan kewaspadaan sesama negara ASEAN karena menyangkut batas negara dengan negara lainnya di kawasan ASEAN. Kepekaan beberapa negara di ASEAN ini disebabkan peningkatan kapabilitas militer oleh Singapura sebagai negara provokatif untuk terjadinya peningkatan kapabilitas militer bagi negara tetangganya yaitu Malaysia dan diikuti oleh Indonesia yang mengakibatkan adanya dinamika persenjataan yang diperlihatkan pada modernisasi kapabilitas militer antara Indonesia dan Malaysia.

Menggambarkan kondisi hubungan Indonesia dan Malaysia, secara nyata dapat menggunakan persepsi ini, dalam arti antara kedua negara memang terdapat konflik perbatasan yang mengacu pada konflik bilateral. Dengan menggunakan tiga indikator dari *Action-Reaction model*, yaitu *Magnitude*, *Timing* dan *Awareness* diatas dapat dilihat dalam kasus Ambalat, dinamika Persenjataan antara Malaysia dan Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan tiga indikator tersebut. *Magnitude* bersifat rendah dimana kedua belah pihak negara memiliki jumlah peralatan militer yang tidak terlalu besar perbedaannya. *Timing* dalam hal ini cukup tinggi dimana pada saat konflik ambalat mencuat respon Indonesia atas peningkatan kapabilitas militer Malaysia ditanggapi dengan waktu yang singkat karena pada tahun 2006 Indonesia menanggapi kemajuan kapabilitas militer Malaysia dengan adanya peningkatan kapabilitas militer di semua bidang tetapi tidak dapat dikatakan tinggi/sangat tinggi karena proses peningkatan

kapabilitas militer itu sangat bergantung terhadap anggaran negara, *Awareness* sedang di mana baik Indonesia dan Malaysia memiliki kepekaan, kedua belah pihak menyadari akan dampak yang mereka perbuat terhadap satu sama lain. Peningkatan kapabilitas militer diantara kedua negara mengarah kepada modernisasi kapabilitas militer di antara kedua negara yang bersifat defensif karena faktor magnitude rendah dan timing yang tidak tinggi namun tidak didukung oleh faktor internal maka ini dinamika persenjataan antara Indonesia dan Malaysia ini hanya menimbulkan situasi yang bersifat kompetisi karena dilema keamanan di antara kedua belah pihak, tetapi tidak dapat menyebabkan terjadinya suatu konflik terbuka yang salah satu faktor pendukungnya yaitu disebabkan oleh hubungan bilateral yang erat dan faktor modernisasi kapabilitas militer lebih bersifat defensif yang akan membuat sistem menjadi stabil dan menjaga status quo teritorial di kawasan.

Permasalahan konflik ambalat antara Indonesia dan Malaysia adalah permasalahan kedaulatan negara tetapi tidak bersifat vital bila dikaitkan dengan kepentingan nasional dan politik luar negeri antara kedua negara. Antara Malaysia dan Indonesia tidak memiliki kepentingan politik kewilayahan yang agresif. Selain itu, dikaitkan dengan kerjasama kedua negara dalam ASEAN, maka Indonesia dan Malaysia sesungguhnya menyadari bahwa kerjasama keamanan yang saling memberi keuntungan, tidak melalui pola konfirmasi dalam dimensi militer. Walaupun pada tingkatan tertentu, terdapat konflik antara kedua Negara. Akan tetapi hal ini bukan menjadi faktor yang mendorong Indonesia dan Malaysia melaksanakan konflik terbuka atau perang. Hal ini mungkin disebabkan pembelian alutsista menimbulkan persepsi negatif oleh kedua negara dan memicu Indonesia melakukan modernisasi dalam peningkatan kapabilitas militernya.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang bertetangga dan sudah menjalin hubungan bilateral yang lama serta berada dalam satu kawasan regional dan sama-sama menjadi anggota ASEAN. Namun, keadaan bahwa keduanya terletak sangat berdekatan satu sama lainnya justru melahirkan kecenderungan timbulnya konflik mengenai garis perbatasan yang jelas di antara keduanya. Konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia menimbulkan ketegangan hubungan bilateral antara kedua negara, sikap Malaysia yang terus menerus mengklaim beberapa wilayah Indonesia di perbatasan, dan bersikap seolah militer Indonesia itu lemah.

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan reaksi Indonesia atas peningkatan kapabilitas militer Malaysia serta menganalisis kekuatan militer dari kedua belah pihak negara tersebut dalam masa terjadinya konflik Ambalat, penelitian ini juga memberikan pemahaman tentang konflik perbatasan yang terjadi di antara Indonesia dan Malaysia dan memperdalam pemahaman peneliti terhadap faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia pada suatu masa tertentu secara cepat mengembangkan ketahanan militernya. Faktor yang membuat Indonesia mengembangkan kapabilitas militernya diantaranya adalah kesadaran Indonesia akan ketertinggalan kapabilitas militernya terhadap Malaysia dilihat dari inovasi peningkatan militer yang lebih dahulu dilakukan Malaysia, dengan adanya konflik Ambalat maka Indonesia merasa perlu meningkatkan kapabilitas militernya dengan cara mengalokasikan kenaikan anggaran pada sektor militer yang sebelumnya anggaran lebih dialokasikan ke sektor ekonomi.

Melalui militer negara dapat mempertahankan dirinya untuk melawan semua saingannya, untuk membantu negara mencapai kepentingannya, dan juga sebagai alat persaingan dengan negara lainnya. Pada prinsipnya penguatan kekuatan militer menjadi salah satu karakteristik yang tidak akan pernah hilang di dalam politik global dan regional. Setiap Negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, akan selalu mempertimbangkan faktor kekuatan militer karena dapat

Universitas Indonesia

menjadi sarana atau alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional, terutama mempertahankan kedaulatan Negara. Munculnya dilema keamanan / *security dilemma* akibat pembangunan kapabilitas militer oleh suatu Negara, secara esensial mungkin terjadi apabila terjadi suatu konflik diantara kedua negara.

Seiring dengan tercapainya tujuan penelitian, maka penelitian ini telah berhasil menguraikan pembuktian dari hipotesis yang disusun pada bagian awal penelitian. Penelitian ini membuktikan bahwa, Kasus Ambalat yang merebak tahun 2005 menjadikan Indonesia tersadar karena ketika kasus itu meletup kondisi alutsista Indonesia memprihatinkan. Dimulai dari tahun 2006 militer Indonesia mulai membenahi diri. Dimana hasilnya terlihat setelah 7 tahun dari masa itu dimana pada saat ini kondisi militer Indonesia sudah mulai pulih dan saat ini Indonesia sedang giat-giatnya menghadirkan alutsista modern dengan istilah MEF (*Minimum Essential Force*). MEF I 2010-2014 dikurangkan dana US\$ 15 milyar untuk beli dan rawat alutsista. Tahap II MEF 2015-2019 prediksi belanja alutsista RI US\$ 20 milyar dan itu adalah belanja alutsista terbesar di ASEAN.

Peningkatan kapabilitas militer Indonesia pada 2006-2010 memang belum menunjukkan hasil yang maksimal, namun hal ini menjadi tolak awal kebangkitan militer Indonesia. Belanja alutsista 2006-2010 tidak begitu signifikan, secara keseluruhan penambahan yang terjadi pada periode ini kita bisa menambah 4 KRI Sigma dari Belanda yaitu: KRI Diponegoro, KRI Sultan Hasanuddin, KRI Sultan Iskandar Muda, dan KRI Frans Kaisieppo. Keempat KRI ini dari jenis korvet dan merupakan kapal perang paling canggih yang dimiliki Indonesia dengan rudal andalannya Exocet dan torpedo anti kapal selam. Periode ini Indonesia juga meretrofit beberapa KRI dari Parchim Class. Parchim Class ini merupakan kapal perang yang dibeli dari eks Jerman Timur periode 90an, jumlahnya mencapai 16 unit. Marinir juga memperoleh MLRS (senjata peluncur roket) jenis RM Grad buatan Ceko, Arhanud TNI AD memperoleh rudal grom dari Polandia untuk beberapa batalyon Arhanud. Selama periode 2006-2010 boleh dikatakan tidak ada penambahan alutsista TNI skala besar, hanya beli ala kadarnya termasuk memperbaiki beberapa alutsista misalnya tank amfibi Marinir jenis PT76 yang sudah tua dan panser amfibi jenis BTR50. Meskipun begitu TNI AD bisa

Universitas Indonesia

menambah batalyon tempurnya dari Divisi Kostrad dengan penambahan 1 brigade (3 batalyon) di Gorontalo Sulawesi. Kostrad saat ini memiliki 2 Divisi dan akan dikembangkan menjadi 3 divisi, demikian juga dengan Marinir dari 2 divisi yang sekarang ditingkatkan menjadi 3 divisi. TNI AU periode 2006-2010 berhasil menghidupkan kembali beberapa jet tempurnya seperti F16 dan F5E yang selama ini kesulitan suku cadang akibat embargo AS. Dari 10 F16 yang dimiliki semula hanya bisa terbang 4 unit namun akhirnya bisa diterbangkan seluruhnya 10 unit. Demikian juga dengan F5E dari 12 yang dimiliki akhirnya berhasil dioptimalkan keseluruhannya. Periode 2006-2010 TNI AU berhasil menambah 6 jet tempur kelas berat Sukhoi. Dengan tambahan 6 jet tempur ini maka kekuatan TNI AU dengan Sukhoi menjadi 10 unit. Periode 2012 ini jet tempur Sukhoi ditambah lagi jadi 6 unit sehingga nantinya mencapai 16 unit (1 skuadron).

5.2 Implikasi Bagi Indonesia

Di dalam kondisi hubungan antar negara yang normal dalam artian tidak adanya sutau konflik, kegunaan cara-cara militer untuk tujuan pertahanan dapat mempengaruhi atau menyebabkan suatu dilemma dari perspektif negara lain. Dengan kata lain, dalam konteks kepemilikan dan penggunaan kekuatan militer apapun arah atau coraknya pembangunan kekuatannya dapat memiliki kemungkinan memancing reaksi dari negara tetangga terdekat, seperti dalam kasus Indonesia dan Malaysia ini apalagi dengan adanya konflik Ambalat yang belum menemui kata sepakat diantara kedua belah pihak.

Menggambarkan kondisi hubungan Indonesia dan Malaysia, secara nyata dapat menggunakan persepsi ini, dalam arti antara kedua negara memang terdapat konflik perbatasan yang mengacu pada konflik bilateral. Dengan menggunakan tiga indikator dari *Action-Reaction model*, yaitu *Magnitude*, *Timing* dan *Awariness* diatas dapat dilihat dalam kasus Ambalat, dinamika Persenjataan antara Malaysia dan Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan tiga indikator tersebut.. Peningkatan kapabilitas militer diantara kedua negara mengarah pada modernisasi militer pada dua negara, dimana dinamika persenjataan antara Indonesia dan Malaysia ini hanya menimbulkan situasi yang bersifat modernisasi militer karena adanya dilema keamanan diantara kedua belah pihak, tetapi tidak dapat

menyebabkan terjadinya suatu konflik terbuka yang salah satu faktor pendukungnya yaitu disebabkan oleh hubungan bilateral yang erat diantara kedua negara.

Sebelum adanya konflik Ambalat di tahun 2005, bisa dikatakan hampir tidak adanya proses modernisasi alutsista TNI secara keseluruhan dan tidak adanya peningkatan kapabilitas militer Indonesia yang disebabkan oleh faktor internal dari Indonesia yang pada saat itu lebih memfokuskan sebagian besar anggaran untuk sektor ekonomi. Sehingga pada saat konflik Ambalat meletus di tahun 2005, kekuatan militer Indonesia dapat dikatakan tertinggal dari Malaysia. Atas dasar peristiwa inilah, Indonesia melakukan upaya Modernisasi TNI baik Angkatan darat, Udara dan Laut. Adanya kewaspadaan dari pihak Indonesia bahwa pada suatu saat nanti akan adanya kemungkinan terjadi lagi konflik seperti Ambalat dan bahkan yang lebih buruk. Untuk menanggapi hal itu harus di persiapkan segala kesiapan untuk menghadapinya. Faktor penting yang sangat berperan disini adanya peningkatan kapabilitas militer yang memiliki efek deterrence terhadap negara lain.

Melihat akan lemahnya militer Indonesia ketika itu membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah besar dengan mengadakan program MEF (Minimum Essential Force) yang bertujuan melakukan modernisasi militer Indonesia secara besar-besaran. Besar-besaran dalam artian lebih besar dari beberapa periode sebelumnya. Hal ini dilakukan supaya Malaysia tidak lagi menganggap remeh TNI dan melakukan provokasi di wilayah Indonesia. Dengan semakin banyaknya penambahan dan peremajaan alutsista TNI di semua bidang maka hal ini dapat membuat Malaysia berpikir ulang jika mau membuat provokasi mengenai Ambalat lagi.

Dampak positif konflik Ambalat bagi Indonesia adalah langkah awal Indonesia menjalankan modernisasi militernya agar bisa mencapai kekuatan militer minimum yang bisa menjaga setiap wilayah Indonesia. Modernisasi militer Indonesia melalui progra MEF ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu MEF tahap I, 2 dan 3. Pada MEF tahap pertama saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahap ini bisa dikatakan adalah tahap permulaan dari tiga tahap modernisasi militer Indonesia. Pada MEF tahap I ini, ada banyak sekali

Universitas Indonesia

pembelian dan upgrade yang dilakukan oleh militer Indonesia untuk memodernisasi alutsistanya. MEF tahap kedua akan berlangsung dari tahun 2015 sampai 2019 yang merupakan kelanjutan dari MEF tahap I, dan MEF tahap 3 yang merupakan kelanjutan dari tahap ke dua sebelumnya akan berlangsung dari tahun 2020 sampai 2024.

Indonesia sudah bisa merasakan dampak positif dari peningkatan kapabilitas militernya yang bermula dari tahun 2006, khususnya pada saat sekarang dimana hampir sudah tidak ada lagi provokasi terang-terangan dari Malaysia di Ambalat. Kalaupun ada hanya masalah ringan yang mampu diatasi secara jalur diplomatik. Modernisasi militer yang dilakukan Indonesia mulai tahun 2006 sudah menampakkan hasilnya. Malaysia sadar bahwa militer Indonesia yang mereka hadapi sekarang tidaklah sama dengan Militer Indonesia pada tahun 2005 dahulu dimana pertama kali nya Malaysia melakukan provokasi ambalat. Strategi deterrence yang dilakukan oleh Indonesia dengan membangun peningkatan kapabilitas militernya membuat Indonesia mengambil langkah besar dengan mengadakan program MEF (*Minimum Essential Force*) yang bertujuan melakukan modernisasi militer Indonesia secara besar-besaran. Hal ini dilakukan supaya Malaysia tidak lagi menganggap remeh TNI dan melakukan provokasi di wilayah Indonesia. Ketegangan agak mereda setelah adanya usaha perundingan kedua belah pihak dengan cara diplomasi, penurunan ketegangan diantara keduabelah pihak. Namun, sebelum adanya keputusan final dari mahkamah internasional dan disepakati kedua belah pihak maka ketegangan akan tetap ada di perairan Ambalat karena TLDM tetap hadir di perairan Ambalat dan TNI AL dengan segala upaya mengusir kapal perang TLDM untuk keluar dari perairan yang diklaim Indonesia. Provokasi akan terus berlangsung sampai status batas laut kedua negara di perairan ambalat dapat disepakati kedua belah pihak. Indonesia berusaha untuk mempertahankan kedaulatan RI, menggunakan bukti-bukti secara legal tentang pengelolaan dan pemilikan wilayah Ambalat.

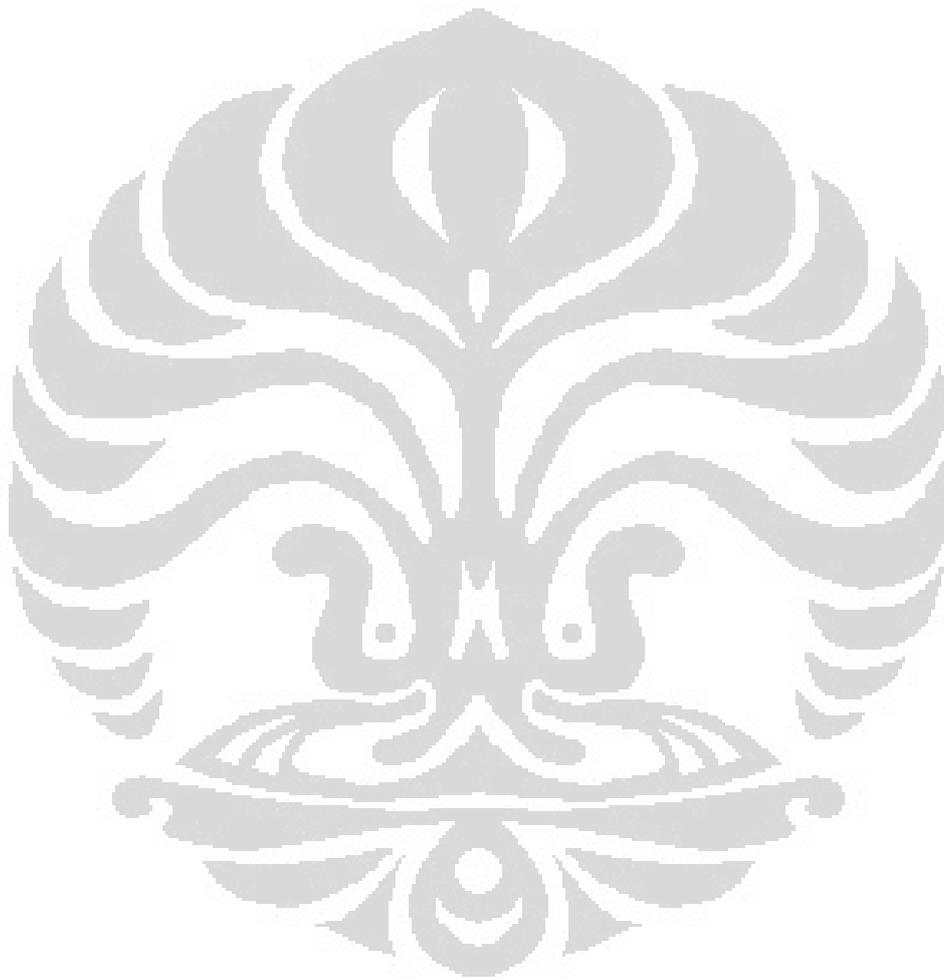
5.3 Saran

Dalam pengolahan dan pengumpulan data, penulis menghadapi kesulitan dalam menelusuri dokumen, karena beberapa dokumen sifatnya subjektif dan untuk kapasitas militer suatu negara itu memang tidak terdapat data yang benar-benar transparan karena jumlah yang sebenarnya dari kapabilitas militer itu sifatnya rahasia dan tertutup. Pada penelitian ini, tidak semua data didapatkan. Selain data-data tersebut tidak tersip dengan baik dan ada pula data yang memang tidak untuk dipublikasikan. Oleh karena itu penulis mengumpulkan data dan mengolahnya secara kualitatif, alangkah lebih baiknya jika suatu saat ada penulis lain yang dapat mengolah data secara kuantitatif untuk menguji validitas data ini.

Blok Ambalat yang merupakan salah satu kawasan zona terluar perbatasan Indonesia, merupakan suatu sistem yang di dalamnya terlibat berbagai pihak dan kepentingan. Permasalahan politik, ekonomi dan sosial mengenai kehidupan masyarakat, perdagangan lintas batas, penyelundupan Tenaga Kerja dan sumber daya alam di sekitar zona terluar perbatasan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan keuntungan positif bagi perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Ancaman kedaulatan Indonesia di sekitar zona terluar perbatasan harus ditangani secara komprehensif dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak dari Indonesia tidak hanya mengandalkan TNI saja tetapi peran berbagai pihak sangat diperlukan khususnya pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor militer karena anggaran inilah yang paling penting dalam pengembangan kapabilitas militer Indonesia.

Pembangunan kekuatan militer antara Indonesia dan Malaysia merupakan hal yang tak terhindarkan, karena pembangunan militer tersebut lebih mengacu pada deterrence dan lebih untuk mengamankan kedaulatan negara maka modernisasi kapabilitas militer yang sifatnya defensif tidak menyulut adanya konflik terbuka diantara kedua negara, namun jika ingin tetap menjaga kestabilan hubungan bilateral yang baik antara kedua negara sebaiknya perlu peningkatan tingkat kepercayaan diantara kedua negara tersebut dengan jalan membuat perjanjian militer secara bilateral bahwa kedua negara sepakat untuk menghargai kedaulatan sesama negara, peningkatan kapabilitas militer kedua negara tersebut

juga dapat memberi efek positif bagi peningkatan ketahanan regional diantara kedua negara. Saran terakhir penulis adalah agar kedua negara dapat mempercepat proses penyelesaian dari konflik ambalat secara diplomatik dan mempererat hubungan bilateral yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barry Buzan, *People, State and Fear, An Introduction to strategic Studies Military Technology and International Relations*, London:MacMilan Press, 1987.
- Barry Buzan and Herring. *The Arms Dynamic in World Politics*. London, 1998.
- C. Zagare, *The Dynamic of Deterrence*, University of Chicago Press. 1987
- Charles W. Kegley Jr. and Eugene R. Wittkopt, *World Politics: Trend and Transformation*, 3rd edition, New York: St. Martin's Press, 1989.
- Colin S. Gray, "The Arms Race Phenomenon", *World Politics*, Vol. 24, 1972.
- Frank C. Zagare and D. Marc Kilgour, *Perfect Deterrence*, New York: Cambridge University Press. 2000.
- Griffths, Martin and Terry. *International Relations the key concepts*, Routledge London and New York, 2002.
- Jackson, Robert. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Jusuf Soewandi, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Jurusan Sosiologi-FISIP Universitas Nasional, 2003.
- Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1994
- Michael Sheehan, "The Arms Race", Oxford: Martin Robertson, 1983.
- Patrick Morgan, *Deterrence Now*, Cambridge: Cambridge University Press. 2003
- Olivier *The New Central Asia: Geopolitics and the Birth of Nations*, (New York: NYU Press,2007.
- Robert Gilpin, "*War and Change in World Politics*".Australia. Cambridge University Press, 1981.
- Robert Jervis, *Cooperation under the security dilemma*, MacMilan Press, 1978.
- Rourke, John T. *International Politics on the World Stage, 8th Edition*, McGraw Hill/Dushkin, 2003

- Snyder, Glenn, and Paul A. Diesing, *Conflict among nations: Bargaining, decision making, and system structure in international crises*. Princeton: Princeton University Press, 1977.
- Spiegel, Steven, et al. *World Politics in a New Era, 3rd Edition*, Belmont: Thomson Wadsworth, 2004.
- Sudarsono, Juwono dkk., *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1996.
- Tim Dunne–Brian C. Smith., “Realism” dalam John Baylis dan Steve Smith, eds., *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- W. Lawrence Newman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Pearson Education, Inc, fifth edition, 2003.

ARTIKEL/JURNAL

- Anthony H. Cordesman, *The Military Balance 2002-2003 (Oxford University Press, London The International Institute for Strategic Studies, 2002*
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, “*Doktrin Pertahanan Negara 2006*”, Jakarta, 2008.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, “*Doktrin Pertahanan Negara 2008*”. Jakarta, 2008.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, “*Jurnal Tahunan Direktorat Wilayah Pertahanan Dephan RI*” Jakarta, 2010.
- Meike Mayasari., dalam *Jurnal Persengketaan daerah perbatasan di wilayah Ambalat Kaitannya dengan konsep wawasan nusantara*, Pustaka UGM, 2005.
- Military Balance 2006-2010. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies.*
- Yanyan Mochamad Yani, Drs., MAIR., Ph.D., dalam *Jurnal Politik Luar Negeri*, Pustaka Unpad, 2008.
- Yuli Prasetyaningasih, dalam artikel *Sengketa Ambalat dengan Reaktualisasi Nasionalisme Kritis*, Dokumen Fakultas Sastra-Seni Rupa UNS, Solo, 2009.

INTERNET

<http://www.bppk.depkeu.go.id/pp5/artikel1.htm>

<http://www.securemalaysia.com/2009/01/kd-rajawali-rmns-home-of-naval-air.html>

<http://www.globalsecurity.org/military/world/malaysia/navy.htm>

<http://www.milaviapress.com/orbat/malaysia/index.php>

<http://www.defenseworld.net/go/defensenews.jsp?id=4404>

<http://www.army.mod.gov.my/>

<http://www.dutchaviationsupport.com/00-HTMS/Indon-Airforce%20-3-Fnaval.htm>

<http://tni-au.mil.id/content/profil-satuan-0>

<http://tni-al.mil.id/content.html>

<http://nationmaster.com/ambalat>

www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php

http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=Indonesia

<http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2009/6/10/nation/4087486&secnation>

KARYA ILMIAH

Lestari, Annisa (2010) *Strategi Pertahanan Indonesia di Selat Malaka: Tawaran Proliferasi Security Initiative Periode 2006-2008*. Tesis, Universitas Indonesia.

Priswari, Inti (2010) *Analisis sengketa perbatasan wilayah kedaulatan blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, serta upaya penyelesaiannya*. Skripsi, Universitas Diponegoro.

